

Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Maluku

Triwulan III – 2015

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil

Misi Bank Indonesia

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan Undang-Undang.

Kami sangat mengharapkan komentar, saran dan kritik demi perbaikan buku ini

Alamat Redaksi :	Telp	: 0911-352762-63 ext. 8350
Unit Asesmen Ekonomi dan Keuangan	Fax	: 0911-356517
Kantor Perwakilan Bank Indonesia	e-mail	: andy_sb@bi.go.id
Provinsi Maluku		aldy_p@bi.go.id
Jl. Raya Pattimura No. 7		arif_r@bi.go.id
AMBON, 97124		rama_rp@bi.go.id
		dwi_ca@bi.go.id
	Homepage	: www.bi.go.id

KATA PENGANTAR

Pada periode triwulan III-2015, ekonomi Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan positif dengan laju yang melambat. Perekonomian Provinsi Maluku tumbuh sebesar 5.27% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5.63% (yoy). Meski melambat, pertumbuhan ekonomi Maluku masih tergolong tinggi dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4.73% (yoy). Sementara itu, pencapaian yang cukup baik juga terjadi pada sisi harga, dimana laju inflasi Maluku pada triwulan III-2015 tercatat sebesar 8.14% (yoy), lebih rendah dibandingkan kondisi triwulan sebelumnya sebesar 8.85% (yoy), didukung dengan terjaganya ekspektasi inflasi serta permintaan domestik yang terbatas. Namun demikian, laju inflasi tersebut masih merupakan yang tertinggi secara nasional, sehingga memerlukan perhatian dan upaya pengendalian yang lebih intensif dari seluruh pemangku kepentingan. Di sisi lain, kinerja perbankan Provinsi Maluku mengalami perlambatan kinerja intermediasi, namun mencatatkan kenaikan profitabilitas dan perbaikan kualitas kredit. Ke depan, kami optimis perekonomian Maluku mampu mencatatkan akselerasi pertumbuhan, khususnya didorong oleh realisasi belanja pemerintah serta perbaikan kinerja di sektor pertanian.

Buku Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Provinsi Maluku ini disusun secara rutin triwulanan sebagai salah satu perwujudan pencapaian sasaran strategis Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku yaitu pengoptimalan hasil kajian dan penyediaan informasi ekonomi di wilayah kerja. Penyusunan buku ini bertujuan untuk memberikan masukan mengenai perkembangan moneter, perbankan dan sistem pembayaran regional di Provinsi Maluku yang diharapkan dapat berguna untuk perumusan kebijakan di kantor pusat dan pihak terkait (*stakeholders*) di daerah.

Penyusunan buku ini tidak terlepas dari kerjasama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Maluku, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku, perbankan, responden survei, civitas akademika dan berbagai pihak terutama masyarakat di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Dalam rangka meningkatkan kualitas buku ini, saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kita semua khususnya masyarakat Maluku.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini dan semoga Tuhan memberikan berkah-Nya kepada kita semua dalam mengupayakan kinerja yang lebih baik.

Ambon, November 2015
KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI MALUKU

Wuryanto
Kepala Perwakilan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR SUPLEMEN	x
TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI MALUKU	xi
RINGKASAN UMUM	1
1. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI MALUKU.....	5
1.1. Perkembangan Makro Ekonomi Provinsi Maluku.....	5
1.2. Perkembangan PDRB Sisi Permintaan.....	8
1.2.1. Konsumsi.....	9
1.2.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga.....	9
1.2.1.2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT.....	11
1.2.1.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	11
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB).....	13
1.2.3. Ekspor dan Impor.....	15
1.2.3.1. Ekspor dan Impor Luar Negeri.....	15
1.2.3.2. Net Ekspor Antar Daerah.....	19
1.3. Perkembangan PDRB Sisi Penawaran.....	19
1.3.1. Pertanian, Kehutanan, Perikanan.....	20
1.3.2. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.....	25
1.3.3. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	26
1.3.4. Konstruksi.....	27
1.3.5. Industri Pengolahan.....	39
1.3.6. Transportasi dan Pergudangan.....	31
1.3.7. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	33
2. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH.....	41
2.1. Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku.....	41
2.2. Perkembangan Inflasi Kota-kota di Maluku.....	43
2.2.1. Inflasi Kota Ambon.....	43
2.2.2. Inflasi Kota Tual.....	45
2.3. Analisis Disagregasi Inflasi Provinsi Maluku.....	46
2.3.1. Komponen <i>Volatile Food</i>	47
2.3.2. Komponen <i>Core Inflation</i>	49
2.3.3. Komponen <i>Administered Price</i>	50
2.4. Realisasi Inflasi Triwulan III - 2015 dibanding Pola Historis.....	51

2.5. Kegiatan Pengendalian Inflasi di Provinsi Maluku.....	53
3. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN.....	55
3.1. Perkembangan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan.....	55
3.1.1. Perkembangan Perbankan Provinsi Maluku.....	55
3.1.1.1. Perkembangan Bank Umum.....	55
3.1.1.2. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).....	59
3.1.2. Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan	60
3.1.2.1. Perkembangan Sektor Rumah Tangga.....	60
3.1.2.2. Perkembangan Sektor Korporasi.....	61
3.1.2.3. Perkembangan Sektor UMKM.....	62
3.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Provinsi Maluku.....	63
3.2.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Kegiatan Perkasan.....	63
3.2.1.1. Perkembangan Pemusnahan Uang.....	64
3.2.1.2. Kegiatan Kas Keliling Bank Indonesia dan Kegiatan Lainnya.....	64
3.2.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non Tunai.....	65
3.2.2.1. Perkembangan Transaksi BI-RTGS.....	65
3.2.2.2. Perkembangan Transaksi Kliring.....	66
4. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH.....	67
4.1. Realisasi APBN Provinsi Maluku.....	67
4.2. Realisasi APBD Provinsi Maluku.....	68
4.2.1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku.....	68
4.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku.....	70
5. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH.....	73
5.1. Perkembangan Ketenagakerjaan dan Pengangguran.....	73
5.2. Tingkat Kemiskinan.....	75
5.3. Perkembangan Nilai Tukar Petani.....	76
6. PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU.....	79
6.1. Pertumbuhan Ekonomi.....	79
6.2. Inflasi.....	81
6.3. Stabilitas Sistem Keuangan.....	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Permintaan ADHK tahun 2010.....	8
Tabel 1-2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Penawaran ADHK tahun 2010.....	20
Tabel 1-3 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Provinsi Maluku.....	30
Tabel 2-1 Series Inflasi Provinsi di Balinustra-Sulampua (dalam % yoy)	41
Tabel 2-2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Maluku per Kelompok Komoditas (dalam % yoy).....	42
Tabel 2-3 Perkembangan Inflasi Kota Ambon, Kota Tual, Provinsi Maluku dan Nasional.....	43
Tabel 2-4 Kegiatan TPID triwulan III - 2015	53
Tabel 3-1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan (Bank Umum dan BPR) di Maluku	55
Tabel 3-2 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku	55
Tabel 3-3 Perkembangan DPK Bank Umum Maluku	56
Tabel 3-4 Perkembangan Komponen DPK Bank Umum di Maluku	56
Tabel 3-5 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum ke Maluku (Lokasi Proyek).....	57
Tabel 3-6 Perkembangan Komponen Kredit Bank Umum di Maluku	58
Tabel 3-7 Perkembangan Indikator Utama Bank Perkreditan Rakyat di Maluku	59
Tabel 3-8 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Maluku.....	60
Tabel 3-9 Rekapitulasi Kegiatan Perkasan KPw BI Prov. Maluku.....	63
Tabel 3-10 Kegiatan Kas Keliling Triwulan III-2015.....	65
Tabel 4-1 Realisasi belanja APBN Provinsi Maluku Triwulan III - 2015, dalam Rp.Juta	68
Tabel 4-2 Realisasi Pendapatan dan Belanja dari APBD Provinsi Maluku Triwulan III-2015 (Rp Juta).....	72
Tabel 5-1 Perkembangan kondisi penduduk usia kerja dan angkatan kerja di Provinsi Maluku	73
Tabel 5-2 Sebaran penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama	73
Tabel 5-3 Kedalaman dan Keparahan kemiskinan Provinsi Maluku	75
Tabel 5-4 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Maluku.....	76

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1-1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2015 antar-Provinsi di Wilayah KTI.....	5
Grafik 1-2 Struktur Perekonomian (PDRB Nominal) Provinsi Maluku, triwulanan, 2014-2015.....	6
Grafik 1-3 Struktur Perekonomian (PDRB Nominal) Provinsi Maluku Triwulan III 2015.....	6
Grafik 1-4 Struktur Perekonomian Provinsi Maluku.....	7
Grafik 1-5 Perkembangan PDRB Riil Provinsi Maluku	7
Grafik 1-6 Kapasitas Perekonomian Provinsi Maluku	7
Grafik 1-7 Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Maluku.....	9
Grafik 1-8 Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Maluku.....	9
Grafik 1-9 Impor Barang Konsumsi di Provinsi Maluku	10
Grafik 1-10 Indeks Tendensi Konsumen	10
Grafik 1-11 Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Provinsi Maluku.....	10
Grafik 1-12 Kredit Konsumsi di Bank Umum Provinsi Maluku	10
Grafik 1-13 Konsumsi LNPRT Provinsi Maluku.....	11
Grafik 1-14 Konsumsi Listrik Sosial di Provinsi Maluku.....	11
Grafik 1-15 Konsumsi Pemerintah (Riil) Provinsi Maluku	12
Grafik 1-16 Giro Pemerintah Daerah.....	12
Grafik 1-17 Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Provinsi Maluku	12
Grafik 1-18 Belanja Barang dalam APBN Provinsi Maluku.....	12
Grafik 1-19 Belanja APBD (tidak termasuk Belanja Modal) Provinsi Maluku.....	12
Grafik 1-20 Belanja APBN (tidak termasuk Belanja Modal) Provinsi Maluku.....	12
Grafik 1-21 Konsumsi Listrik Gedung Pemerintahan di Provinsi Maluku.....	13
Grafik 1-22 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Maluku.....	13
Grafik 1-23 Impor Barang Modal Provinsi Maluku.....	13
Grafik 1-24 Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Maluku	14
Grafik 1-25 Penanaman Modal Asing di Provinsi Maluku	14
Grafik 1-26 Belanja Modal Dalam APBD Provinsi Maluku	14
Grafik 1-27 Belanja Modal Dalam APBN Provinsi Maluku	14
Grafik 1-28 Kredit Investasi di Provinsi Maluku	15
Grafik 1-29 Kegiatan Investasi di Provinsi Maluku	15
Grafik 1-30 Ekspor (Rill) Provinsi Maluku	16
Grafik 1-31 Impor (Rill) Provinsi Maluku	16
Grafik 1-32 Neraca Perdagangan (rill) Provinsi Maluku	16
Grafik 1-33 Neraca Perdagangan Non-migas Provinsi Maluku	16
Grafik 1-34 Nilai Ekspor Non-migas Provinsi Maluku	17
Grafik 1-35 Volume Ekspor Non-migas Provinsi Maluku	17
Grafik 1-36 Nilai Impor Non-migas Provinsi Maluku	17
Grafik 1-37 Volume Impor Non-migas Provinsi Maluku	17

Grafik 1-38 Nilai Ekspor Non-migas Provinsi Maluku Triwulan III 2015 Menurut Negara Tujuan.....	18
Grafik 1-39 Nilai Impor Non-migas Provinsi Maluku Triwulan III 2015 Menurut Negara Asal.....	18
Grafik 1-40 Ekspor Non-migas Provinsi Maluku menurut Pelabuhan/Bandara Muat	18
Grafik 1-41 PDRB Net Ekpor antar Daerah Provinsi Maluku	19
Grafik 1-42 Kapasitas Produksi Sektor Pertanian Provinsi Maluku	21
Grafik 1-43 PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan, Perikanan	21
Grafik 1-44 Produksi Karet di PTPN Amahai, Maluku Tengah	21
Grafik 1-45 Produksi Kopra di PTPN XIV Amahai, Maluku Tengah	21
Grafik 1-46 Nilai Ekspor Biji Pala, Bunga dan Kapulaga Provinsi Maluku	22
Grafik 1-47 Harga Ekspor Biji Pala, Bunga dan Kapulaga Provinsi Maluku	22
Grafik 1-48 Produksi Ikan di PPN Ambon dan PPN Tual	22
Grafik 1-49 Nilai Tukar Petani (SBH 2012=100)	22
Grafik 1-50 Ekspor Hasil Laut Provinsi Maluku	23
Grafik 1-51 Harga Ekspor Hasil Laut Provinsi Maluku	23
Grafik 1-52 Kegiatan Usaha Sektor Perikanan	24
Grafik 1-53 Luas Panen dan Produksi Padi Maluku	24
Grafik 1-54 Kredit Sektor Pertanian di Provinsi Maluku.....	24
Grafik 1-55 PDRB Perdagangan dan Reparasi Provinsi Maluku	25
Grafik 1-56 Kegiatan Usaha Sektor Perdagangan di Provinsi Maluku	25
Grafik 1-57 Total Perdagangan (Ekspor-Impor) non-migas Maluku	25
Grafik 1-58 Arus Peti Kemas di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon	26
Grafik 1-59 Arus bongkar muat di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon	26
Grafik 1-60 Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Bank Umum Provinsi Maluku	26
Grafik 1-61 PDRB Kategori Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	27
Grafik 1-62 Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial APBN Provinsi Maluku	27
Grafik 1-63 Belanja Pegawai-Tidak Langsung APBD Provinsi Maluku	27
Grafik 1-64 PDRB Sektor Konstruksi Provinsi Maluku	28
Grafik 1-65 Realisasi Pengadaan semen Provinsi Maluku	28
Grafik 1-66 Perubahan Inventori Provinsi Maluku	28
Grafik 1-67 Kegiatan Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Maluku	28
Grafik 1-68 Kredit Sektor bangunan di Bank Umum Provinsi Maluku	29
Grafik 1-69 PDRB Sektor Industri Pengelolaan Provinsi Maluku	29
Grafik 1-70 Kegiatan Usaha Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Maluku	29
Grafik 1-71 Kapasitas Produksi Terpakai Kategori Industri Pengolahan di Provinsi Maluku	30
Grafik 1-72 Ekspor Komoditas Industri Provinsi Maluku	30
Grafik 1-73 Konsumsi Listrik kelompok Industri Provinsi Maluku	31
Grafik 1-74 Kredit Sektor Industri Pengolahan di Provinsi Maluku	31
Grafik 1-75 PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan	31
Grafik 1-76 Kegiatan Usaha Sektor Jasa Angkutan Darat & Laut di Provinsi Maluku.....	31
Grafik 1-77 Arus Penumpang di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon	32

Grafik 1-78 Trafik Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon.....	32
Grafik 1-79 Arus Penumpang di Bandara Pattimura, Kota Ambon	32
Grafik 1-80 Trafik Pesawat di Bandarar Pattimura, Kota Ambon.....	32
Grafik 1-81 Kredit Sektor Angkutan dan Komunikasi di Bank Umum Maluku	33
Grafik 1-82 PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.....	33
Grafik 1-83 Tingkat Penghunian Kamar dan Jumlah Tamu Hotel di Provinsi Maluku.....	34
Grafik 1-84 Konsumsi Listrik Kelompok Bisnis Provinsi Maluku.....	34
Grafik 1-85 Kredit Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Bank Umum Provinsi Maluku.....	34
Grafik 2-1 Perbandingan Inflasi Maluku dan Nasional	41
Grafik 2-2Andil Kelompok Komoditas Penyumbang Inflasi Maluku triwulan III-2015.....	41
Grafik 2-3Inflasi dan Andil Disagregasi bulanan (mtm) Kota Ambon	45
Grafik 2-4Inflasi dan Andil Disagregasi bulanan (mtm) Kota Tual	45
Grafik 2-5Andil Disagregasi Inflasi Maluku Triwulan III - 2015	47
Grafik 2-6Andil Komoditas <i>Volatile Food</i> Provinsi Maluku Triwulan III - 2015	47
Grafik 2-7Perkembangan Pendaratan Ikan PPN Ambon dan PPN Tual	47
Grafik 2-8Curah Hujan Maluku Triwulan III-2015	48
Grafik 2-9Andil Inflasi Tahunan Komponen Inflasi Inti Provinsi Maluku.....	50
Grafik 2-10Harga Emas Internasional	50
Grafik 2-11Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar (JISDOR).....	50
Grafik 2-12Perkembangan Harga Minyak Dunia	51
Grafik 2-13 <i>Event Analysis</i> Inflasi Provinsi Maluku	51
Grafik 2-14Tren Inflasi Kalender (ytd) Provinsi Maluku.....	52
Grafik 2-15Tren Inflasi Bulanan (mtm) Provinsi Maluku.....	52
Grafik 3-1Perkembangan Kondisi Keuangan Dunia Usaha Kota Ambon dan sekitarnya.....	57
Grafik 3-2Perkembangan Keyakinan Konsumen Kota Ambon.....	57
Grafik 3-3 <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) Bank Umum.....	58
Grafik 3-4 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Bank Umum.....	58
Grafik 3-5Perkembangan <i>Spread</i> Suku Bunga Bank Umum di Maluku.....	59
Grafik 3-6Perkembangan BOPO dan NIM Bank Umum di Maluku	59
Grafik 3-7Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini dan Komponennya.....	61
Grafik 3-8Kondisi Keuangan Konsumen Kota Ambon.....	61
Grafik 3-9Perkembangan Kredit Korporasi.....	61
Grafik 3-10 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) Korporasi.....	61
Grafik 3-11Perkembangan Kredit UMKM Maluku.....	62
Grafik 3-12 <i>Non Performing Loan</i> (NPL) UMKM Maluku.....	62
Grafik 3-13Perputaran Uang Kartal KPw BI Prov. Maluku.....	63
Grafik 3-14Pertumbuhan Uang Kartal Kartal KPw BI Prov. Maluku.....	63
Grafik 3-15Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE).....	64
Grafik 3-16Perkembangan Nominal BI-RTGS Maluku.....	65

Grafik 3-17Perkembangan Volume BI-RTGS Maluku.....	65
Grafik 3-18Perputaran Kliring di Provinsi Maluku.....	66
Grafik 4-1Proporsi Realisasi Belanja APBN 2015 Provinsi Maluku s/d Triwulan III - 2015.....	67
Grafik 4-2Realisasi belanja APBN Provinsi Maluku s/d Triwulan III - 2015, dalam persen (%)	67
Grafik 4-3Proposi Realisasi Pendapatan APBD 2015 di Provinsi Maluku s/d Triwulan III - 2015	69
Grafik 4-4Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Tw III Tahun 2011-2015	69
Grafik 4-5Proposi Realisasi Pendapatan Asli Daerah APBD 2015 Provinsi Maluku s/d Triwulan III - 2015 ...	69
Grafik 4-6Proposi Realisasi Dana Perimbangan APBD 2015 Provinsi Maluku s/d Triwulan III - 2015	69
Grafik 4-7Proposi Realisasi Belanja APBD 2015 Provinsi Maluku s/d Triwulan III - 2015	70
Grafik 4-8Proposi Realisasi Belanja APBD 2015 Provinsi Maluku Triwulan III Tahun 2011-2015	70
Grafik 4-9Proposi Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD 2015 Provinsi Maluku s/d Triwulan III-2015....	71
Grafik 4-10Proposi Realisasi Belanja Langsung APBD 2015 Provinsi Maluku s/d Triwulan III-2015	71
Grafik 5-1Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kab/Kota Provinsi Maluku 2013-2014.....	74
Grafik 5-2Perkembangan Usaha dan Penggunaan Tenaga Kerja.....	74
Grafik 5-3Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku.....	75
Grafik 5-4Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (2013)	75
Grafik 5-5Indeks Gini Ratio.....	75
Grafik 5-6Nilai Tukar Petani (%)	76
Grafik 5-7Nilai Tukar Petani per Sub Sektor (%).....	76
Grafik 6-1Indeks Ekspektasi Konsumen	79
Grafik 6-2Indeks Kegiatan Dunia Usaha.....	79
Grafik 6-3Perkiraan curah hujan pada Triwulan IV - 2015	81
Grafik 6-4Pergerakan harga minyak dunia	82
Grafik 6-5Pergerakan harga emas dunia	82
Grafik 6-6Ekspektasi harga jual	82
Grafik 6-7Indeks ekspektasi harga konsumen	82

DAFTAR SUPLEMEN

BOKS 1. Perkembangan PDRB dan Analisis Tipologi Klassen Kota/Kab di Maluku.....	35
BOKS 2. Daya Saing Industri dan Indeks Tata Kelola Daerah Maluku.....	38

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI MALUKU

A. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun Dasar 2010

Indikator	2014				TOTAL	2015		
	II	III	IV	IV		I	II	III
Produk Domestik Regional Bruto ADHK TD 2010 (Rp Miliar)	5,737.38	5,811.29	5,948.61	6,087.78	23,585.06	5,975.91	6,138.71	6,262.10
<i>Berdasarkan Kategori</i>								
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,444.36	1,458.74	1,467.59	1,484.86	5,855.56	1,479.83	1,488.61	1,461.78
- Pertambangan & Penggalian	173.78	202.76	214.31	210.91	801.75	196.20	192.79	195.34
- Industri Pengolahan	313.72	314.96	326.46	330.92	1,286.06	324.41	328.50	333.34
- Pengadaan Listrik, Gas	5.70	5.83	6.14	6.92	24.58	8.66	4.64	4.71
- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	29.15	29.46	29.87	30.35	118.82	28.52	29.84	29.68
- Konstruksi	393.28	401.33	410.23	417.52	1,622.35	402.57	414.00	436.69
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	819.38	808.68	837.13	868.91	3,334.09	849.61	882.02	901.24
- Transportasi dan Pergudangan	312.97	315.34	328.13	339.66	1,296.09	324.54	339.66	347.98
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	102.72	104.88	106.64	109.27	423.52	106.46	112.60	111.00
- Informasi dan Komunikasi	220.57	221.40	225.41	232.60	899.97	237.60	245.36	245.87
- Jasa Keuangan	207.87	213.34	215.85	238.03	875.09	240.39	217.55	235.67
- Real Estate	20.82	21.00	21.33	21.53	84.69	21.58	21.76	21.85
- Jasa Perusahaan	61.26	61.89	63.11	63.90	250.16	64.24	64.66	64.85
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,094.64	1,104.39	1,144.26	1,171.55	4,514.84	1,132.54	1,217.22	1,276.15
- Jasa Pendidikan	309.24	318.77	320.55	323.97	1,272.53	327.98	339.69	349.93
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	127.19	127.43	130.43	132.30	517.35	129.09	134.49	137.89
- Jasa lainnya	100.73	101.10	101.19	104.59	407.61	101.70	105.32	108.13
<i>Berdasarkan Permintaan</i>								
- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3,604.02	3,798.98	4,093.13	4,249.09	15,745.22	4,205.05	4,260.70	4,290.53
- Pengeluaran Konsumsi LNPR	142.78	134.17	132.60	136.57	546.13	134.75	138.83	144.03
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,986.66	2,322.17	2,507.64	2,954.53	9,771.00	2,688.41	2,852.64	2,979.52
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	1,964.11	1,856.09	1,939.20	2,008.07	7,767.47	1,814.13	1,861.65	1,960.01
- Perubahan Inventori	71.31	83.08	65.35	19.29	239.03	30.20	31.06	31.68
- Ekspor Luar Negeri	440.68	603.76	606.87	550.31	2,201.62	545.38	562.12	532.42
- Impor Luar Negeri	584.04	601.10	609.90	623.44	2,418.48	629.58	647.71	621.44
- Net Ekspor Antar Daerah	(1,888.14)	(2,385.86)	(2,786.28)	(3,206.63)	(10,266.91)	(2,812.44)	(2,920.57)	(3,054.65)

B. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun Dasar 2010

Indikator	2014				TOTAL	2015		
	I	II	III	IV		I	II	III
Produk Domestik Regional Bruto ADHB TD 2010 (Rp Miliar)	7,576.93	7,789.04	8,074.76	8,292.62	31,733.34	8,170.30	8,497.96	8,717.45
<i>Berdasarkan Kategori</i>								
- Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,929.85	1,977.47	1,996.50	2,038.36	7,942.18	2,048.15	2,076.32	2,051.10
- Pertambangan & Penggalian	297.72	337.47	343.35	271.09	1,249.63	206.03	226.34	201.62
- Industri Pengolahan	394.52	399.19	418.39	431.68	1,643.78	434.36	445.49	458.92
- Pengadaan Listrik, Gas	4.83	4.97	4.73	5.54	20.07	8.69	4.96	4.94
- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	33.94	34.57	35.13	35.87	139.51	34.47	37.47	38.07
- Konstruksi	550.72	572.61	602.34	626.44	2,352.11	608.75	628.02	667.04
- Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	960.41	965.26	1,016.24	1,074.54	4,016.45	1,065.70	1,116.82	1,152.89
- Transportasi dan Pergudangan	396.48	410.14	435.27	461.08	1,702.98	445.29	474.35	491.01
- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	135.43	139.19	142.69	147.39	564.70	145.54	154.73	153.01
- Informasi dan Komunikasi	216.34	220.93	229.46	238.30	905.03	247.60	258.72	261.83
- Jasa Keuangan	262.98	272.69	279.49	313.03	1,128.19	320.82	293.56	320.63
- Real Estate	25.79	26.04	27.16	27.77	106.76	27.92	28.34	28.58
- Jasa Perusahaan	77.58	80.61	82.85	85.35	326.39	87.15	88.38	89.19
- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,572.24	1,609.84	1,712.14	1,763.75	6,657.98	1,711.19	1,851.85	1,957.38
- Jasa Pendidikan	420.37	436.02	441.75	453.87	1,752.01	461.74	482.26	500.84
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165.05	167.72	172.19	177.71	682.66	176.70	184.27	190.06
- Jasa lainnya	132.68	134.31	135.09	140.84	542.92	140.18	146.09	150.35
<i>Berdasarkan Permintaan</i>								
- Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,675.89	5,149.36	5,356.94	5,811.76	20,993.95	5,795.78	5,962.44	6,035.48
- Pengeluaran Konsumsi LNPR	166.38	164.63	168.61	175.26	674.87	173.21	179.77	191.86
- Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,373.06	2,861.45	3,436.60	4,011.48	12,682.59	3,660.43	3,917.56	4,119.46
- Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	2,236.21	2,148.33	2,245.04	2,317.28	8,946.86	2,180.93	2,285.28	2,365.00
- Perubahan Inventori	82.56	104.72	89.16	25.29	301.73	40.18	41.94	42.95
- Ekspor Luar Negeri	655.59	924.40	931.14	834.14	3,345.26	829.46	864.58	849.50
- Impor Luar Negeri	1,102.47	1,139.38	1,207.36	1,236.80	4,686.00	1,252.80	1,292.41	1,269.42
- Net Ekspor Antar Daerah	(1,510.30)	(2,424.46)	(2,945.36)	(3,645.79)	(10,525.91)	(3,256.91)	(3,461.19)	(3,617.37)

TABEL INDIKATOR EKONOMI PROVINSI MALUKU

C. Ekspor, Impor, Inflasi, Perbankan dan Sistem Pembayaran

Indikator	2012				2013				2014				2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Ekspor															
- Nilai Ekspor Non Migas (USD juta)	66.29	25.60	27.52	32.69	24.64	38.96	30.36	31.39	29.51	26.61	30.76	27.74	11.10	5.36	3.08
- Volume Ekspor Non Migas (ribu ton)	426.25	43.98	44.48	52.86	37.93	55.13	46.07	52.32	82.74	39.62	43.76	35.89	13.99	3.73	0.26
Impor															
- Nilai Impor Non Migas (USD juta)	3.85	0.18	0.22	5.52	0.21	0.87	3.69	0.95	3.40	2.54	1.17	0.21	5.94	-	0.24
- Volume Impor Non Migas (ribu ton)	6.08	0.08	0.08	1.31	0.04	0.29	1.10	0.13	7.22	5.54	0.64	0.08	6.27	-	0.23
Indeks Harga Konsumen															
- Kota Ambon	137.57	142.05	142.03	140.74	141.12	144.46	156.03	153.14	110.20	111.85	111.86	115.04	119.50	120.87	120.41
- Kota Tual	-	-	-	-	-	-	-	-	112.53	113.36	117.57	125.34	130.83	133.57	135.55
- Provinsi Maluku	137.57	142.05	142.03	140.74	141.12	144.46	156.03	153.14	110.36	111.95	112.31	115.86	120.40	121.88	121.46
Laju Inflasi Tahunan (% yoy)															
- Kota Ambon	8.65	6.25	7.07	6.73	2.58	1.70	9.86	8.81	9.12	9.14	2.27	6.81	8.44	8.06	7.64
- Kota Tual	-	-	-	-	-	-	-	-	7.00	5.68	8.85	11.48	16.26	17.83	13.67
- Provinsi Maluku	8.65	6.25	7.07	6.73	2.58	1.70	9.86	8.81	8.97	8.86	2.78	7.19	9.07	8.85	8.14
Perbankan															
Aset Perbankan (Rp Triliun)	12.58	13.21	13.41	12.69	13.29	13.78	14.18	13.33	14.13	15.21	16.13	14.09	16.85	16.75	17.73
- Bank Pemerintah	9.20	9.84	9.89	8.71	9.46	9.99	10.35	9.19	10.18	11.02	11.70	9.42	12.33	12.04	12.97
- Bank Swasta	2.73	2.63	2.92	3.24	3.12	3.01	2.98	3.14	3.04	3.22	3.41	3.49	3.36	3.52	3.54
- BPR	0.65	0.74	0.61	0.75	0.72	0.79	0.85	1.00	0.92	0.98	1.02	1.17	1.16	1.19	1.22
Dana Pihak Ketiga (Rp Triliun)	7.27	7.72	7.90	8.49	8.50	8.56	8.99	9.59	9.50	10.19	10.73	10.74	11.10	11.80	12.33
- Giro	1.66	1.67	1.58	1.61	1.77	1.73	1.95	1.72	2.07	2.38	2.26	1.90	2.44	2.93	2.99
- Tabungan	3.32	3.68	3.81	4.68	4.25	4.28	4.46	5.25	4.60	4.62	5.04	5.58	4.78	4.86	5.15
- Deposito	2.28	2.38	2.50	2.19	2.48	2.55	2.58	2.63	2.84	3.19	3.43	3.25	3.88	4.01	4.19
Kredit (Rp Triliun)-Berdasarkan Jenis Penggunaan	5.94	6.25	6.51	6.84	7.09	7.63	8.06	8.35	8.40	8.64	8.86	9.05	9.16	9.58	9.82
- Modal Kerja	1.71	1.87	1.83	1.76	1.78	2.00	2.12	2.21	2.13	2.28	2.34	2.35	2.39	2.92	2.99
- Investasi	0.94	0.97	0.97	1.02	1.05	1.16	1.25	1.27	1.25	1.16	1.20	1.19	1.15	0.86	0.84
- Konsumsi	3.30	3.41	3.71	4.06	4.26	4.48	4.69	4.86	5.00	5.18	5.32	5.50	5.62	5.80	5.99
Kredit UMKM (Rp Triliun)	1.78	1.95	1.94	1.83	1.80	1.96	1.92	2.04	2.07	2.10	2.14	2.22	2.23	2.39	2.35
- Modal Kerja	1.32	1.41	1.36	1.26	1.23	1.29	1.25	1.34	1.34	1.44	1.52	1.60	1.62	1.78	1.78
- Investasi	0.44	0.52	0.55	0.54	0.53	0.62	0.62	0.65	0.68	0.66	0.62	0.63	0.62	0.61	0.57
- Konsumsi	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	-	-
Loan to Deposit Ratio (%)	72.67	74.98	74.26	72.07	74.05	78.88	78.49	76.15	77.87	75.10	73.02	74.67	73.16	72.48	70.79
NPL Gros (%)	7.54	3.15	3.41	2.60	2.64	2.51	2.64	2.18	3.34	3.44	3.14	2.73	2.48	1.94	1.76
Sistem Pembayaran															
Transaksi RTGS															
- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp miliar)	93.39	123.52	127.70	174.84	122.19	126.11	134.14	160.94	99.07	125.55	168.39	167.16	187.65	99.40	74.99
- Rata-rata Harian Volume Transaksi (dalam ribuan)	0.14	0.19	0.19	0.21	0.18	0.16	0.15	0.20	0.14	0.16	0.21	0.18	0.09	0.09	0.09
Transaksi Kliring															
- Rata-rata Harian Nominal Transaksi (Rp miliar)	15.59	19.72	19.14	25.14	16.33	16.10	17.85	24.02	21.84	20.27	18.51	22.33	21.68	16.49	25.66
- Rata-rata Harian Volume Transaksi (dalam ribuan lembar)	0.75	1.21	1.04	1.40	0.62	0.60	0.64	0.74	0.60	0.59	0.61	0.61	0.59	0.40	0.47



RINGKASAN UMUM

PERKEMBANGAN

MAKRO EKONOMI REGIONAL

Pada Triwulan III-2015, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku mengalami pertumbuhan positif dengan laju yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Maluku tercatat tumbuh sebesar 5.27% (yoy), sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5.63% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4.73% (yoy).

Dari sisi permintaan, melambatnya pertumbuhan ekonomi Maluku seiring dengan melemahnya konsumsi rumah tangga yang dicerminkan oleh penurunan optimisme konsumen, belum optimalnya realisasi belanja pemerintah khususnya yang bersumber dari APBN, serta makin dalamnya kontraksi pada kinerja ekspor luar negeri sejalan dengan perlambatan ekonomi global, dimana masing-masing komponen tercatat tumbuh sebesar 4.82% (yoy), 18.82% (yoy) dan -12.27% (yoy), melemah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12.15% (yoy), 22.84% (yoy) dan -6.90% (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi Maluku disebabkan melambatnya kinerja kategori utama Maluku, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang ditengarai akibat kekeringan dan kebakaran yang melanda sebagian wilayah pertanian dan perkebunan; serta perlambatan pada kinerja kategori perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sejalan dengan pelemahan konsumsi rumah tangga. Pertumbuhan kategori pertanian dan perdagangan pada triwulan III-2015 tercatat sebesar -0.40% (yoy) dan 7.66% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2.05% (yoy) dan 9.07% (yoy).

PERKEMBANGAN

INFLASI

Perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya, meskipun masih berada pada tingkat yang tinggi. Pencapaian inflasi Maluku tercatat sebesar 8.14% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 8.85% (yoy). Secara umum, menurunnya inflasi Maluku disebabkan beberapa faktor, diantaranya terkendalanya ekspektasi inflasi serta permintaan domestik yang terbatas sehingga menyebabkan menurunnya inflasi inti. Selain itu, operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Provinsi maupun Kota serta pemenuhan stok oleh distributor terutama pada saat Hari Raya Idul Fitri turut berkontribusi terhadap kestabilan harga kebutuhan pokok.

Berdasarkan kelompok komoditas, penurunan laju inflasi terjadi pada seluruh kelompok komoditas, kecuali bahan makanan, makanan jadi dan pendidikan. Menurunnya inflasi pada kelompok perumahan didorong oleh penurunan inflasi pada sub kelompok bahan bakar dan perlengkapan rumah tangga akibat penurunan harga semen dan gas elpiji 12 kg. Sementara itu, melambatnya inflasi pada kelompok transportasi sebagai dampak normalisasi tarif angkutan udara paska berakhirnya *peak-season* Lebaran, khususnya pada periode akhir laporan.

Pada triwulan III-2015, perbankan Provinsi Maluku mengalami perlambatan kinerja intermediasi, namun mencatatkan kenaikan profitabilitas dan perbaikan kualitas kredit. Indikator kinerja intermediasi utama, yaitu aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, dan *loan-to-deposit* ratio (LDR), mengalami perlambatan. Total aset pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp16.51 triliun atau tumbuh 2.36% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10.15% (yoy). Sementara itu, perkembangan penghimpunan DPK mencatatkan total Rp12.05 triliun atau tumbuh 12.33% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15.85% (yoy). Selanjutnya, penyaluran kredit berlokasi proyek pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp9.82 triliun atau tumbuh 10.90% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11.19% (yoy). Dengan pertumbuhan kredit yang lebih lambat dibandingkan penghimpunan dana, tingkat intermediasi perbankan yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tercatat mengalami penurunan, yaitu dari 72.48% pada triwulan II-2015 menjadi 72.45% pada triwulan laporan.

Namun demikian, penurunan kinerja intermediasi tersebut diikuti dengan penurunan *non-performing loan* (NPL), yang mengindikasikan perbaikan kualitas kredit. NPL pada triwulan laporan tercatat sebesar 1.76%, lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1.94%. Selain itu, dari sisi profitabilitas, perbankan Maluku juga menunjukkan tren yang positif, yaitu turunnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), serta meningkatnya rasio pendapatan bunga bersih terhadap aset produktif (*net interest margin*/NIM).

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV-2015 diperkirakan tumbuh positif dan dalam tren yang meningkat. Perekonomian Maluku pada triwulan mendatang diperkirakan tumbuh dalam rentang 5.20-6.20% (y.o.y). Dari sisi dunia usaha, akselerasi pada triwulan mendatang antara lain disebabkan masuknya masa panen tabama dan beberapa hortikultura sesuai dengan pola produksinya, maraknya penyelenggaraan MICE (*Meeting, Invention, Convention dan Exhibition*) menjelang akhir tahun, serta meningkatnya aktivitas konstruksi seiring dengan meningkatnya kinerja belanja pemerintah dan kelanjutan pengerjaan pembangunan proyek *multi-years*. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku di triwulan mendatang diperkirakan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga namun dalam tingkat yang terbatas, meningkatnya konsumsi dan investasi pemerintah mengikuti pola musiman pada akhir tahun di samping adanya penyelenggaraan pilkada serentak, serta menguatnya optimisme dunia usaha terhadap ekspektasi investasi.

Sementara dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi mendatang diperkirakan didorong oleh kategori-kategori dengan pertumbuhan tinggi, diantaranya perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta transportasi dan pergudangan seiring dengan meningkatnya aktivitas jual beli dalam rangka Pesparawi Nasional, Hari Raya Natal dan persiapan Tahun Baru 2016 serta masuknya periode *peak-season* bagi dunia penerbangan.

OUTLOOK

INFLASI

Laju inflasi pada triwulan IV-2015 diperkirakan berada pada rentang 6.00-7.00% (yoy). Secara umum, tekanan inflasi Maluku pada triwulan mendatang diperkirakan mereda, antara lain disebabkan faktor *high-base effect* akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal yang menjadi faktor *downside-risk* inflasi di triwulan mendatang adalah masuknya periode panen beras dan bumbu-bumbuan di beberapa sentra produksi Maluku, serta kondisi cuaca yang relatif kondusif untuk aktivitas petani sayur maupun perkebunan, khususnya pada bulan Oktober dan November.

Meski demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu mendapat perhatian. Dari sisi internal, beberapa sentra produksi di luar Maluku cenderung mengalami penurunan produksi akibat el nino, banyaknya penyelenggaraan *event* khusus seperti Pesparawi Nasional dan Maluku Expo 2015 serta masuknya pola musiman yaitu perayaan Hari Natal 2015 dan persiapan Tahun Baru 2016. Sementara itu, wacana kenaikan UMP Maluku 2016 dan rencana migrasi pelanggan 900 VA ke tarif non subsidi diperkirakan menambah tekanan dari sisi ekspektasi dan pengeluaran masyarakat.

Di sisi lain, tekanan dari sisi eksternal diperkirakan cukup rendah seiring dengan meredanya tekanan terhadap nilai tukar rupiah sehingga mengurangi potensi kenaikan tariff *adjustment* TTL dan harga BBM serta dampak lanjutannya. Namun, terdapat hal yang perlu diwaspadai, yaitu dampak dari implementasi PMK No. 132 tahun 2015 tentang bea impor barang konsumsi.

OUTLOOK

STABILITAS SISTEM KEUANGAN

Mencermati potensi ke depan, masih terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan kinerja intermediasi perbankan untuk Provinsi Maluku. Dengan tingkat LDR yang masih cukup rendah, yaitu 72,45% pada seluruh perbankan dan 63,45% pada bank umum, masih terdapat ruang intermediasi yang cukup tinggi di Provinsi Maluku. Ruang intermediasi juga semakin longgar dengan keputusan RDG Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat GWM Primer dari 8.00% menjadi 7,50%. Dengan kembali meningkatnya keyakinan konsumen yang ditopang oleh naiknya permintaan atas pembelian barang tahan lama, diperkirakan penyaluran kredit perbankan pada sektor rumah tangga terus menguat. Namun demikian, penyaluran kredit pada sektor korporasi diperkirakan masih akan melesu, seiring dengan meningkatnya risiko usaha dan penurunan profitabilitas, terutama pada kategori pertanian, khususnya pada sub kategori perikanan dan perkebunan.

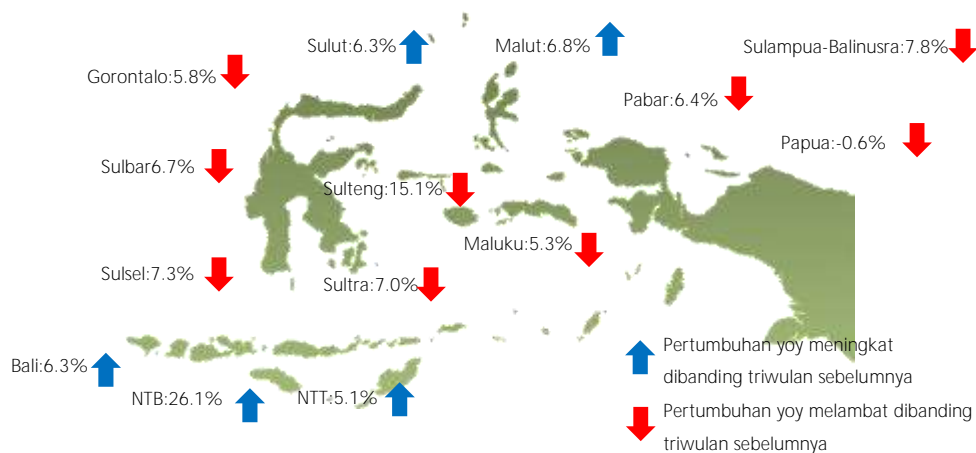
Dari sisi risiko kredit, terdapat potensi peningkatan NPL pada triwulan IV-2015, yang didorong oleh sektor korporasi. Dampak dari pengetatan peraturan di usaha perikanan sejak akhir 2014 lalu berdampak pada menurunnya profitabilitas korporasi perikanan di Maluku, terutama pada korporasi yang melakukan operasi penangkapan sendiri, dengan menggunakan kapal besar yang kebanyakan merupakan kapal eks asing. Sementara itu, tingginya tingkat NPL kredit UMKM juga perlu diwaspadai, karena masih berada pada tingkat 4,41% pada triwulan III-2015, walaupun sudah dalam tren yang menurun. Di sisi lain, kredit rumah tangga masih terpantau aman.



BAB I. PERKEMBANGAN MAKRO EKONOMI REGIONAL

1.1 Perkembangan Makro Ekonomi Provinsi Maluku

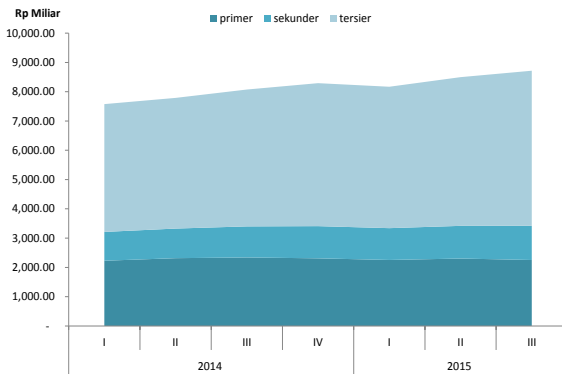
Pada Triwulan III-2015, perekonomian Maluku mengalami pertumbuhan positif dengan laju yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan laporan sebesar 5.27% (yoy), sedikit termoderasi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5.63% (yoy), namun lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4.73% (yoy). Sementara itu, PDRB Provinsi Maluku Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencatatkan nominal sebesar Rp8.72 triliun pada triwulan laporan. Selanjutnya, laju deflator PDRB atau inflasi implisit Maluku pada triwulan III-2015 juga tercatat melambat. Inflasi implisit perekonomian Maluku pada triwulan laporan sebesar 2.55% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3.28% (yoy).



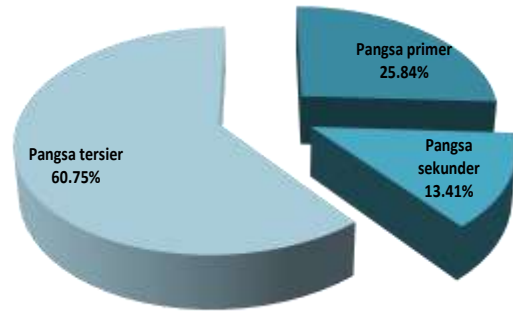
Sumber: BPS; diolah

Grafik 1-1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2015 antar-Provinsi di Wilayah KTI

Mencermati pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), Maluku merupakan salah satu provinsi yang mencatatkan pertumbuhan relatif rendah dibandingkan provinsi lain. Maluku pada triwulan laporan tumbuh 5.27% (yoy), tercatat hanya Papua dan NTT yang mengalami pertumbuhan di bawah provinsi Maluku, yaitu sebesar -0.6% (yoy) dan 5.1% (yoy). Wilayah KTI sendiri mengalami pertumbuhan sebesar 7.8% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 9.0% (yoy). Secara umum, melambatnya pertumbuhan agregat wilayah KTI seiring perlambatan kinerja pertumbuhan produksi konsentrat tembaga dan investasi bangunan akibat dampak serapan belanja modal pemerintah di bawah pola historis serta level produksi emas di Papua yang relatif rendah dibandingkan triwulan lalu akibat pasar global yang masih lesu. Lebih lanjut, diantara 13 provinsi di wilayah KTI, hanya 2 provinsi yang mencetak pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan wilayah KTI, yaitu Sulawesi Tengah dan NTB dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 15,1% (yoy) dan 26.1% (yoy).



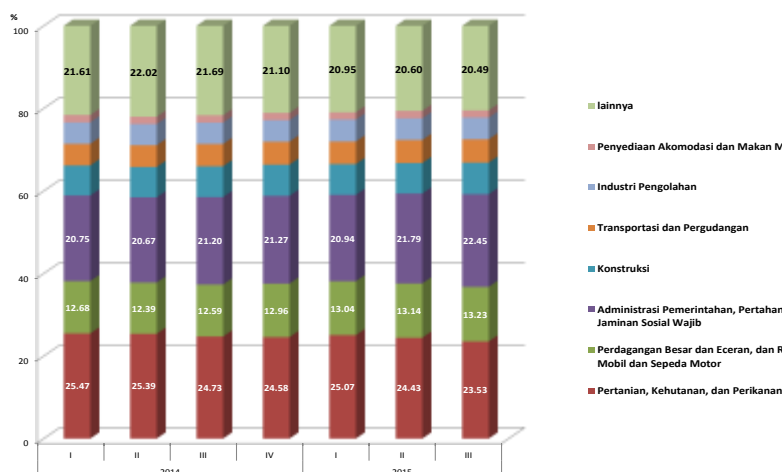
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-2 Struktur Perekonomian (PDRB Nominal) Provinsi Maluku Triwulanan, 2014-2015



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-3 Struktur Perekonomian (PDRB Nominal) Provinsi Maluku, Triwulan III 2015

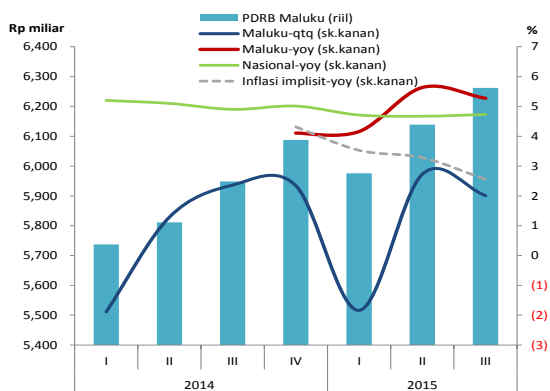
Menurut sektor usahanya, perekonomian Provinsi Maluku masih didominasi oleh sektor tertier atau berorientasi jasa. Sektor tertier¹⁾ memiliki pangsa 60.75% dari total PDRB Nominal Maluku triwulan III 2015 tercatat tumbuh (riil) sebesar 8.77% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8.30% (yoy). Sementara itu, sektor primer²⁾ dengan pangsa 25.84% tercatat mengalami kontraksi 1.47% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang mampu tumbuh 1.19% (yoy). Sedangkan, sektor sekunder³⁾ dengan pangsa 13.41% tercatat tumbuh 4,10% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 3.38% (yoy). Sektor primer tercatat mengalami kecenderungan yang menurun di tengah meningkatnya andil sektor tertier. Menurunnya kontribusi sektor primer ditengarai akibat beberapa faktor, diantaranya: menurunnya minat usaha petani seiring dengan menurunnya harga komoditas perkebunan, berkurangnya jumlah tenaga kerja pada sektor perikanan paska ditutupnya beberapa perusahaan perikanan, beralihnya tenaga kerja ke sektor tertier khususnya perdagangan maupun jasa seiring dengan masuknya periode Lebaran dan persiapan Pesarawi Nasional, serta berkurangnya insentif di sektor pertanian di tengah masuknya fenomena el nino.

1) Sektor Tertier: Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan; Real Estate; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya
 2) Sektor Primer: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian
 3) Sektor Sekunder: Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang; Konstruksi

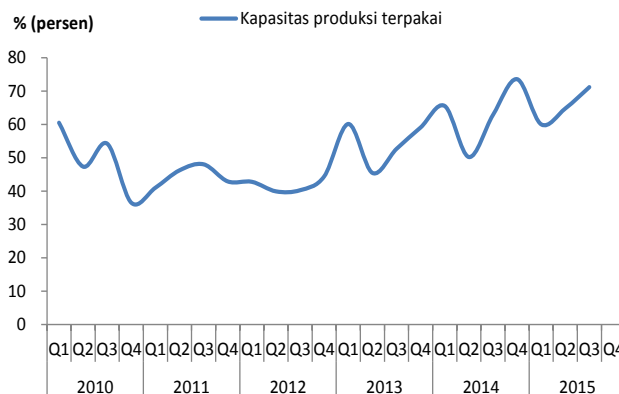


Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah
 Grafik 1-4 Struktur Perekonomian Provinsi Maluku

Berdasarkan kelompok kategorinya, perekonomian Maluku masih ditopang oleh kategori utama, yaitu pertanian, dengan kecenderungan yang menurun. Pada triwulan laporan, kategori pertanian masih mendominasi dengan pangsa sebesar 23.53%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 24.43%, maupun triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 24.73%. Sementara itu, kategori Perdagangan menunjukkan peningkatan pangsa, yaitu dari 13.14% pada triwulan II-2015 menjadi 13.23% pada triwulan laporan. Sedangkan, kategori Administrasi Pemerintahan juga meningkat, dari 21.79% pada triwulan II-2015 menjadi 22.45% pada triwulan laporan.



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-5 Perkembangan PDRB Riil Provinsi Maluku



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha- Bank Indonesia
 Grafik 1-6 Kapasitas Perekonomian Provinsi Maluku*

Meskipun mengalami sedikit moderasi, pertumbuhan ekonomi Maluku masih tergolong tinggi, yang didorong oleh meningkatnya kapasitas produksi perekonomian Maluku. Menurut hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), kapasitas produksi terpakai perekonomian Maluku pada triwulan laporan tercatat mencapai 71.20%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 64.78%. Meningkatnya kapasitas produksi perekonomian Maluku juga terlihat dari meningkatnya realisasi kegiatan usaha secara keseluruhan, dimana pada triwulan laporan indeks realisasi kegiatan usaha tercatat sebesar 30.96%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2.24%. Meningkatnya kapasitas produksi perekonomian Maluku

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: masuknya masa panen tanaman padi yang telah dimulai lebih awal di beberapa sentra produksi padi, membaiknya faktor cuaca dan gelombang laut di wilayah perairan Maluku, musim panen tanaman perkebunan rakyat, seperti: pala, cengkoh dan kopra, adanya perayaan Hari Raya Lebaran yang hampir bersamaan dengan liburan sekolah, serta adanya penyelenggaraan *event* khusus yang bersifat nasional maupun regional, antara lain: persiapan Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) Tingkat Nasional dan Maluku Fair 2015, Perayaan Hari Jadi Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta maraknya penyelenggaraan kegiatan *Meeting, Invention, Convention dan Exhibition* (MICE) menjelang akhir tahun.

1.2. Perkembangan PDRB Sisi Permintaan

Tabel 1-1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Permintaan Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010

	Komponen	2014		2015**		
		IV	Total	I	II*	III**
Pangsa (%)	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	70.08	66.16	70.94	70.16	96.38
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.11	2.13	2.12	2.12	3.06
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	48.37	39.97	44.80	46.10	65.78
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	27.94	28.19	26.69	26.89	37.77
	Perubahan Inventori	0.30	0.95	0.49	0.49	0.69
	Ekspor Luar Negeri	10.06	10.54	10.15	10.17	13.57
	Dikurangi Impor Luar Negeri	14.91	14.77	15.33	15.21	20.27
	Net Ekspor Antar Daerah	(43.96)	(33.17)	(39.86)	(40.73)	(57.77)
	PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Pertumbuhan (yoy)	Komponen	2014		2015**		
		IV	Total	I	II*	III**
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.92	7.81	16.68	12.15	4.82
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3.90	5.33	(5.62)	3.47	8.62
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	28.62	6.11	35.32	22.84	18.82
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	3.49	11.47	(7.64)	0.30	1.07
	Perubahan Inventori	2.93	13.01	(57.64)	(62.61)	(51.52)
	Ekspor Luar Negeri	5.98	(52.70)	23.76	(6.90)	(12.27)
	Dikurangi Impor Luar Negeri	7.82	(0.94)	7.80	7.75	1.89
Net Ekspor Antar Daerah	34.44	(11.64)	48.95	22.41	9.63	
PDRB	4.11	6.70	4.16	5.63	5.27	
Andil (yoy)	Komponen	2014		2015**		
		IV	Total	I	II*	III**
	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5.92	5.16	10.48	7.95	3.32
	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0.09	0.12	(0.14)	0.08	0.19
	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11.18	2.55	12.23	9.13	7.93
	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)	1.15	3.62	(2.61)	0.10	0.35
	Perubahan Inventori	0.01	0.12	(0.72)	(0.90)	(0.57)
	Ekspor Luar Negeri	0.53	(11.10)	1.82	(0.72)	(1.25)
	Dikurangi Impor Luar Negeri	0.77	(0.10)	0.79	0.80	0.19
Net Ekspor Antar Daerah	(13.96)	6.12	(16.11)	(9.20)	(4.51)	
PDRB	4.11	6.70	4.16	5.63	5.27	

Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah,

*Angka sementara BPS

** Angka sangat sementara BPS

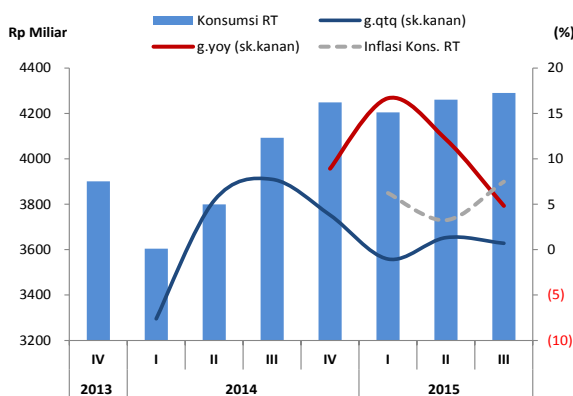
Dari sisi permintaan, perlambatan ekonomi Maluku pada triwulan III-2015 didorong oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, belum optimalnya realisasi belanja pemerintah serta makin dalamnya kontraksi pada kinerja ekspor luar negeri. Konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah dan ekspor luar negeri pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 4.82% (yoy), 18.82% (yoy) dan -12.27% (yoy), melemah

dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12.15% (yoy), 22.84% (yoy) dan -6.90% (yoy). Sementara itu, komponen penarik ke bawah PDRB, yaitu impor luar negeri dan net ekspor antar daerah (net impor) tercatat tumbuh sebesar 1.89% (yoy) dan 9.63% (yoy).

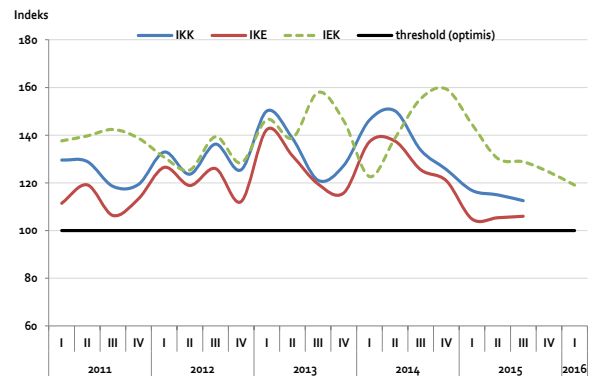
1.2.1. Konsumsi

1.2.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2015 menunjukkan kecenderungan yang melambat. Di tengah perayaan Hari Raya Lebaran, musim liburan sekolah serta *event* khusus seperti: perayaan HUT Provinsi Maluku dan Kota Ambon dan persiapan Pesparawi Nasional dan Maluku Fair 2015, konsumsi rumah tangga justru mencatatkan kinerja yang melambat. Konsumsi rumah tangga pada triwulan laporan tercatat tumbuh sebesar 4.82% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12.15% (yoy). Melambatnya laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga disebabkan antara lain menurunnya kondisi ekonomi dan daya beli konsumen, meningkatnya harga barang-barang konsumsi rumah tangga dan menurunnya tingkat penghasilan konsumen. Sementara itu, adanya kekeringan dan kebakaran hutan yang menimpa lahan pertanian dan perkebunan rakyat menyebabkan menurunnya tingkat pendapatan yang kemudian berdampak pada berkurangnya tingkat konsumsi. Selain itu, masuknya tahun ajaran baru di awal triwulan laporan menyebabkan masyarakat harus mengalokasikan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

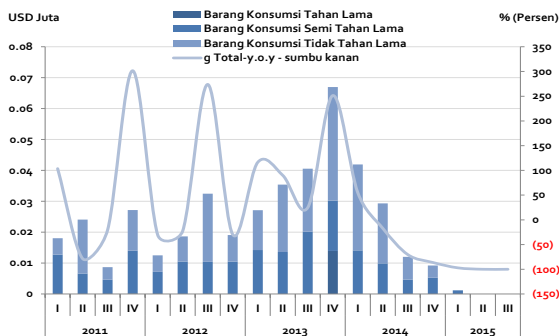


Sumber: BPS Provinsi Maluku;diolah
Grafik 1-7 Konsumsi Rumah Tangga Provinsi Maluku



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia
Grafik 1-8 Indeks Keyakinan Konsumen Provinsi Maluku

Melambatnya laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga sejalan dengan menurunnya optimisme masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi yang tercermin pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di dalam Survei Konsumen. Pada triwulan laporan, optimisme masyarakat untuk melakukan konsumsi turun dari 114.97 pada triwulan II-2015 menjadi 112.53. Menurunnya optimisme masyarakat tersebut bersumber dari menurunnya indeks penghasilan maupun indeks ketersediaan lapangan pekerjaan. Meski menurun, tingkat optimisme konsumen masih cukup tinggi (angka IKK di atas 100). Menurunnya tingkat penghasilan dan ketersediaan lapangan pekerjaan, pada gilirannya, akan menahan keputusan masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi.

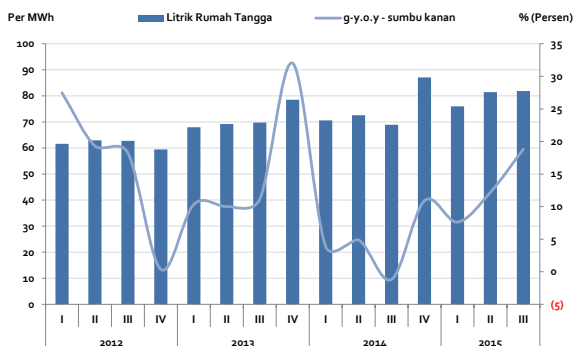


Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-9 Impor Barang Konsumsi di Provinsi Maluku

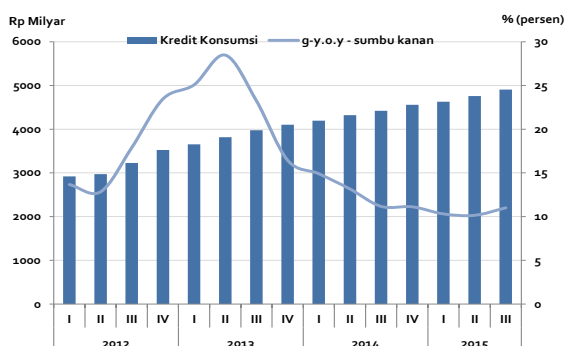


Sumber: BPS Provinsi Maluku
 Grafik 1-10 Indeks Tendensi Konsumen

Lebih lanjut, tren melambat pada laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga ditunjukkan oleh kontraksi pada impor barang konsumsi. Impor barang konsumsi yang terdiri dari barang konsumsi tahan lama, barang konsumsi semi tahan lama dan barang konsumsi tidak tahan lama berdasarkan klasifikasi BEC (*Board Economic Classification*) yang dilakukan oleh Provinsi Maluku pada triwulan laporan masih tercatat nihil sejak triwulan lalu. Tren penguatan nilai mata uang asing (dollar) menyebabkan harga barang impor cenderung mahal.



Sumber: PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara
 Grafik 1-11 Konsumsi Listrik Rumah Tangga di Provinsi Maluku

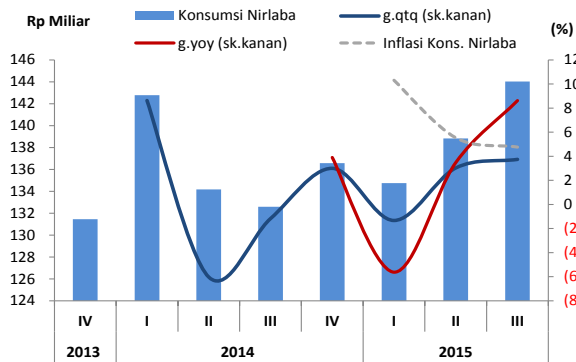


Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-12 Kredit Konsumsi di Bank Umum Provinsi Maluku Menurut Lokasi Proyek

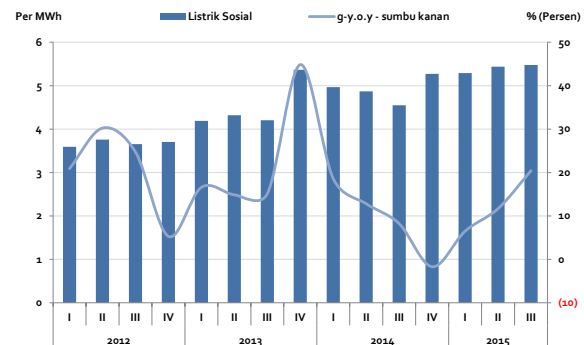
Selanjutnya, adanya berbagai perayaan dalam rangka Lebaran, maupun kegiatan berskala besar lainnya seperti HUT Provinsi Maluku dan Kota Ambon serta persiapan Pesparawi Nasional dan Maluku Fair, mampu mendorong kinerja konsumsi rumah tangga tumbuh positif, terlihat dari meningkatnya konsumsi listrik kelompok rumah tangga dan kredit konsumsi Maluku. Konsumsi listrik rumah tangga Maluku pada triwulan laporan mencapai 81.88 MWh atau tumbuh 18.83% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 12.20% (yoy). Sedangkan, baki debit pembiayaan konsumsi Maluku yang disalurkan oleh bank umum mencapai Rp4.90 triliun atau tumbuh 11.00% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 10.15% (yoy). Meningkatnya kebutuhan barang konsumsi dalam rangka perayaan Hari Raya Lebaran, liburan sekolah maupun *event* khusus lainnya mendorong meningkatnya pertumbuhan kredit konsumsi pada triwulan laporan.

1.2.1.2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT

Pengeluaran konsumsi yang bertujuan tidak mencari keuntungan menunjukkan tren yang meningkat. Pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT) atau nirlaba pada triwulan laporan tumbuh sebesar 8.62% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 3.47% (yoy). Peningkatan pertumbuhan konsumsi LNPRT didorong oleh tingginya kegiatan sosial yang dilakukan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan, seperti: Hari Raya Idul Fitri 1436 H, Hari Raya Idul Adha dan Tahun Baru Hijriah 1437 H, serta adanya penyelenggaraan kegiatan berskala besar, seperti HUT Provinsi Maluku, HUT Kota Ambon dan persiapan Pesparawi Nasional dan Maluku Fair 2015.



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-13 Konsumsi LNPRT Provinsi Maluku



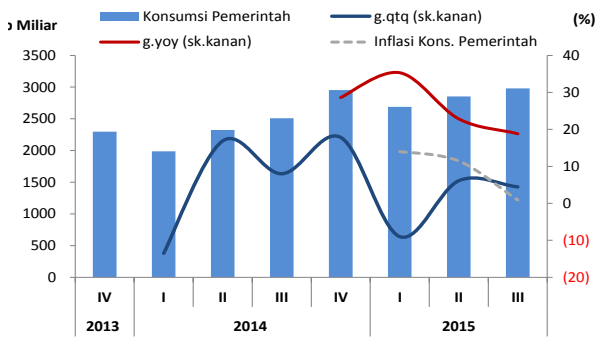
Sumber: PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara
Grafik 1-14 Konsumsi Listrik Sosial di Provinsi Maluku

Meningkatnya pertumbuhan konsumsi nirlaba, selanjutnya, dikonfirmasi dengan meningkatnya pertumbuhan konsumsi listrik untuk kelompok sosial. Konsumsi listrik sosial di Maluku pada triwulan laporan mencapai 5.47 MWh atau tumbuh 20.42% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11.67% (yoy).

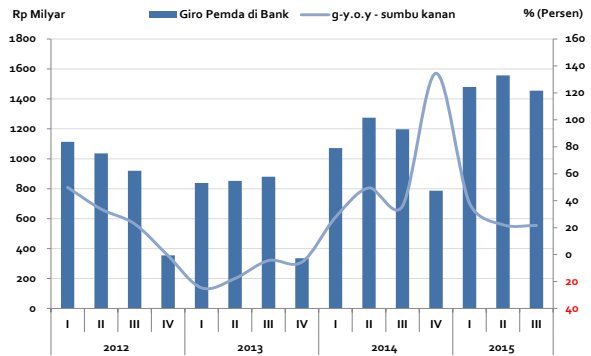
1.2.1.3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Meskipun melambat, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah masih tergolong tinggi dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku. Pertumbuhan konsumsi pemerintah pada triwulan laporan tercatat sebesar 18.82% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 22.84% (yoy). Melambatnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah disebabkan belum optimalnya penyerapan belanja pemerintah seiring dengan keterlambatan pengiriman petunjuk teknis penggunaan anggaran dari pemerintah pusat serta meningkatnya prinsip kehati-hatian dari pengguna anggaran. Realisasi belanja yang belum optimal terlihat dari penyerapan belanja baik dari APBN maupun APBD yang baru mencapai 44.4% dan 63.51% hingga triwulan laporan. Meskipun melambat, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah masih tergolong tinggi, bahkan mencapai pertumbuhan dua digit (*double-digit*).

Lebih lanjut, di tengah melambatnya laju pertumbuhan konsumsi pemerintah, pertumbuhan giro Pemerintah Daerah yang di simpan di bank tercatat melambat. Pada triwulan III-2015, giro Pemda mencapai Rp1.455,15 miliar atau tumbuh 21.59% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 22.16% (yoy). Melambatnya laju pertumbuhan giro Pemda mencerminkan bahwa Pemda telah menarik giro di bank untuk mendanai program-program kerjanya.



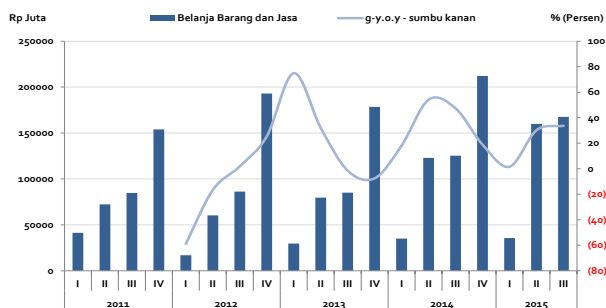
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-15 Konsumsi Pemerintah (Riil) Provinsi Maluku



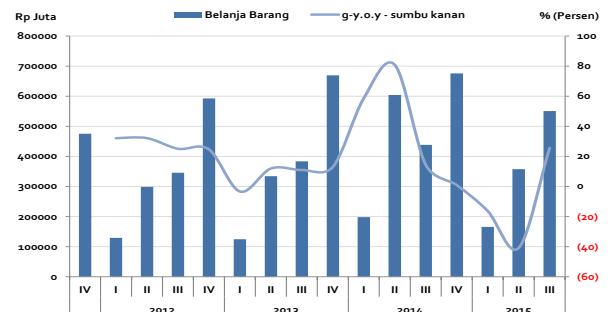
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-16 Giro Pemerintah Daerah

Lebih lanjut, pertumbuhan tinggi pada konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan belanja, baik pada APBD maupun APBN. Realisasi belanja Pemda yang berasal dari APBD, baik dalam bentuk belanja langsung (tidak termasuk belanja modal) maupun tidak langsung, mencapai Rp505.68 miliar atau tumbuh 23.77% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 18.53% (yoy). Selain itu, penyerapan belanja barang dan jasa yang berasal dari APBD Provinsi Maluku mencapai Rp167.53 miliar atau tumbuh 33.70% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 30.20% (yoy).

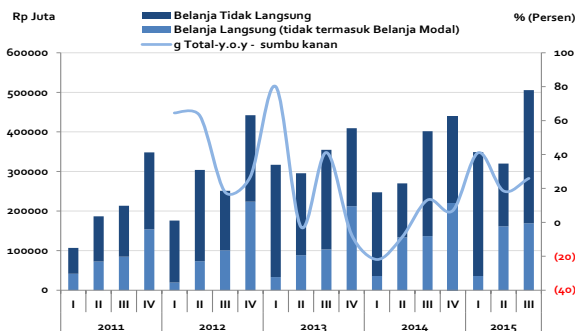
Sejalan dengan kinerja APBD, realisasi belanja pemda yang berasal dari APBN (tidak termasuk belanja modal) juga tercatat meningkat. Belanja APBN (kecuali belanja modal) Provinsi Maluku mencapai Rp1.27 triliun atau tumbuh 13.89% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7.32% (yoy). Sementara itu, belanja barang dari APBN Provinsi Maluku mencapai Rp550 miliar atau tumbuh 25.64% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 40.86% (yoy).



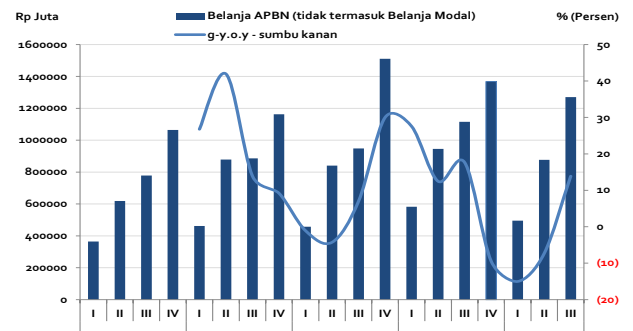
Sumber: BPPKAD Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-17 Belanja Barang dan Jasa dalam APBD Provinsi Maluku



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-18 Belanja Barang dalam APBN Provinsi Maluku

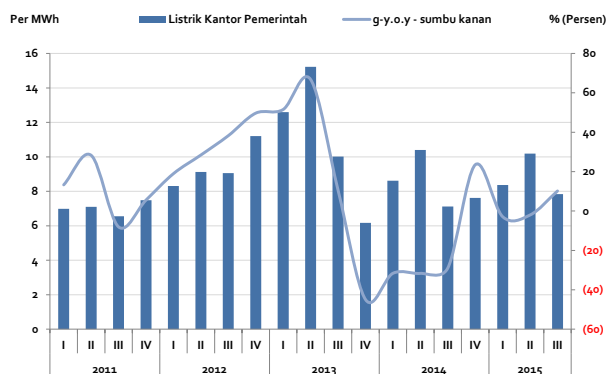


Sumber: BPPKAD Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-19 Belanja APBD (tidak termasuk Belanja Modal) Provinsi Maluku



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Maluku; diolah
Grafik 1-20 Belanja APBN (tidak termasuk Belanja Modal) Provinsi Maluku

Selanjutnya, meningkatnya konsumsi listrik untuk kantor pemerintahan mengonfirmasi lebih lanjut pada pertumbuhan konsumsi pemerintah yang tergolong tinggi pada triwulan laporan. Pada triwulan laporan, konsumsi listrik gedung pemerintahan mencapai 7.84 MWh atau tumbuh 10.18% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 2.01% (yoy).

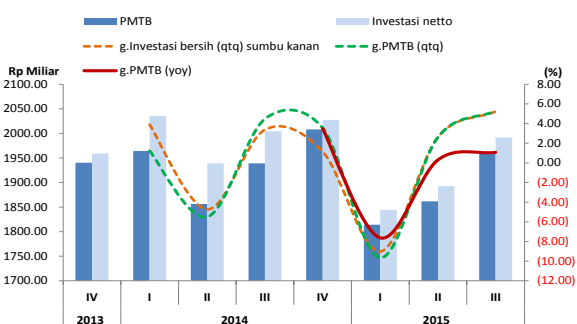


Sumber: PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara
Grafik 1-21 Konsumsi Listrik Gedung Pemerintahan di Provinsi Maluku

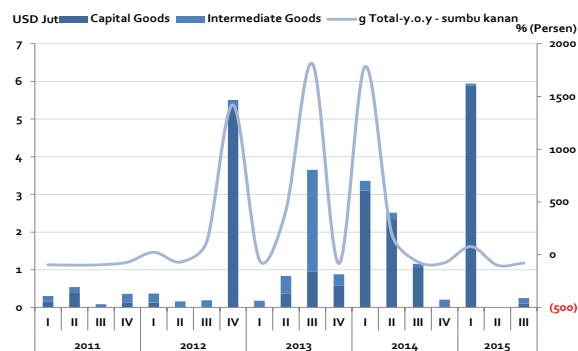
1.2.2. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB)

Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Domestik Domestik Bruto (PMTDB) Maluku mencatatkan pertumbuhan dengan laju yang meningkat. PMTDB Maluku pada triwulan laporan tumbuh 1.07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0.30% (yoy). Sejalan dengan pertumbuhan PMTDB, pertumbuhan investasi netto⁴⁾ (bersih) Maluku pada triwulan laporan juga tercatat meningkat, yaitu dari -2.40% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi -0.64% (yoy) pada triwulan laporan. Meningkatnya kinerja investasi netto Maluku seiring dengan meningkatnya pertumbuhan impor barang modal Maluku dalam rangka realisasi proyek pembangunan menyambut Pesarparwi Nasional 2015 serta proyek infrastruktur lainnya yang sebagian besar sudah selesai tahap lelang.

Impor barang modal Maluku pada triwulan laporan mencapai USD0.24 juta atau berkontraksi 78.66% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat nihil untuk impor barang modal. Meningkatnya impor barang modal Maluku terjadi, baik pada barang modal berwujud *capital goods* maupun *intermediate goods*. Impor barang modal berwujud *capital goods* selama triwulan laporan mencapai USD0.10 juta atau berkontraksi 90.05% (yoy), sedangkan impor barang modal berwujud *intermediate goods* mencapai USD0.14 juta atau tumbuh 57.11% (yoy).



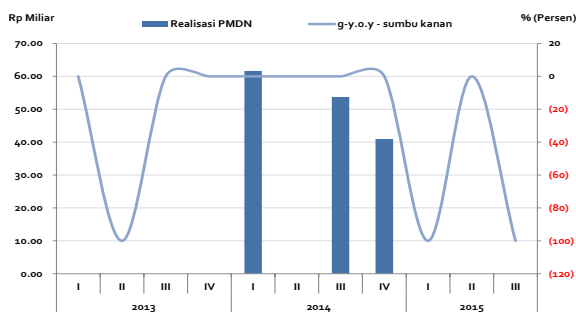
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-22 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Provinsi Maluku



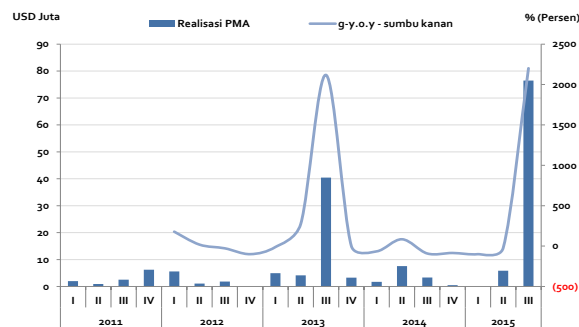
*Barang Modal kecuali perlengkapan transportasi
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-23 Impor Barang Modal Provinsi Maluku*

4) Investasi netto adalah nilai investasi (PMTDB) ditambah dengan persediaan (stok)

Dilihat dari sumber dananya, meningkatnya kinerja investasi terutama berasal dari meningkatnya investasi asing yang masuk ke Provinsi Maluku. Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) langsung di Maluku pada triwulan laporan mencapai USD76.48 juta atau tumbuh mencapai 2201.11% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 22.61% (yoy). Berbagai program yang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon bertajuk “Mangente Ambon 2015” untuk menarik wisatawan maupun investor menjadi salah satu penyebab tingginya investasi asing di Maluku. Di sisi lain, investasi dari sektor swasta atau dalam negeri yang tercermin dari nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) masih tercatat nihil sejak awal tahun 2015.



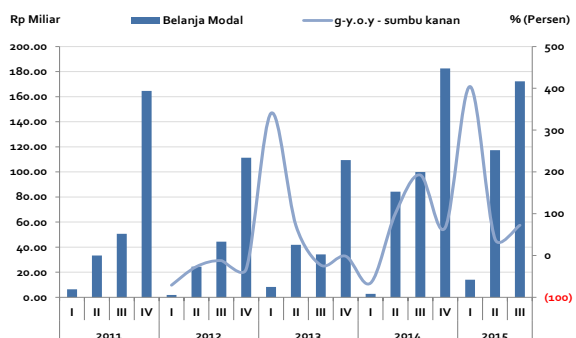
Sumber: BKPM; diolah
Grafik 1-24 Penanaman Modal Dalam Negeri di Provinsi Maluku



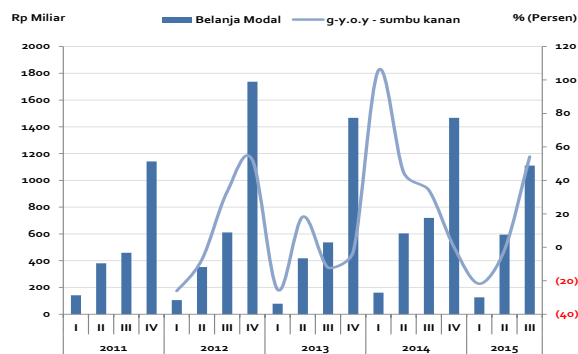
Sumber: BKPM; diolah
Grafik 1-25 Penanaman Modal Asing di Provinsi Maluku

Lebih lanjut, meningkatnya investasi Maluku juga didorong oleh meningkatnya realisasi belanja modal, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. Nilai belanja modal yang bersumber dari APBN lebih besar daripada nilai belanja modal yang bersumber dari APBD sehingga belanja modal APBN lebih besar pengaruhnya terhadap kinerja investasi pada perekonomian Maluku. Nilai belanja modal APBN pada triwulan laporan mencapai Rp1.11 triliun atau tumbuh 54.20% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 1.53% (yoy).

Sementara itu, belanja modal yang bersumber dari APBD selama periode laporan mencapai Rp172.17 miliar atau tumbuh 72.38% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 39.44% (yoy). Meningkatnya realisasi belanja modal, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN sehubungan dengan realisasi yang optimal pada pelaksanaan program-program kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta keberlanjutan pembangunan proyek *multi-years* Pemerintah, seperti Jembatan Merah Putih, infrastruktur jalan dan jembatan pendukung Trans Maluku. Cuaca yang kondusif selama triwulan laporan mampu mendorong kinerja optimal pengerjaan proyek-proyek pemerintah.

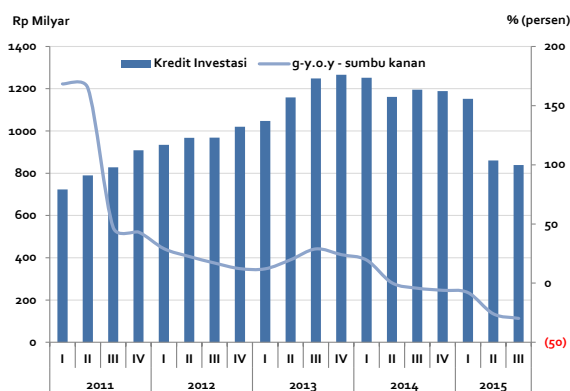


Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-26 Belanja Modal dalam APBD Provinsi Maluku

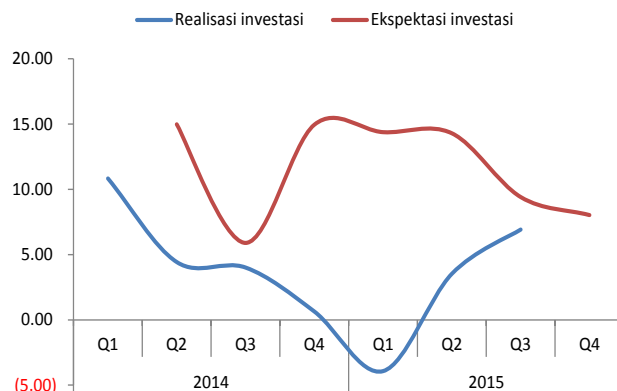


Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Prov. Maluku; diolah
Grafik 1-27 Belanja Modal dalam APBN Provinsi Maluku

Investasi asing, impor barang modal dan belanja modal pemerintah seluruhnya dalam tren yang meningkat menunjukkan bahwa kinerja investasi pada dunia usaha Maluku mulai menunjukkan kecenderungan meningkat. Hal ini dikonfirmasi dengan meningkatnya persediaan inventori pada triwulan III-2015 sebesar Rp31.68 miliar atau terkontraksi 51.52% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 62.61% (yoy). Pergerakan yang meningkat dari persediaan inventori memperlihatkan keputusan dunia usaha untuk mulai melakukan pengadaan baru barang modal sebagai cerminan dari pelaku usaha melihat optimisme ke depan. Berdasarkan hasil Survei Liaison KPw BI Provinsi Maluku, momen hari Raya Idul Fitri dan penyelenggaraan Pesparawi Nasional disambut baik oleh para pelaku usaha untuk kembali melaksanakan kegiatan investasi. Hal ini juga tercermin dari meningkatnya indeks realisasi investasi dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang juga dilakukan oleh KPw BI Provinsi Maluku, dimana pada triwulan laporan indeks realisasi investasi tercatat sebesar 6.92%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3.53%.



Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-28 Kredit Investasi di Provinsi Maluku Menurut Lokasi Proyek



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha - Bank Indonesia
 Grafik 1-29 Kegiatan Investasi di Provinsi Maluku

Di sisi lain, kinerja investasi yang meningkat tidak serta merta diikuti oleh peningkatan kredit investasi perbankan. Baki debit pembiayaan investasi yang disalurkan oleh bank umum nasional kepada proyek berlokasi di Maluku mencapai Rp839.23 miliar atau terkontraksi 29.79% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 25.94% (yoy). Hal ini diindikasikan bahwa peningkatan kinerja investasi di triwulan laporan lebih didorong oleh pembiayaan non perbankan, yaitu berupa Penanaman Modal Asing (PMA) maupun anggaran belanja dari APBD dan APBN.

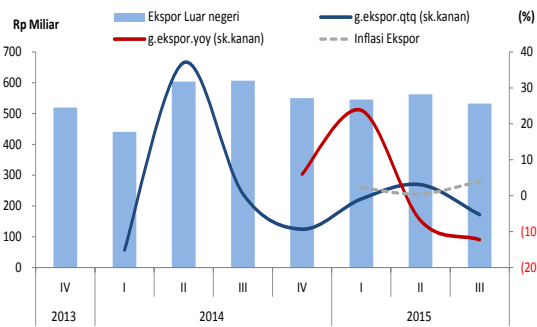
1.2.3. Ekspor dan Impor

1.2.3.1. Ekspor dan Impor Luar Negeri

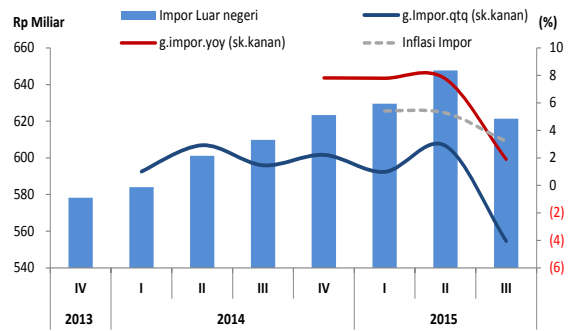
Komponen perdagangan eksternal Maluku mencatatkan pertumbuhan yang melambat, baik pada sisi ekspor maupun impor. Nilai tambah ekspor (riil) Maluku pada triwulan laporan terkontraksi 12.27% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 6.90% (yoy). Sementara itu, impor (riil) Maluku pada triwulan laporan tumbuh 1.89% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7.75% (yoy).

Penurunan kinerja ekspor LN pada triwulan laporan disebabkan pemulihan ekonomi global yang melambat, terutama pada perekonomian mitra dagang Provinsi Maluku (AS, Tiongkok, Hongkong, Jepang, Belanda). Masih lemahnya perekonomian tersebut berpengaruh pada penurunan permintaan asing terhadap produk Provinsi Maluku. Terlebih lagi, harga komoditas ekspor internasional yang masih terus menurun menambah pelemahan

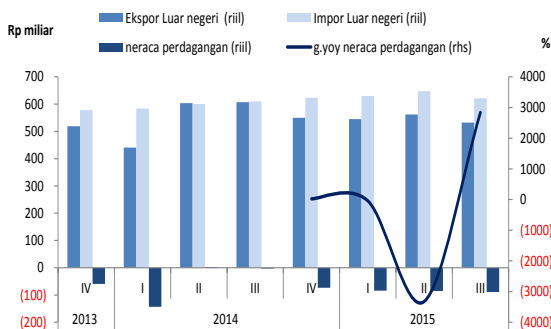
dari sisi nilai ekspor Maluku. Di sisi lain, pelemahan kinerja impor luar negeri disebabkan tekanan nilai rupiah terhadap USD yang terdepresiasi, yang menyebabkan harga barang impor relatif mahal sehingga pelaku usaha cenderung mengurangi permintaan terhadap barang impor.



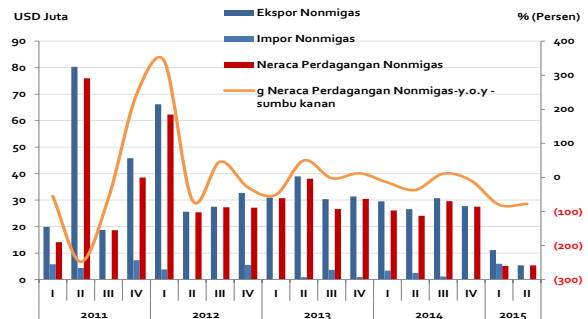
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-30 Ekspor (Riil) Provinsi Maluku



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-31 Impor (Riil) Provinsi Maluku



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-32 Neraca Perdagangan (riil) Provinsi Maluku

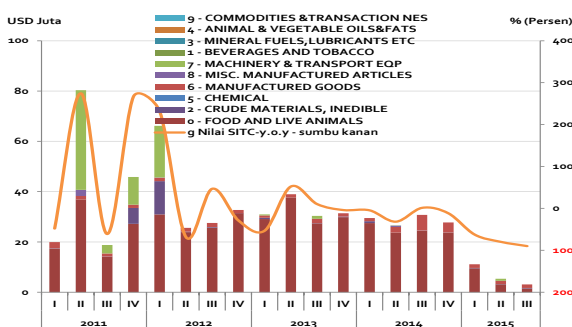


Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-33 Neraca Perdagangan Non-Migas Provinsi Maluku

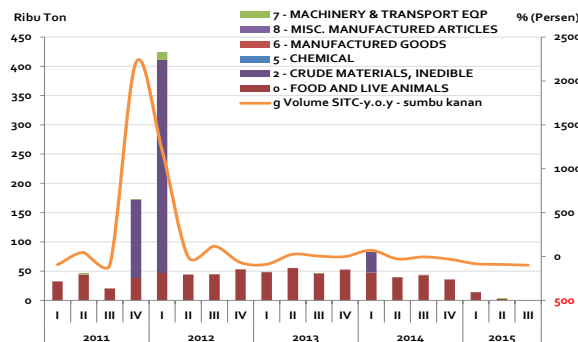
Penurunan ekspor luar negeri yang lebih dalam dibandingkan penurunan impor mendorong meningkatnya laju pertumbuhan defisit neraca perdagangan luar negeri Maluku. Defisit neraca perdagangan luar negeri Maluku pada triwulan tercatat tumbuh 2839.80% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya dimana defisit perdagangannya terkontraksi 3323.44% (yoy). Meningkatnya laju deflator atau inflasi implisit pada ekspor di tengah menurunnya inflasi implisit pada impor luar negeri mendorong kinerja ekspor turun lebih dalam dibandingkan kinerja impor. Inflasi implisit pada ekspor luar negeri sebesar 3.99% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0.46% (yoy). Sedangkan, inflasi implisit pada impor luar negeri mencapai 3.19% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5.27% (yoy).

Meskipun secara total perdagangan Maluku mengalami defisit, neraca perdagangan non migas Maluku mengalami surplus dalam tren yang menurun. Neraca perdagangan nonmigas Maluku pada triwulan laporan mencatatkan surplus sebesar USD2.83 juta atau terkontraksi 90.40% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencatatkan surplus USD5.36 juta atau terkontraksi 77.69% (yoy). Surplus yang menurun pada neraca perdagangan nonmigas seiring dengan menurunnya pertumbuhan ekspor nonmigas Maluku yang terjadi di tengah kenaikan impor nonmigas. Nilai ekspor nonmigas Maluku pada triwulan laporan mencapai USD3.08 juta atau terkontraksi 89.96% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 79.82% (yoy). Di sisi lain, impor non migas Maluku pada triwulan laporan

mencapai USD0.24 juta atau berkontraksi 78.88% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat nihil. Kondisi tersebut semakin menegaskan tren penurunan permintaan eksternal terhadap komoditas unggulan Maluku di tengah penurunan harga komoditas ekspor di pasar global.

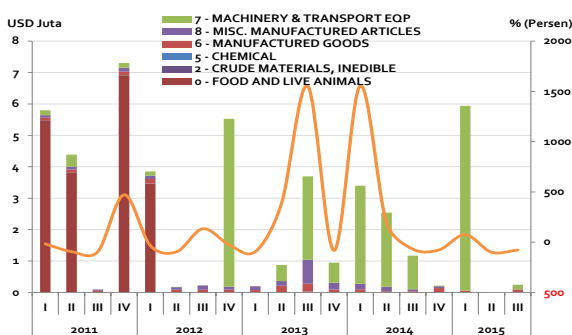


Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-34 Nilai Ekspor Non-Migas Provinsi Maluku

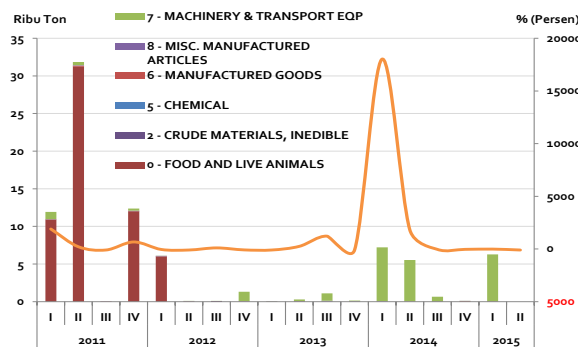


Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-35 Volume Ekspor Non-Migas Provinsi Maluku

Menurut struktur SITC 1-digit, ekspor nonmigas Maluku pada triwulan laporan masih didominasi oleh kelompok Makanan dan Hewani (SITC-0) dengan mencatatkan kinerja yang melambat. Ekspor nonmigas Maluku pada triwulan laporan terdiri dari kelompok Makanan dan Hewani (SITC-0) dengan pangsa 48.60% dari total nilai ekspor nonmigas Maluku, Barang Olahan (SITC-6) dengan pangsa 45.25% dan Bahan Mentah (SITC-2) dengan pangsa 6.13%. Pertumbuhan yang melambat dialami oleh kelompok Makanan dan Hewani (SITC-0) serta Barang Olahan (SITC-6) yang masing-masing mengalami kontraksi 93.86% (yoy) dan 77.47% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang juga mengalami kontraksi 86.81% (yoy) dan 42.90% (yoy). Selain disebabkan oleh menurunnya permintaan global, perlambatan pada ekspor Makanan dan Hewani maupun Barang Olahan seiring dengan berkurangnya pasokan kelompok ikan segar maupun ikan olahan sebagai implikasi dari kebijakan peraturan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berdampak pada ditutupnya beberapa perusahaan perikanan di Maluku.



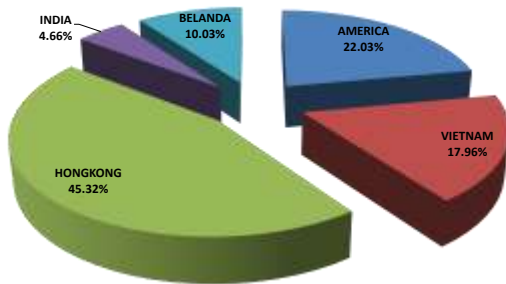
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-36 Nilai Impor Non-Migas Provinsi Maluku



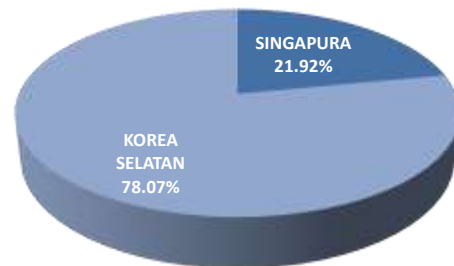
Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-37 Volume Impor Non-Migas Provinsi Maluku

Pada periode triwulan III-2015, impor nonmigas Maluku mencatatkan perkembangan yang meningkat, setelah pada triwulan II-2015 impor nonmigas Maluku tercatat nihil. Menurut struktur SITC 1-digit, impor nonmigas Maluku pada triwulan laporan masih didominasi oleh kelompok Mesin dan Alat Angkutan (SITC-7) dengan pangsa 62.14% dari total impor nonmigas, diikuti oleh Barang Olahan (SITC-6) dengan pangsa 37.64% dan Bahan Kimia (SITC-5) dengan pangsa 0.21%, dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -85.63% (yoy), 148.37% (yoy) dan -47.85% (yoy). Seluruh kelompok impor mengalami pertumbuhan yang meningkat setelah pada triwulan sebelumnya impor nonmigas Maluku tercatat nihil.

Meningkatnya pertumbuhan impor nonmigas Maluku terutama berasal dari kenaikan pertumbuhan impor barang modal Maluku sejalan dengan menguatnya ekspektasi investasi oleh pelaku usaha pada periode kedepan.

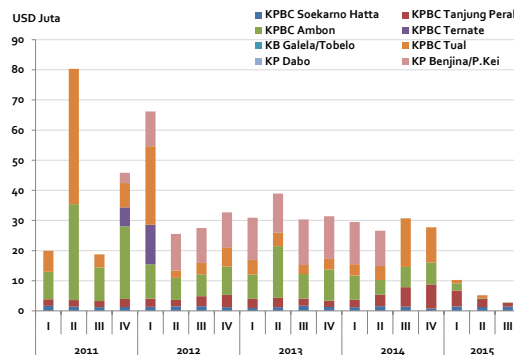


Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-38 Nilai Ekspor Non-Migas Provinsi Maluku Triwulan III 2015 Menurut Negara Tujuan



Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-39 Nilai Impor Non-Migas Provinsi Maluku Triwulan III 2015 Menurut Negara Asal

Menurut negara tujuannya, ekspor nonmigas Maluku sebagian besar dikirim ke Hongkong, Amerika dan Vietnam. Ekspor Maluku ke Hongkong mencapai USD139 juta atau terkontraksi 20.14% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 1.24% (yoy). Sementara itu, ekspor Maluku ke Amerika USD0.67 juta atau tumbuh 119.80% (yoy), meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 22.57% (yoy). Sedangkan, ekspor Maluku ke Vietnam sebesar USD0.55 juta atau terkontraksi 67.41% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 46.73% (yoy). Demikian halnya dengan ekspor ke India maupun Belanda yang juga mengalami kontraksi pada triwulan III-2015. Di sisi lain, impor nonmigas Maluku berasal dari Korea Selatan dan Singapore. Impor nonmigas Maluku dari Korea Selatan mencapai USD0.19 juta, diikuti oleh impor dari Singapore mencapai USD0.05 juta.



Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-40 Ekspor Non-Migas Provinsi Maluku Menurut Pelabuhan/ Bandara Muat

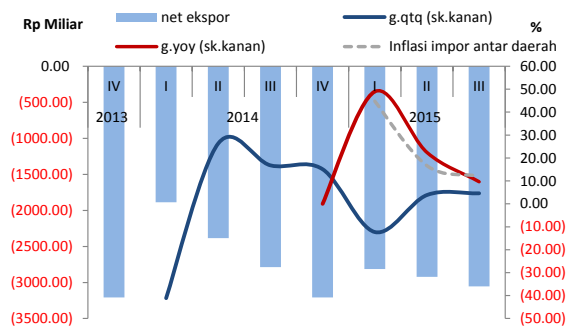
Menurut pelabuhan ekspornya, ekspor nonmigas Maluku pada triwulan laporan sebagian besar melalui Bandara Soekarno Hatta, Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ambon. Ekspor non-migas Maluku yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta mencapai USD1,39 juta atau dengan pangsa sebesar 50,37%, diikuti oleh Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ambon masing-masing mencapai USD1.20 juta dan USD0.17 juta atau berturut-turut dengan pangsa sebesar 43.39% dan 6.22%. Ekspor Maluku yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno Hatta mengalami pertumbuhan meningkat, yaitu dari -18.08% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi -0.50% (yoy) pada triwulan laporan. Sedangkan, pertumbuhan ekspor

Maluku melalui Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ambon pada triwulan laporan masing-masing sebesar -81.26% (yoy) dan -97.44% (yoy), turun lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -28.79% (yoy) dan -95.94% (yoy).

1.2.3.2. Net Ekspor Antar Daerah

Salah satu komponen utama penarik ke bawah pembentukan PDRB Provinsi Maluku adalah kinerja perdagangan internal atau antar daerah yang mencatatkan kondisi defisit atau net impor dengan pertumbuhan yang melambat. Sejalan dengan komponen perdagangan eksternal, perdagangan internal Maluku masih mencatatkan kondisi net impor antar daerah (impor lebih besar daripada ekspor) dengan andil cukup tinggi yaitu mencapai -4.51% (yoy) pada triwulan laporan dan merupakan komponen utama penarik ke bawah pembentukan PDRB Provinsi Maluku. Hal ini disebabkan hampir seluruh bahan pangan Maluku disuplai dari luar daerah sehingga menyebabkan ketergantungan Maluku terhadap luar daerah cukup tinggi.

Sementara itu, pertumbuhan net impor antar daerah pada triwulan laporan sebesar 9.63% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 22.41% (yoy). Meskipun terdapat beberapa *event* berskala besar, seperti perayaan Lebaran dan Hari Raya Idul Adha, HUT Provinsi Maluku dan Kota Ambon, serta persiapan Pesparawi Nasional dan Maluku Fair 2015, laju perdagangan atau net impor antar daerah melambat. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan domestik maupun daya beli masyarakat masih rendah sehingga mengurangi permintaan barang dari luar daerah. Kondisi ini terkonfirmasi pada menurunnya laju pertumbuhan aktivitas perdagangan melalui Bandara Pattimura. Arus barang (kargo) yang melalui Bandara Pattimura Ambon pada triwulan laporan mencapai 1444.36 ton atau terkontraksi 54.58% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 53.80% (yoy).



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-41 PDRB Net Ekspor Antar Daerah Provinsi Maluku

1.3. Perkembangan PDRB Sisi Penawaran

Pada sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi Maluku pada triwulan III-2015 disebabkan melambatnya kategori utama Maluku, yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan yang mengalami kontraksi 0.40% (yoy) dan perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor yang tercatat tumbuh 7.66% (yoy). Sedangkan, pertumbuhan tinggi pada triwulan laporan dicapai oleh kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa keuangan; dan jasa pendidikan yang tumbuh masing-masing sebesar 11.53% (yoy), 9.18% (yoy) dan 9.16% (yoy).

Tabel 1-2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Sisi Penawaran Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010

	Komponen	2014		2015*			
		IV	Total	I	II*	III**	
Pertumbuhan (yoy)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.77	6.45	2.46	2.05	(0.40)	
	Pertambangan dan Penggalian	20.92	10.29	12.91	(4.92)	(8.85)	
	Industri Pengolahan	4.04	8.42	3.41	4.30	2.11	
	Pengadaan Listrik, Gas	44.05	31.11	51.98	(20.37)	(23.29)	
	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang	5.40	5.84	(2.15)	1.30	(0.63)	
	Konstruksi	3.18	7.31	2.36	3.16	6.45	
	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.67	5.89	3.69	9.07	7.66	
	Transportasi dan Pergudangan	7.19	8.77	3.70	7.71	6.05	
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.80	4.68	3.63	7.36	4.09	
	Informasi dan Komunikasi	5.53	7.62	7.72	10.82	9.08	
	Jasa Keuangan	16.57	7.61	15.64	1.97	9.18	
	Real Estate	3.24	7.10	3.62	3.60	2.40	
	Jasa Perusahaan	4.39	4.83	4.86	4.48	2.75	
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0.79	5.35	3.46	10.22	11.53	
	Jasa Pendidikan	7.27	9.52	6.06	6.56	9.16	
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.76	2.63	1.49	5.55	5.71	
	Jasa lainnya	0.89	5.50	0.96	4.18	6.86	
	PDRB		4.11	6.70	4.16	5.63	5.27
	Andil (yoy)	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.69	1.60	0.62	0.51	(0.10)
Pertambangan dan Penggalian		0.62	0.37	0.39	(0.17)	(0.32)	
Industri Pengolahan		0.22	0.45	0.19	0.23	0.12	
Pengadaan Listrik, Gas		0.04	0.03	0.05	(0.02)	(0.02)	
Pengadaan Air, Pengolahan Sampah dan Daur Ulang		0.03	0.03	(0.01)	0.01	(0.00)	
Konstruksi		0.22	0.50	0.16	0.22	0.44	
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		0.39	0.82	0.53	1.26	1.08	
Transportasi dan Pergudangan		0.39	0.47	0.20	0.42	0.33	
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum		0.05	0.09	0.07	0.13	0.07	
Informasi dan Komunikasi		0.21	0.29	0.30	0.41	0.34	
Jasa Keuangan		0.58	0.28	0.57	0.07	0.33	
Real Estate		0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	
Jasa Perusahaan		0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib		0.16	1.04	0.66	1.94	2.22	
Jasa Pendidikan		0.38	0.50	0.33	0.36	0.49	
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		0.06	0.06	0.03	0.12	0.13	
Jasa lainnya		0.02	0.10	0.02	0.07	0.12	
PDRB			4.11	6.70	4.16	5.63	5.27

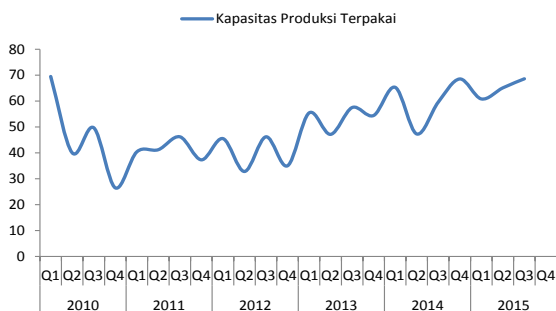
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah

*Angka sementara BPS

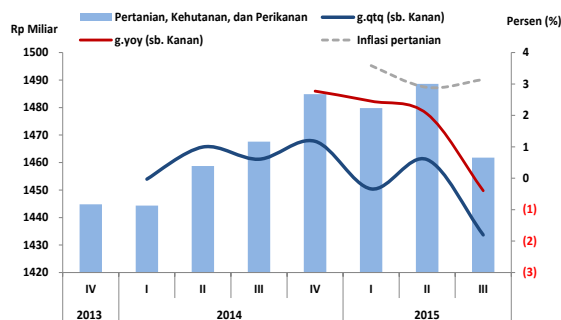
**Angka sangat sementara BPS

1.3.1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kategori Pertanian, kehutanan dan perikanan Maluku tercatat mengalami kontraksi pada triwulan III-2015. Besaran kontraksi triwulan laporan mencapai 0.40% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 2.05% (yoy). Secara umum, menurunnya pertumbuhan kategori pertanian ditengarai akibat kekeringan yang melanda lahan pertanian di wilayah Seram bagian utara (termasuk wilayah Kab. Seram Bagian Timur) serta sebagian Kab. Maluku Tengah. Selain itu, adanya musibah kebakaran yang melanda beberapa wilayah perkebunan rakyat, seperti coklat dan cengkih diduga turut menurunkan produksi pertanian Maluku.

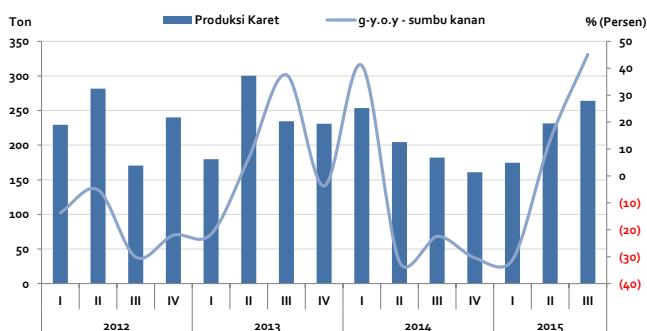


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha - Bank Indonesia
Grafik 1-42 Kapasitas Produksi Sektor Pertanian Provinsi Maluku*

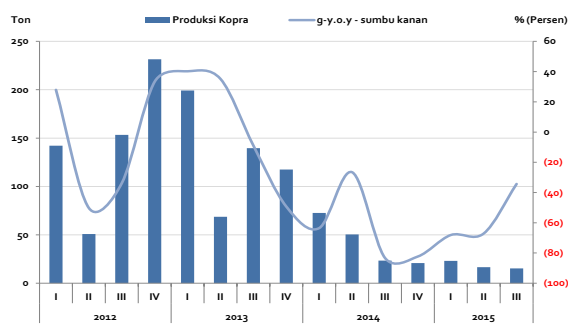


Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-43PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Kontraksi lebih dalam tertahan oleh masuknya puncak masa panen tanaman perkebunan di Maluku. Kinerja subkategori perkebunan terindikasi meningkat seiring dengan masuknya masa panen tanaman perkebunan di Maluku Tengah. Hal ini terlihat dari meningkatnya produksi karet PTPN XIV Awaya di Amahai, Maluku Tengah, yang mencapai 263.98 ton atau tumbuh 45.12% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 13.25% (yoy). Sementara itu, produksi komoditas kopra PTPN XIV Awaya di Amahai, Maluku Tengah, mencapai 15,33 ton atau terkontraksi 34.34% (y.o.y), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 67.12% (y.o.y). Membaiknya produksi karet di Amahai seiring dengan faktor cuaca panas dan mendukung untuk penyadapan getah karet sehingga penyadapan dapat dilakukan secara optimal. Meningkatnya kinerja subkategori perkebunan Maluku sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), dimana kapasitas produksi terpakai kategori pertanian tercatat meningkat, yaitu dari -13.69% di triwulan II-2015 menjadi 6.72% pada triwulan laporan. Selain itu, meningkatnya pemakaian kapasitas produksi pertanian pada triwulan III-2015 juga didorong oleh meningkatnya kinerja perikanan tangkap seiring dengan faktor cuaca yang kondusif untuk melaut.



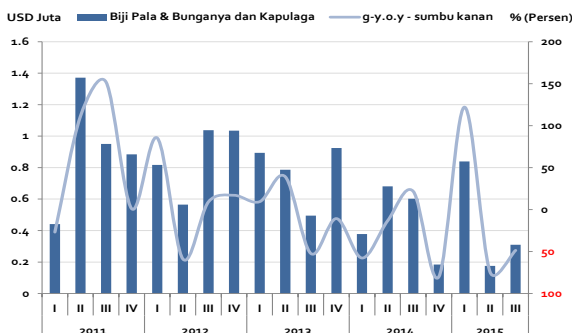
Sumber: PTPN XIV Amahai, Maluku Tengah; diolah
Grafik 1-44Produksi Karet di PTPN Amahai, Maluku Tengah



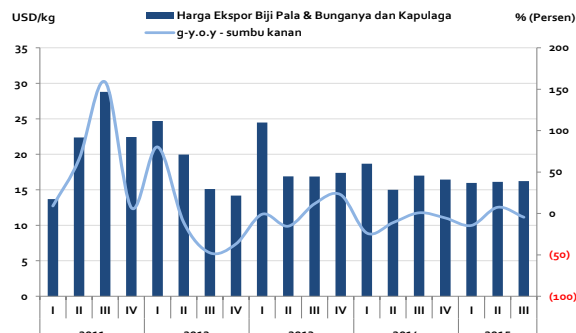
Sumber: PTPN XIV Amahai, Maluku Tengah; diolah
Grafik 1-45Produksi Kopra di PTPN XIV Amahai, Maluku Tengah

Lebih lanjut, cuaca yang kondusif untuk aktivitas perkebunan mampu mendorong kinerja ekspor hasil bumi Maluku yaitu biji pala & bunganya dan kapulaga di tengah menurunnya harga komoditas ekspor, seiring dengan permintaan negara tujuan ekspor yang masih cukup kuat. Ekspor biji pala & bunganya dan kapulaga pada triwulan laporan mencapai USD0.30 juta atau terkontraksi 48.58% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 74.22% (yoy). Di sisi lain, laju harga ekspor komoditas biji pala pada triwulan laporan sebesar USD16.22 per kg atau terkontraksi 4.57% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya dimana harga ekspor komoditas biji pala tumbuh 7.41% (yoy). Di tengah

melambatnya ekonomi global yang terlihat dari menurunnya harga ekspor komoditas, ekspor komoditas unggulan Maluku yaitu biji pala & bunganya dan kapulaga masih menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan masih cukup kuat permintaan dari negara tujuan ekspor biji pala Maluku yaitu Belanda.

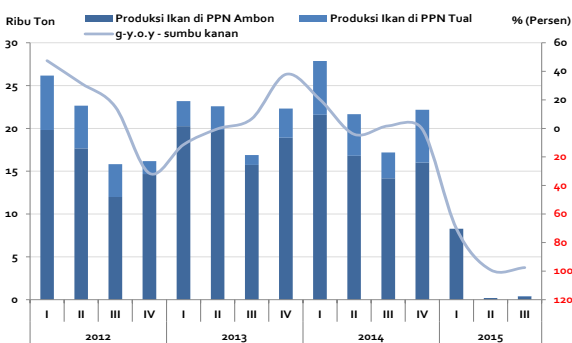


Sumber: Cognos, Bank Indonesia
Grafik 1-46 Nilai Ekspor Biji Pala & Bunganya dan Kapulaga Provinsi Maluku

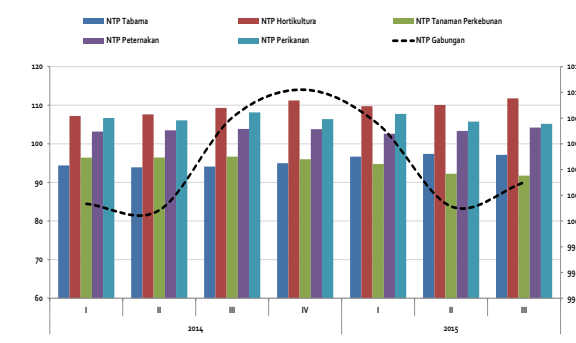


Grafik 1-47 Harga Rata-Rata Ekspor Biji pala & Bunganya dan Kapulaga Provinsi Maluku

Sementara itu, subkategori perikanan mencatatkan kinerja yang meningkat pada triwulan laporan seiring dengan cuaca yang kondusif dan gelombang laut yang mendukung untuk aktivitas perikanan tangkap. Selama periode triwulan III-2015, kinerja subkategori perikanan Maluku mulai menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya produksi ikan tangkap, baik di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon maupun PPN Tual. Produksi ikan di PPN Ambon pada triwulan laporan mencapai 363.15 ton, terkontraksi 97.43% (yoy) atau tumbuh 92.23% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 98.87% (yoy) atau 97.71% (qtq). Sementara itu, produksi ikan tangkap di PPN Tual mencapai 57.74 ton atau terkontraksi 98.08% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat nihil. Secara keseluruhan, produksi ikan tangkap di Ambon dan Tual mengalami kontraksi 97.55% (yoy) atau tumbuh 122.80% (qtq), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 99.13% (yoy) atau 97.71% (qtq).



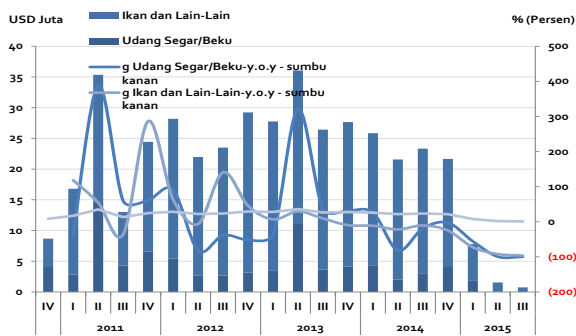
Sumber: PPN Ambon dan PPN Tual; diolah
Grafik 1-48 Produksi ikan di PPN Ambon dan PPN Tual



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-49 Nilai Tukar Petani Rata-Rata (SBH 2012=100)*

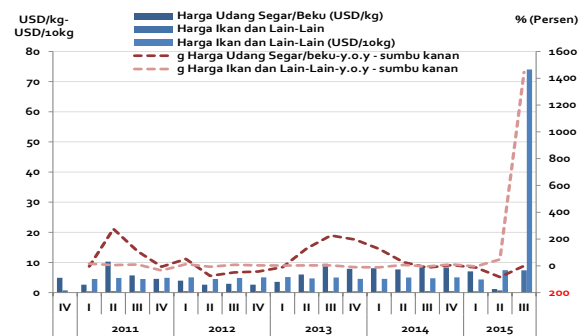
Di tengah meningkatnya pertumbuhan sektor perikanan Maluku dan harga ekspor, ekspor hasil laut Maluku mencatatkan kinerja yang menurun seiring dengan menurunnya pasokan ikan/hasil laut berorientasi ekspor dan tingginya konsumsi ikan di daerah. Ekspor udang segar/beku Maluku pada triwulan laporan tercatat nihil atau terkontraksi 100.00% (yoy), turun lebih dalam dibandingkan triwulan

sebelumnya sebesar USD7.60 ribu atau berkontraksi 99.62% (yoy). Sedangkan, nilai ekspor ikan dan lain-lain mencapai USD0.74 juta atau berkontraksi 96.33% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 92.22% (yoy). Di sisi lain, harga ekspor ikan dan lain-lain tertimbang tercatat sebesar USD7.40 per kilogram atau tumbuh 1445.05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 48.17% (yoy). Kebijakan moratorium dan *transshipment* oleh KKP yang berdampak pada berhentinya kegiatan operasional beberapa perusahaan perikanan eksportir terbesar, menyebabkan pasokan ikan/hasil laut berorientasi ekspor menurun di tengah tingginya harga ekspor hasil laut. Di sisi lain, peningkatan produksi perikanan yang disumbang oleh nelayan tradisional cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal. Hal ini terlihat dari meredanya tekanan inflasi pada kelompok ikan segar, dimana pada triwulan laporan kelompok ikan segar tercatat mengalami inflasi sebesar 15.75% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya 22.96% (yoy).



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 1-50 Ekspor Hasil Laut Provinsi Maluku

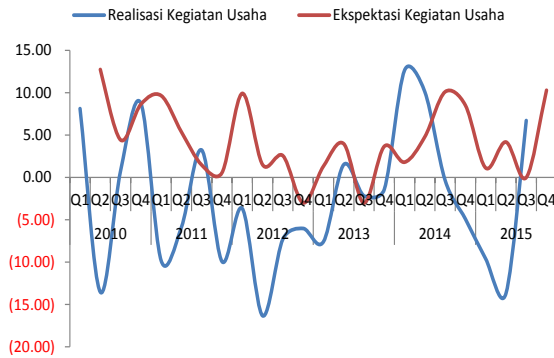


Grafik 1-51 Harga Rata-Rata Ekspor Hasil Laut Maluku*

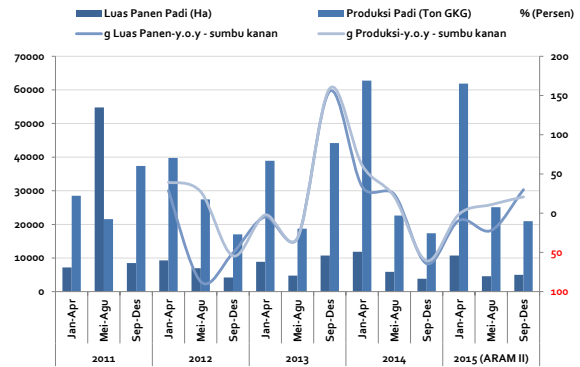
Kinerja subkategori tanaman bahan makanan (tabama) terindikasi menurun dan menjadi penyebab perlambatan pertumbuhan kategori pertanian. Menurunnya kinerja subkategori tabama terutama didorong oleh menurunnya laju pertumbuhan luas panen tanaman padi pada subround kedua (Mei-Agustus) yang tercatat mengalami kontraksi 21.98% (yoy), lebih dalam dibandingkan subround pertama (Januari-April) yang mengalami kontraksi 9.35% (yoy). Selain itu, penurunan kinerja tabama juga berasal dari menurunnya produksi jagung dan kedelai, dimana pertumbuhan produksi jagung dan kedelai pada subround kedua tercatat mengalami kontraksi 0.15% (yoy) dan 84.02% (yoy), lebih dalam dibandingkan subround pertama yang tumbuh 40.54% (yoy) dan 45.00% (yoy). Menurunnya produksi padi, jagung dan kedelai seiring dengan berakhirnya masa panen serta dampak kekeringan dan kesulitan air bersih yang melanda daerah sentra produksi, terutama wilayah Seram bagian utara. Kinerja subkategori yang menurun dikonfirmasi lebih lanjut dengan menurunnya Nilai Tukar Petani (NTP) tanaman pangan, baik pada indeks yang diterima maupun indeks yang dibayar petani. NTP tanaman pangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 97.13, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 97.38.

Meskipun kinerja subkategori tabama menurun pada triwulan laporan, namun secara keseluruhan tahun 2015 diperkirakan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan peningkatan produksi lahan melalui aplikasi teknologi tepat guna, ekstensifikasi perluasan areal tanam, diversifikasi produk penganekaragaman usaha dan peningkatan kualitas produksi. Angka Ramalan II (ARAM) 2015 yang dirilis oleh Dinas Pertanian dan BPS Provinsi Maluku mencatatkan produksi padi pada tahun 2015 sebesar 107.961 ton GKG atau tumbuh 5.06% (yoy). Meningkatnya produksi padi didorong oleh

meningkatnya produktivitas yang mencapai 53.01 kuintal/hektar atau tumbuh 5.06% (yoy). Produksi tanaman jagung maupun kedelai juga diperkirakan meningkat pada tahun 2015. Produksi jagung dan kedelai pada tahun 2015 diperkirakan mencapai 14.108 ton dan 995 ton atau tumbuh 33.50% (yoy) dan 72.15% (yoy). Meningkatnya produksi tabama pada tahun 2015 seiring dengan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan program swasembada dan mandiri pangan.

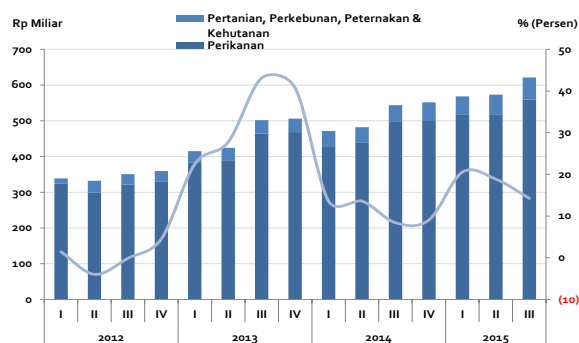


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha – Bank Indonesia
 Grafik 1-52Kegiatan Usaha Sektor Pertanian*



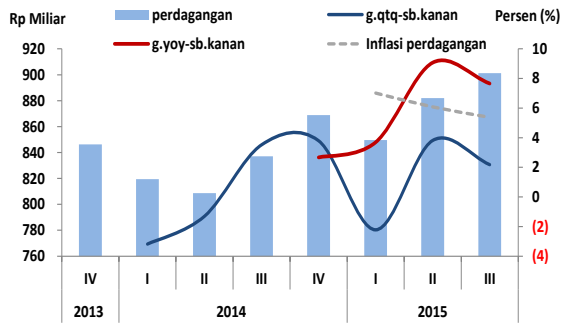
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-53Luas Panen dan Produksi Padi Maluku

Lebih lanjut, perlambatan yang terjadi pada laju pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan terkonfirmasi dengan menurunnya pembiayaan perbankan yang disalurkan kepada kategori ini. Baki debit bank umum yang disalurkan kepada kategori pertanian, kehutanan dan perikanan Maluku sampai dengan triwulan III-2015 mencapai Rp558.85 miliar atau tumbuh 14.26% (y.o.y), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 18.86% (y.o.y). Subsektor perikanan masih memiliki andil dominan terhadap pertumbuhan kredit sektor pertanian sebesar 11,40% dengan pangsa sebesar 89.93% dari total baki debit sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan memberikan andil 2.85% dengan pangsa 10.06%.

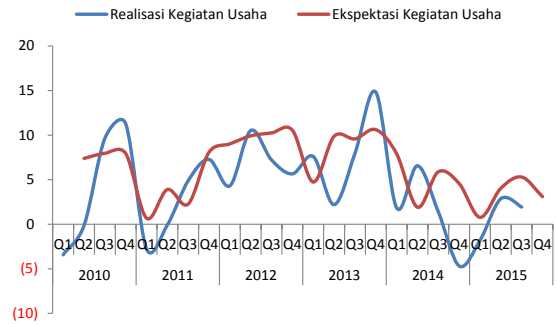


Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-54Kredit Sektor Pertanian di Provinsi Maluku Menurut Lokasi Proyek

1.3.2 Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

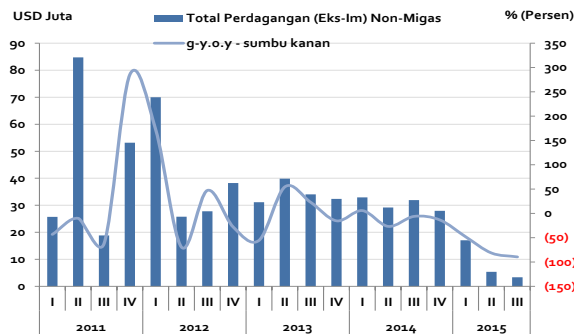


Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah
Grafik 1-55 PDRB Perdagangan dan Reparasi Provinsi Maluku



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha – Bank Indonesia
Grafik 1-56 Kegiatan Usaha Sektor Perdagangan di Prov. Maluku

Kinerja kategori perdagangan Maluku memperlihatkan kecenderungan melambat pada triwulan laporan. Pertumbuhan kategori perdagangan pada triwulan III-2015 mencapai 7.66% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9.07% (yoy). Melambatnya kinerja kategori perdagangan sejalan dengan menurunnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga di sisi permintaan seiring dengan menurunnya kondisi ekonomi maupun permintaan domestik serta tingkat penghasilan masyarakat secara umum. Melambatnya kategori ini sejalan dengan hasil SKDU Bank Indonesia, dimana indikator realisasi kegiatan usaha perdagangan pada triwulan laporan tercatat sebesar 1.93%, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2.87%.

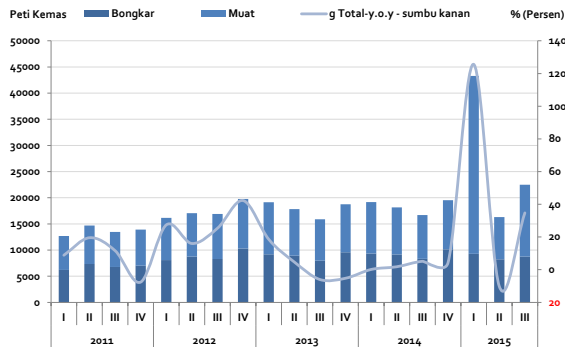


Sumber: Bank Indonesia
Grafik 1-57 Total Perdagangan (Eks-Im) Non-migas Maluku

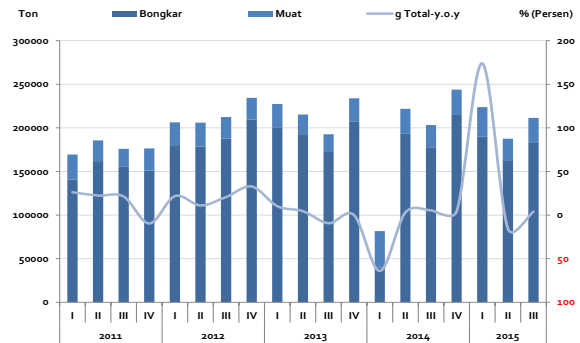
Tertahannya kinerja kategori perdagangan seiring dengan menurunnya pertumbuhan perdagangan eksternal (ekspor dan impor) akibat melemahnya perekonomian dunia. Kinerja perdagangan eksternal yang melambat tercermin pada pertumbuhan total perdagangan (ekspor dan impor) nonmigas Maluku yang mencatatkan nilai sebesar USD3.08 juta atau terkontraksi 89.55% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 81.58% (yoy). Menurunnya aktivitas perdagangan nonmigas dengan luar negeri didorong oleh penurunan pada kinerja ekspor maupun impor akibat melemahnya perekonomian dunia, di samping meningkatnya harga barang impor akibat penguatan nilai tukar US Dollar.

Meskipun melambat, pertumbuhan kategori perdagangan masih tergolong tinggi dan merupakan kategori dengan andil tertinggi pada pertumbuhan ekonomi Maluku, yakni mencapai 1.08% (yoy). Meskipun melambat, kategori perdagangan masih dapat tumbuh tinggi sebagai dampak dari pola konsumsi masyarakat yang cukup tinggi, khususnya pada Hari Raya Idul Fitri, musim liburan sekolah, perayaan HUT

Provinsi Maluku dan Kota Ambon serta persiapan Pesparawi Nasional dan Maluku Fair 2015. Hal ini mendorong tingginya aktivitas jual beli di dalam maupun antar daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Selanjutnya, peningkatan kegiatan perdagangan ini terlihat dari kenaikan pertumbuhan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Jumlah arus bongkar muat barang di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon pada triwulan laporan mencapai 211.45 ribu ton atau tumbuh 4.01% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 15.42% (yoy). Sementara itu, jumlah peti kemas yang diperdagangkan di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, mencapai 22.487 peti kemas atau tumbuh 34.74 (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 10.17% (yoy).

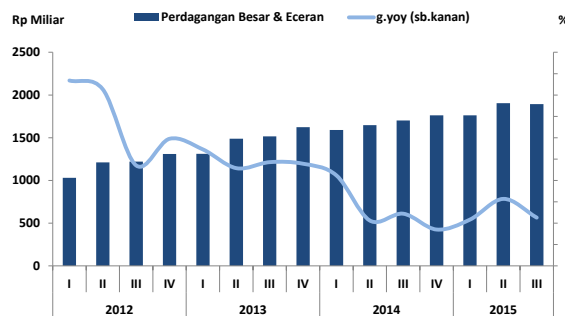


Sumber: Pelindo IV, Cabang Ambon
Grafik 1-58 Arus Peti Kemas di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon



Sumber: Pelindo IV, Cabang Ambon
Grafik 1-59 Arus Barang di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon

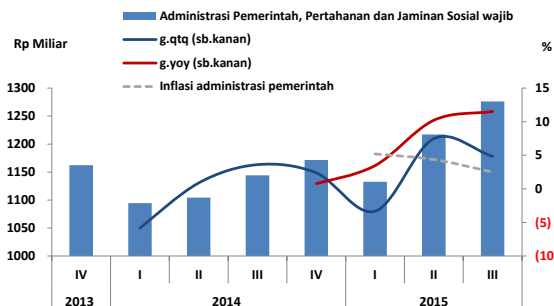
Menurunnya dukungan dunia perbankan pada triwulan laporan juga menjadi salah satu penyebab melambatnya pertumbuhan kategori perdagangan. Posisi pada akhir triwulan laporan, baki debit bank umum yang disalurkan kepada dunia usaha perdagangan mencapai Rp 1,89 triliun atau tumbuh 11.29% (yoy), melambat dibanding triwulan sebelumnya yang tumbuh 15.68% (yoy).



Grafik 1-60 Kredit Sektor Perdagangan Besar dan Eceran di Bank Umum Provinsi Maluku Menurut Lokasi Proyek

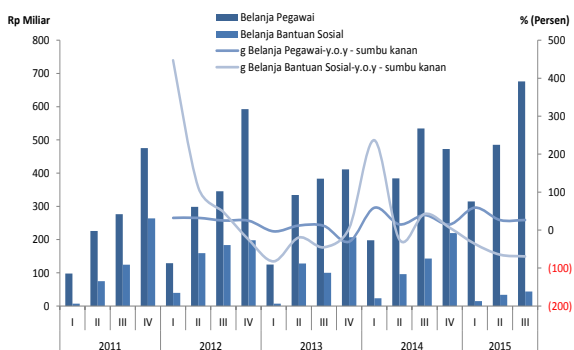
1.3.3 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Pada triwulan laporan, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mencatatkan laju pertumbuhan yang meningkat. Pertumbuhan kategori administrasi pemerintahan triwulan III-2015 sebesar 11.53% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10.22% (yoy). Meningkatnya laju pertumbuhan administrasi pemerintahan seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan rutin yang berasal dari APBN maupun APBD Provinsi Maluku, pembayaran gaji ke-13 PNS/TNI/POLRI, pemeliharaan gedung dan mesin kantor serta penyelenggaraan kegiatan sosial dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Meningkatnya realisasi barang dan jasa di dalam APBD juga turut mendorong peningkatan kategori administrasi pemerintahan.

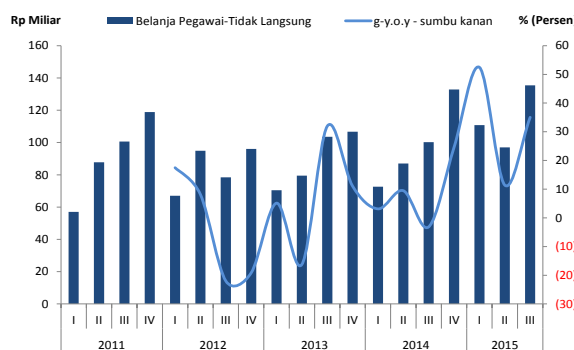


Sumber: BPS Provinsi Maluku
 Grafik 1-61PDRB Kategori Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Meningkatnya laju pertumbuhan kategori administrasi pemerintahan seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan realisasi belanja pegawai, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD Provinsi Maluku. Pada triwulan III-2015, belanja pegawai yang berasal dari APBN mencapai Rp676.12 miliar atau tumbuh 26.51% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 26.36% (yoy). Sementara itu, belanja pegawai tidak langsung yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku pada triwulan laporan mencapai Rp135.38 miliar atau tumbuh 35.05% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11.41% (yoy). Meningkatnya belanja pegawai antara lain bersumber dari pembayaran gaji ke-13 PNS/TNI/POLRI.



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-62Belanja Pegawai dan Bantuan Sosial APBN Provinsi Maluku

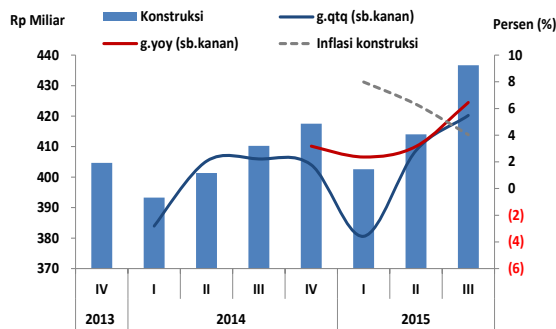


Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-63 Belanja Pegawai-Tidak Langsung APBD Provinsi Maluku

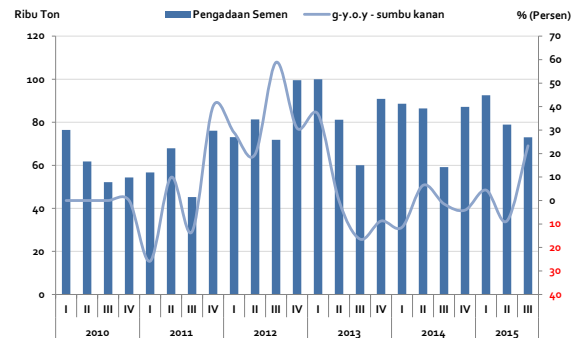
1.3.4. Konstruksi

Kategori konstruksi pada triwulan III-2015 mengalami pertumbuhan dengan laju yang meningkat, sejalan dengan meningkatnya kinerja PMTDB (investasi) di sisi permintaan. Pertumbuhan kategori konstruksi pada triwulan laporan sebesar 6.45% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 3.16% (yoy). Meningkatnya kategori konstruksi didorong oleh meningkatnya investasi bangunan seiring dengan pertumbuhan realisasi belanja modal pemerintah dan faktor cuaca yang kondusif untuk melanjutkan aktivitas pembangunan. Selain itu, peningkatan aktivitas konstruksi juga disebabkan oleh adanya percepatan realisasi pembangunan dalam rangka menyambut Pesparawi Nasional dan Maluku Fair 2015. Hal ini, lebih lanjut dikonfirmasi oleh meningkatnya pengadaan semen di Maluku yang tercatat oleh Asosiasi Semen Indonesia (ASI)

pada triwulan II-2015 yang mencapai 72.97 ribu ton atau tumbuh 23.30% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 8.67% (yoy).

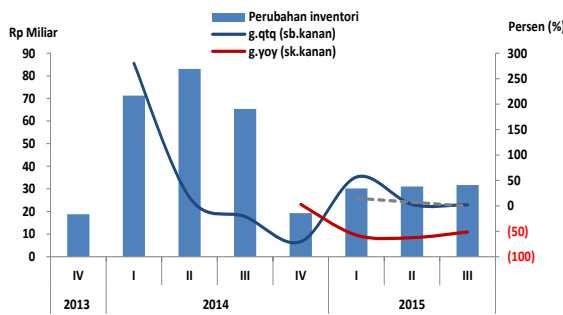


Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-64 PDRB Sektor Konstruksi Provinsi Maluku

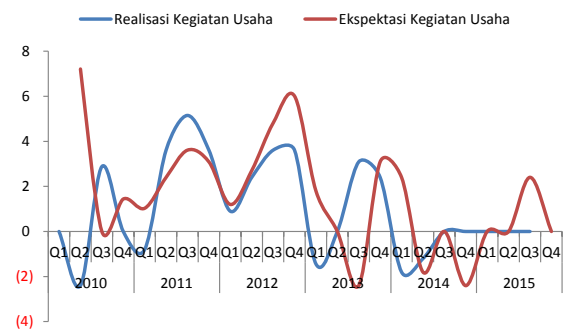


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia; diolah
Grafik 1-65 Realisasi Pengadaan Semen Provinsi Maluku

Selanjutnya, meningkatnya pertumbuhan konstruksi juga didorong oleh menurunnya inflasi barang yang diproduksi oleh sektor konstruksi. Inflasi implisit pada sektor konstruksi pada triwulan laporan tercatat sebesar 4.03% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6.32% (yoy). Penurunan laju inflasi pada barang konstruksi ini sejalan dengan melemahnya kondisi perekonomian domestik.

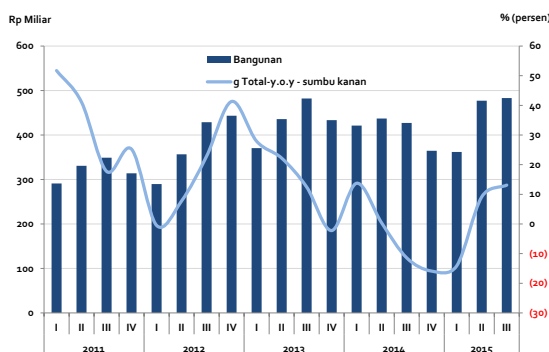


Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-66 Perubahan Inventori Provinsi Maluku



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha – Bank Indonesia
Grafik 1-67 Kegiatan Usaha Sektor Konstruksi Provinsi Maluku

Meningkatnya pertumbuhan kategori konstruksi juga terlihat dari optimisme keputusan dunia usaha dengan menambah pengadaan barang modal untuk digunakan pada periode sekarang maupun kedepan. Hal ini terlihat dari komponen perubahan inventori perekonomian Maluku pada triwulan III-2015 yang mencapai Rp31.68 miliar atau berkontraksi 51.52% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang berkontraksi 62.61% (yoy). Meningkatnya inventori atau stok persediaan barang modal pada triwulan laporan memperlihatkan kecenderungan yang optimis dari pelaku usaha untuk melakukan aktivitas pembangunan maupun meningkatnya kebutuhan barang modal dari pemerintah daerah untuk mengejar proyek pembangunan yang ditargetkan selesai pada akhir tahun. Inventori di Maluku cenderung didominasi oleh barang modal untuk aktivitas konstruksi (bangunan).

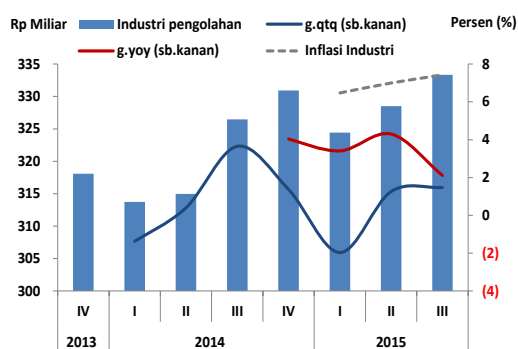


Sumber: Bank Indonesia, diolah
 Grafik 1-68 Kredit Sektor Bangunan di Bank Umum Provinsi Maluku Menurut Lokasi Proyek

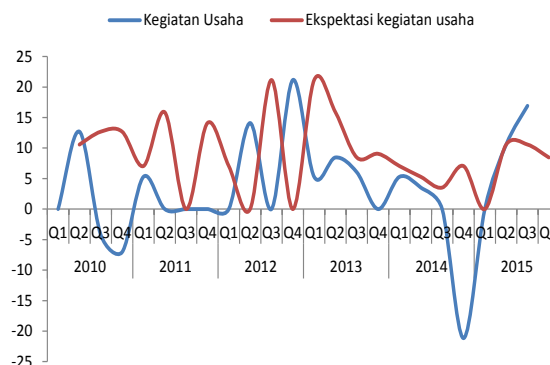
Meningkatnya dukungan pembiayaan perbankan mengonfirmasi meningkatnya kinerja kategori konstruksi pada triwulan laporan. Baki debit pembiayaan perbankan Indonesia kepada kategori konstruksi di Maluku mencapai Rp482.96 miliar atau tumbuh 13.10% (yoy), meningkat dibanding triwulan sebelumnya sebesar 9.13% (yoy).

1.3.5 Industri Pengolahan

Pertumbuhan kategori industri pengolahan Maluku pada triwulan III-2015 mengalami perlambatan seiring dengan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) untuk kelompok non-subsidi. Kategori industri pengolahan pada triwulan laporan tercatat tumbuh 2.11% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4.30% (yoy). Melambatnya kinerja industri pengolahan antara lain disebabkan oleh faktor kenaikan TDL kelompok non-subsidi pada triwulan laporan serta menurunnya permintaan akibat melemahnya kondisi ekonomi masyarakat, sehingga pelaku usaha industri cenderung menurunkan produksinya.



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-69 PDRB Sektor Industri Pengolahan Provinsi Maluku



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha - Bank Indonesia
 Grafik 1-70 Kegiatan Usaha Kategori Industri Pengolahan Maluku

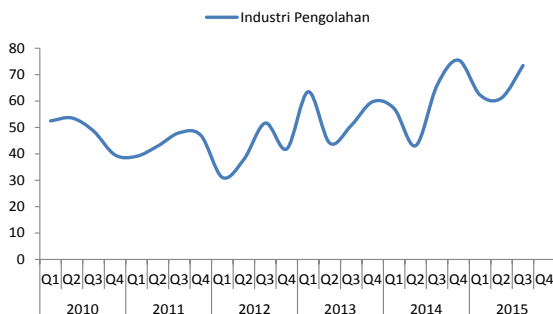
Perlambatan kinerja kategori industri pengolahan juga didorong oleh menurunnya produksi pada unit usaha kecil dan menengah seiring menurunnya daya beli masyarakat. Produksi Industri Mikro dan Kecil (IMK) di Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 tercatat tumbuh 24.61% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 28.22% (yoy). Penurunan terjadi pada beberapa industri, diantaranya makanan, minuman, kayu, barang galian dan furnitur. Secara umum, menurunnya produksi unit mikro dan kecil Provinsi Maluku sebagai dampak dari menurunnya daya beli masyarakat akibat kondisi ekonomi yang masih lesu sehingga pelaku usaha UMKM pun turut mengurangi kegiatan produksinya.

Tabel 1-3 Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Provinsi Maluku

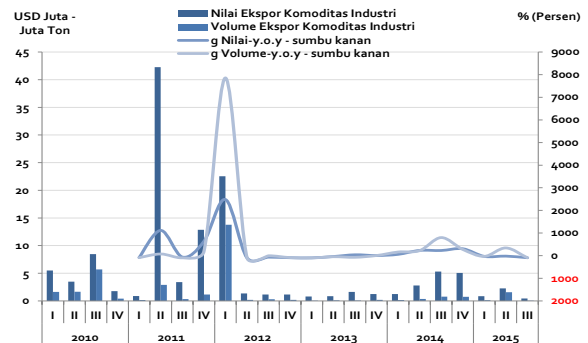
No.	Jenis Industri	2015 (%yoy)		
		I	II	III
1	Industri Makanan	7.17	26.05	25.48
2	Industri minuman	6.62	22.66	21.98
3	industri tekstil	3.27	(7.89)	3.22
4	industri pakaian jadi	(2.31)	(3.75)	4.85
5	Industri kayu dan barang anyaman	18.86	43.39	34.30
6	Industri bahan dan barang kimia	(9.15)	2.32	6.44
7	Industri karet, barang dari karet dan plastik	-	(9.89)	(9.89)
8	Industri barang galian bukan logam	22.13	67.22	32.08
9	Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya	-	(2.74)	(16.27)
10	Industri mesin dan perlengkapan YTDL	-	17.23	17.23
11	Indutsri alat angkutan lainnya	(3.27)	(4.64)	-
12	Industri furnitur	4.44	33.64	32.76
13	Industri pengolahan lainnya	(21.82)	(3.76)	30.13
IMK (Industri Mikro dan Kecil)		9.18	28.22	24.61

Sumber: BPS Provinsi Maluku

Dari usaha industri pengolahan masih mempersepsikan realisasi kegiatan usaha sektor ini dalam kondisi yang meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap makanan dan minuman jadi, maupun sandang dalam rangka perayaan hari raya keagamaan maupun kegiatan berskala besar lainnya. Hal ini terlihat dari meningkatnya aktivitas kegiatan usaha sektor industri pengolahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berdasarkan hasil SKDU Bank Indonesia, realisasi kegiatan usaha di sektor pengolahan tercatat sebesar 16.92%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 10.57%. Meningkatnya kegiatan usaha ini sejalan dengan meningkatnya pemakaian kapasitas produksi, yaitu dari 61.17% di triwulan II-2015 menjadi 73.50% pada triwulan laporan. Kondisi ini, selanjutnya, terlihat dari meningkatnya konsumsi listrik untuk kelompok industri, dimana pada triwulan laporan mencapai 2.56 MWh atau tumbuh 35.07% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4.17% (yoy).

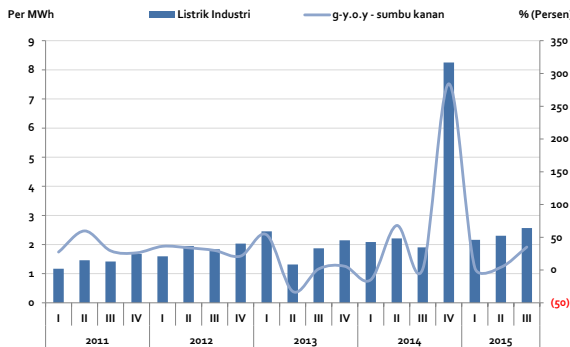


Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha – Bank Indonesia
 Grafik 1-71 Kapasitas Produksi Terpakai Kategori Industri Pengolahan di Prov. Maluku

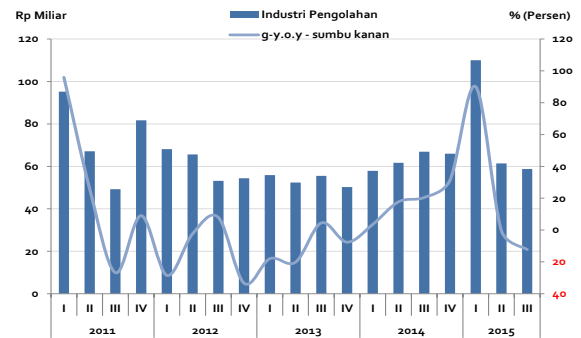


Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-72 Ekspor Komoditas Industri Provinsi Maluku

Selanjutnya, melambatnya pertumbuhan industri pengolahan Maluku serta menurunnya kondisi ekonomi global, pada akhirnya berdampak pada menurunnya ekspor produk industri Maluku. Ekspor komoditas industri Maluku pada triwulan laporan mencapai nilai USD0.44 juta atau terkontraksi 91.65% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 19.57% (y.o.y). Sedangkan dari sisi volume, ekspor komoditas industri Maluku mencapai 0.05 ribu ton atau terkontraksi 93.49% (yoy), menurun signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh hingga 341.95% (yoy). Menurunnya produksi disertai dengan pelemahan ekonomi global menjadi penyebab menurunnya ekspor produksi industri Maluku, baik dari sisi nilai maupun volume.



Sumber: PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara; diolah
Grafik 1-73 Konsumsi Listrik Kelompok Industri Provinsi Maluku

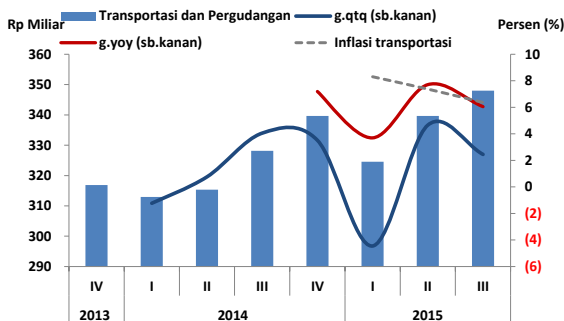


Grafik 1-74 Kredit Sektor Industri Pengolahan di Bank Umum Provinsi Maluku Menurut Lokasi Proyek

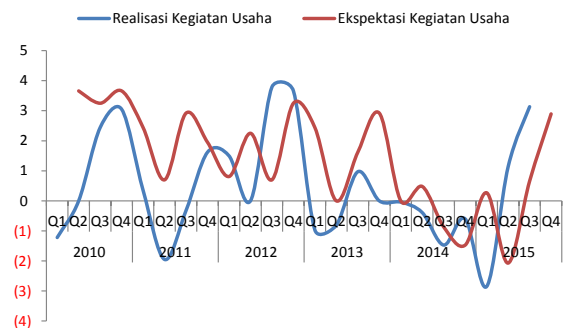
Lebih lanjut, menurunnya dukungan pembiayaan perbankan mengonfirmasi perlambatan pada kategori industri pengolahan. Pada triwulan III 2015, baki debit bank umum yang disalurkan kepada dunia usaha industri pengolahan Maluku tercatat sebesar Rp58.73 miliar atau terkontraksi 12.22% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 0.46% (y.o.y).

1.3.6 Transportasi dan Pergudangan

Kategori transportasi dan pergudangan pada triwulan III-2015 mencatatkan pertumbuhan yang melambat pada triwulan laporan. Kategori ini mengalami pertumbuhan sebesar 6.05% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7.71% (yoy). Melambatnya kinerja kategori transportasi, terutama didorong oleh menurunnya kinerja jasa angkutan laut akibat faktor gelombang tinggi di perairan wilayah Maluku di tengah bertiupnya angin barat.



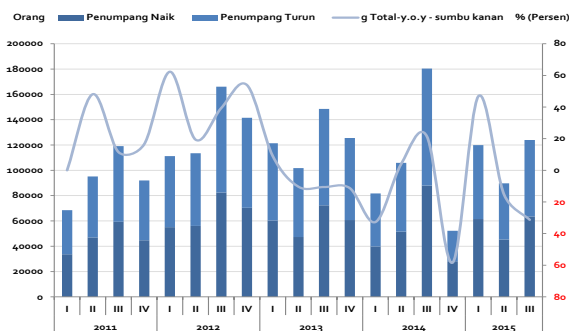
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 1-75 PDRB Kategori Transportasi dan Pergudangan



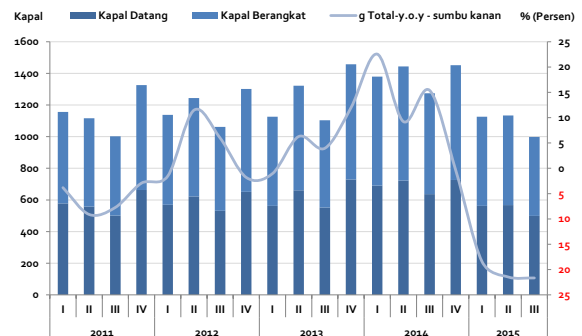
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha – Bank Indonesia
Grafik 1-76 Kegiatan Usaha Sektor Jasa Angkutan Darat & Laut di Prov. Maluku

Meski melambat, pertumbuhan kategori transportasi masih tergolong tinggi seiring dengan tingginya permintaan dalam rangka “ arus mudik” saat Hari Raya Idul Fitri dan musim liburan sekolah di tengah meningkatnya investasi jasa angkutan. Tingginya permintaan terhadap jasa transportasi direspon oleh dunia usaha angkutan dengan meningkatnya realisasi kegiatan usaha untuk transportasi dan investasi pada dunia usaha angkutan. Menurut hasil SKDU Bank Indonesia, realisasi kegiatan usaha pada triwulan III-2015 tercatat sebesar 3.13%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1.14%. Sedangkan, indeks realisasi investasi untuk jasa angkutan tercatat sebesar 0.6% pada triwulan laporan, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar -1.12%.

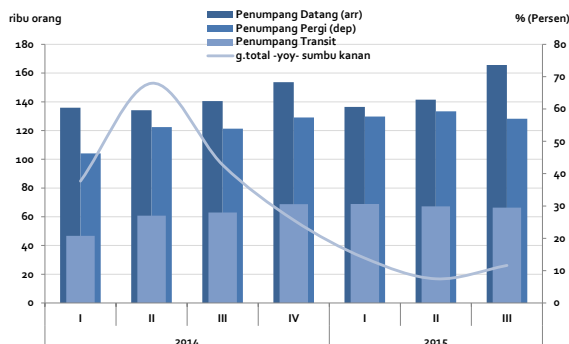
Melambatnya kinerja kategori transportasi dan perdagangan seiring dengan menurunnya kinerja jasa angkutan laut akibat gelombang tinggi yang terjadi di perairan wilayah Maluku selama periode laporan. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya pertumbuhan arus penumpang maupun trafik kapal di Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon. Arus penumpang di Pelabuhan Yos Sudarso selama periode laporan mencapai 123.954 orang atau terkontraksi 31.29% (yoy), turun lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 15.23% (yoy). Jumlah penumpang yang naik pada triwulan III-2015 mencapai 63.566 orang dan yang turun mencapai 60.388 orang, masing-masing terkontraksi 27.68% (y.o.y) dan 34,73% (y.o.y), keduanya turun lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami kontraksi masing-masing sebesar 12.07% (y.o.y) dan 18.22% (y.o.y). Arus kapal yang berangkat maupun yang datang dari dan ke Pelabuhan Yos Sudarso juga menunjukkan tren yang menurun. Trafik kedatangan dan keberangkatan kapal di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon, mencapai 998 kapal atau terkontraksi 21.66% (y.o.y), lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya yang terkontraksi 21.47% (y.o.y).



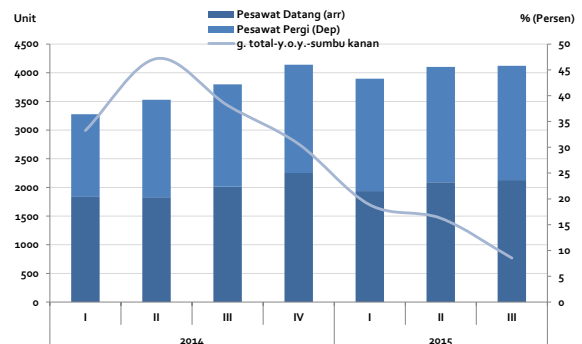
Sumber: Pelindo IV, Cabang Ambon
Grafik 1-77 Arus Penumpang di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon



Sumber: Pelindo IV, Cabang Ambon
Grafik 1-78 Trafik Kedatangan dan Keberangkatan Kapal di Pelabuhan Yos Sudarso, Kota Ambon

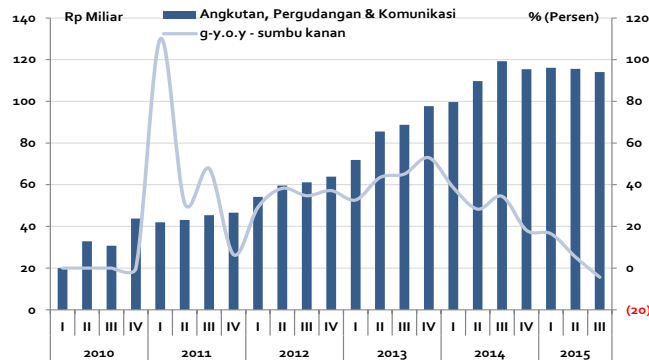


Sumber: PT Angkasa Pura I, diolah
Grafik 1-79 Arus Penumpang di Bandara Pattimura, Kota Ambon



Sumber: PT Angkasa Pura I, diolah
Grafik 1-80 Trafik Pesawat di Bandara Pattimura, Kota Ambon

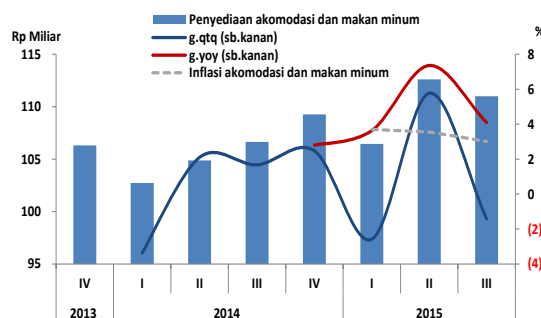
Menurunnya kinerja jasa angkutan laut di tengah meningkatnya jasa angkutan udara terkait dengan kondisi geografis Maluku yang berupa kepulauan yang menyebar sehingga jasa angkutan udara memiliki keunggulan komparatif dari sisi keterjangkauan dan efisiensi waktu. Jasa angkutan udara terindikasi meningkat, terlihat dari pertumbuhan arus penumpang di Bandara Pattimura, Kota Ambon. Pada triwulan laporan, arus penumpang di Bandara Pattimura, Ambon tercatat sebesar 323.369 orang atau tumbuh 11.60% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7.47% (yoy). Selain itu, masuknya musim liburan sekolah serta persiapan Pesparawi Nasional dan Maluku Fair yang diikuti oleh 33 provinsi turut memengaruhi kinerja transportasi, terutama terkait dengan permintaan jasa angkutan udara.



Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-81Kredit Sektor Angkutan dan Komunikasi di Bank Umum Maluku

Selanjutnya, melambatnya kinerja transportasi dan pergudangan turut dikonfirmasi oleh menurunnya kredit perbankan yang disalurkan kepada kategori ini. Di tengah tingginya berbagai tarif jasa angkutan serta mengantisipasi kebijakan Pemerintah terkait penyesuaian harga BBM, dunia usaha kategori transportasi cenderung menahan kredit pada kategori ini. Baki debit bank umum yang disalurkan pada posisi akhir triwulan III-2015 mencapai Rp114.03 miliar atau terkontraksi 4.37% (y.o.y), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 5.34% (y.o.y).

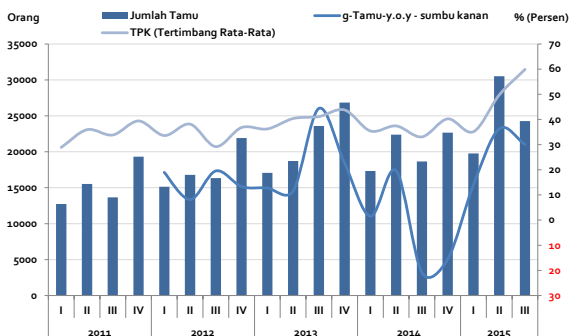
1.3.7 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum



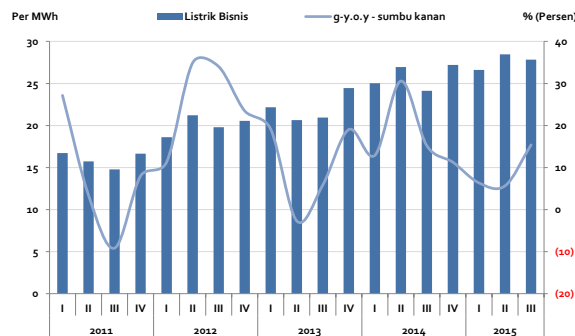
Sumber: BPS Provinsi Maluku
 Grafik 1-82PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Kinerja kategori penyediaan akomodasi dan makan minum menunjukkan kecenderungan yang melambat pada triwulan III-2015. Kategori penyediaan akomodasi dan makan minum pada triwulan laporan tercatat tumbuh 4.09% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7.36% (yoy). Melambatnya kinerja kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terkait dengan pola musiman menurunnya tingkat

kunjungan ke Maluku pada saat Hari Raya Idul Fitri serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih tertahan. Hal ini lebih lanjut, dikonfirmasi oleh melambatnya jumlah tamu yang menginap di hotel bintang di Maluku, dimana selama triwulan laporan jumlah tamu mencapai 24.269 orang atau tumbuh 30.10% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 36.25% (yoy).



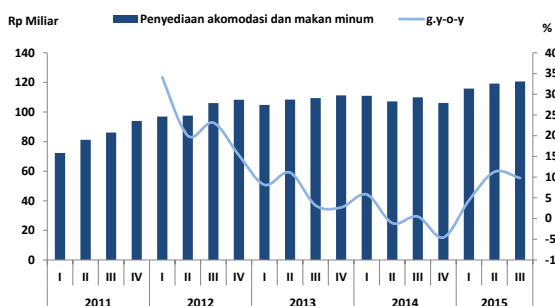
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 1-83 Tingkat Penghunian Kamar dan Jumlah Tamu Hotel di Prov. Maluku



Sumber: PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara
 Grafik 1-84 Konsumsi Listrik Kelompok Bisnis Provinsi Maluku

Deselerasi lebih jauh tertahan oleh tingginya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Maluku seiring dengan meningkatnya aktivitas MICE serta persiapan penyelenggaraan Pesparawi Nasional 2015. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang di Maluku selama periode triwulan III-2015 mencapai 59.87%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 49.71%. Kondisi ini, selanjutnya, searah dengan meningkatnya laju pertumbuhan konsumsi listrik kelompok bisnis di Maluku. Data dari PT. PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara memperlihatkan konsumsi listrik kelompok bisnis di Maluku mencapai 27.83 MWh atau tumbuh 15.38% (y.o.y), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5.63% (y.o.y). Meningkatnya pertumbuhan konsumsi listrik kelompok bisnis seiring dengan ramainya kegiatan pusat perbelanjaan, hotel dan restoran, maraknya kegiatan *Meeting, Invention, Convention and Exhibition* (MICE) seperti: HUT Provinsi Maluku dan HUT Kota Ambon, serta persiapan penyelenggaraan Pesparawi Nasional dan Maluku Fair 2015.

Melambatnya pertumbuhan kategori penyediaan akomodasi dan makan minum dikonfirmasi dengan melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan kepada kategori ini. Posisi pada akhir triwulan III-2015, baki debit bank umum yang disalurkan kepada dunia usaha akomodasi dan makan minum mencapai Rp120.64 miliar atau tumbuh 9.77% (y.o.y), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11.27% (y.o.y).



Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 1-85 Kredit Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Bank Umum Provinsi Maluku Menurut Lokasi Proyek

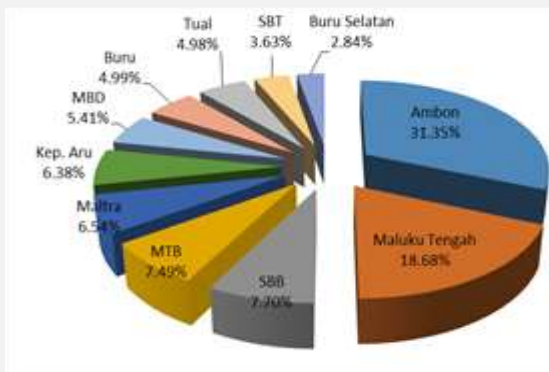
BOKS 1 Perkembangan PDRB dan Analisis Tipologi Klassen Kota/Kab Maluku

Perkembangan ekonomi Provinsi Maluku dapat dianalisis secara spasial karena merupakan agregat dari perkembangan ekonomi masing-masing kota/ kabupatennya. Data pertumbuhan PDRB Kota/ Kabupaten di Maluku berdasarkan tahun dasar 2010 telah dirilis oleh BPS pada awal Oktober 2015 dalam publikasi Maluku Dalam Angka Tahun 2015. Untuk mengetahui perbandingan sumbangan dan laju pertumbuhan ekonomi dari masing-masing Kota/Kabupaten, dapat menggunakan analisis pangsa PDRB dan tipologi Klassen.

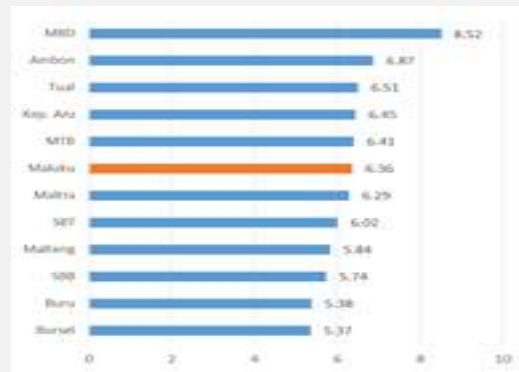
1. Perkembangan PDRB Kabupaten/ Kota di Maluku

Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun dasar 2010, nilai *output* perekonomian Provinsi Maluku secara keseluruhan pada tahun 2014 sebesar Rp31,73 triliun. Dibandingkan dengan PDB nasional, PDRB Maluku memiliki pangsa relative kecil yaitu 0,3%. Secara spasial, penyumbang terbesar perekonomian Maluku pada tahun 2014 adalah Kota Ambon (31,35%) dan Kab. Maluku Tengah (18,68%).

Selama periode tahun 2011-2014, perekonomian Maluku tumbuh relatif lebih cepat dibandingkan nasional. Secara rata-rata, pertumbuhan ekonomi Maluku antara tahun 2011-2014 sebesar 6,36%, lebih cepat dibandingkan nasional yang sebesar 5,70%. Dari 11 Kota/ Kabupaten di Maluku, hanya dua kabupaten yang rata-rata pertumbuhannya berada di bawah nasional yaitu Kab. Buru dan Kab. Buru Selatan.



Sumber: BPS
Grafik Boks.1.1. Pangsa PDRB Maluku Tahun 2014



Sumber: BPS
Grafik Boks.1.2. Rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Maluku Tahun 2011-2014 (%yoy)

Tabel Boks 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota/ Kabupaten di Provinsi Maluku (Tahun Dasar 2010), %yoy

No	Wilayah	2011	2012	2013	2014	Rata-rata
1	Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB)	7.16	7.30	5.15	6.04	6.41
2	Kab. Maluku Tenggara (Maltra)	5.98	7.07	5.88	6.25	6.29
3	Kab. Maluku Tengah (Malteng)	5.40	6.91	4.46	6.58	5.84
4	Kab. Buru	5.44	5.44	4.42	6.23	5.38
5	Kab. Kepulauan Aru	5.25	7.84	5.88	6.84	6.45
6	Kab. Seram Bagian Barat (SBB)	5.87	6.39	4.55	6.16	5.74
7	Kab. Seram Bagian Timur (SBT)	8.54	3.94	3.15	8.44	6.02
8	Kab. Maluku Barat Daya (MBD)	5.65	7.46	5.61	15.35	8.52

9	Kab. Buru Selatan (Bursel)	4.63	5.20	5.37	6.28	5.37
10	Kota Ambon	7.14	8.33	6.06	5.96	6.87
11	Kota Tual	5.90	7.90	5.90	6.34	6.51
Provinsi Maluku		6.34	7.16	5.26	6.70	6.36
Nasional		6.17	6.03	5.58	5.02	5.70

Sumber: BPS Provinsi Maluku



Sumber: BPS

Grafik Boks 1.3. PDRB per kapita Maluku 2014

Dari sisi PDB (PDRB) per kapita, Maluku berada jauh dibawah nasional. PDRB perkapita Maluku pada tahun 2014 sebesar Rp19,15 juta, hanya separuh dari PDB per kapita nasional yang mencapai Rp41,81 juta. Secara spasial, terdapat perbedaan (*gap*) PDRB per kapita yang jauh antar kota/kabupaten di Maluku. Terdapat lima kota/kabupaten di Maluku yang memiliki PDRB per kapita di atas rata-rata provinsi yaitu Kep. Aru, Ambon, Tual, SBT dan Maltra, dengan rentang nominal antara Rp21-26 juta. Sementara itu enam kabupaten lainnya memiliki PDRB per kapita lebih rendah dari rata-rata provinsi, yaitu SBB, Buru, Bursel, MTB, MBD dan Malteng, dengan rentang antara Rp12-16 juta.

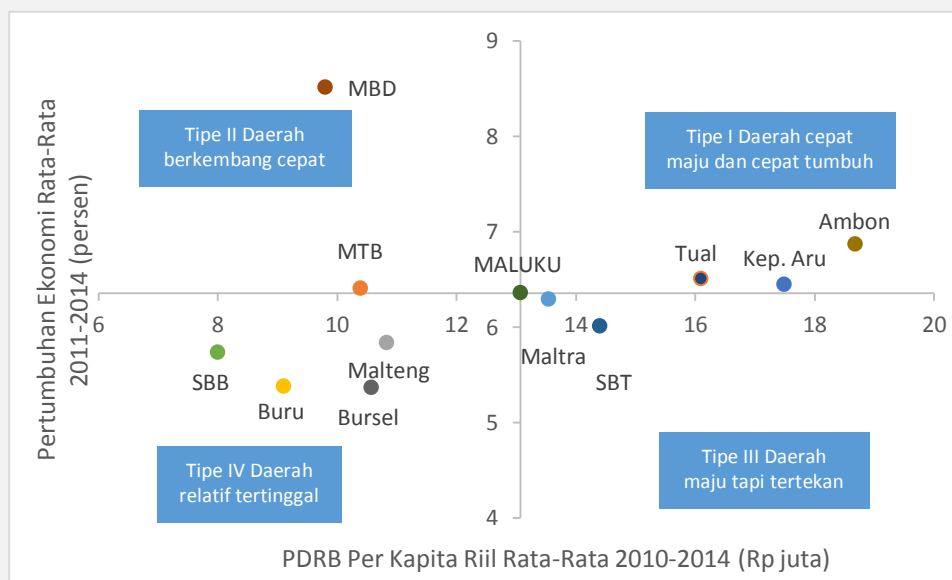
2. Analisis Tipologi Klassen

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional/ regional/ daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Untuk mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah dapat digunakan alat analisis Tipologi Klassen (*Klassen Typology*). Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan 2 indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan (PDRB) per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh 4 karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but low income*) dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota dalam analisis ini adalah sebagai berikut: (1) daerah cepat maju dan cepat tumbuh, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih tinggi dibanding Provinsi Maluku; (2) daerah berkembang cepat, yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding Provinsi Maluku; (3) daerah maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih

rendah dibanding Provinsi Maluku; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding Provinsi Maluku. Indikator pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita digolongkan “tinggi” atau “rendah” berdasarkan perbandingannya dengan Provinsi Maluku.



Grafik Boks.1.4 Tipologi Klassen Kota/ Kabupaten di Maluku

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen yang digambarkan dalam Grafik Boks 1.2, berikut adalah penggolongan masing-masing daerah di Maluku:

- Tipe I (cepat maju dan cepat tumbuh) : Kota Ambon, Kab. Kepulauan Aru, Kota Tual
- Tipe II (berkembang cepat) : Kab. MBD, Kab. MTB
- Tipe III (daerah maju tapi tertekan) : Kab. Maltra; Kab. SBT
- Tipe IV (daerah relatif tertinggal) : Kab. Malteng; Kab. Bursel; Kab. Buru; Kab. SBB

3. Kesimpulan

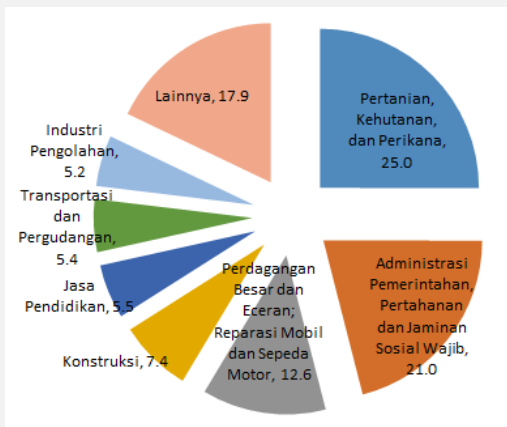
Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, maka Maluku perlu terus mendorong laju pertumbuhannya di atas rata-rata nasional secara konsisten dan berkesinambungan. Di sisi lain, perlu ada pemerataan pertumbuhan di dalam Maluku, agar *gap* antara daerah maju dan tertinggal di Maluku dapat diperkecil. Untuk itu pemerintah perlu memberikan fokus pengembangan ekonomi terutama di daerah-daerah yang relatif tertinggal, seperti SBB, Buru, Bursel dan Malteng, antara lain melalui pengembangan infrastruktur dan mendorong investasi serta industrialisasi terkait potensi ekonomi daerah.

BOKS 2 Daya Saing Industri dan Indeks Tata Kelola Daerah Maluku

Daya saing sektor industri pengolahan di Maluku cenderung melemah terhadap sektor lainnya. Hal ini tercermin dari pangsa sumbangannya terhadap PDRB maupun serapan tenaga kerja yang terus menurun. Di sisi lain, peran sektor industri pengolahan perlu terus ditingkatkan untuk memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan yang berlimpah di Maluku. Salah satu upaya yang diperlukan adalah menarik investasi asing maupun dalam negeri di sektor tersebut. Namun demikian, upaya ini memerlukan iklim bisnis yang kondusif bagi pelaku usaha.

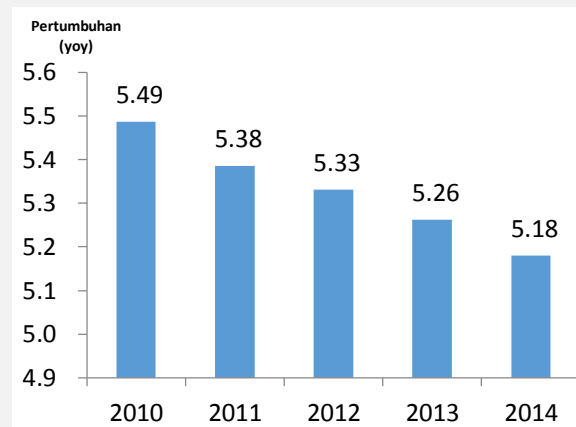
1. Perkembangan Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri Pengolahan (Manufaktur) di Maluku memiliki pangsa ekonomi yang relatif kecil, yaitu hanya sebesar 5,2%, berdasarkan data PDRB tahun 2014. Dari 18 kategori, industri pengolahan hanya menempati peringkat ketujuh. Di samping itu, pangsa industri pengolahan juga cenderung menurun sejak tahun 2010 hingga 2014, yaitu dari awalnya 5,5% menjadi 5,2%. Hal ini mengindikasikan daya saing sektor industri yang cenderung menurun dibandingkan sektor lainnya.



Sumber: BPS (diolah)

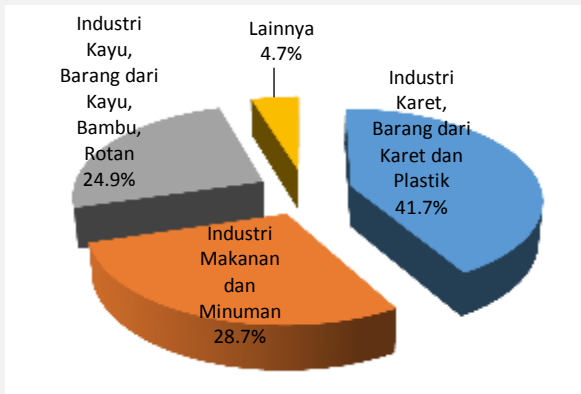
Grafik Boks 2.1. Pangsa Kategori PDRB Maluku Tahun 2014



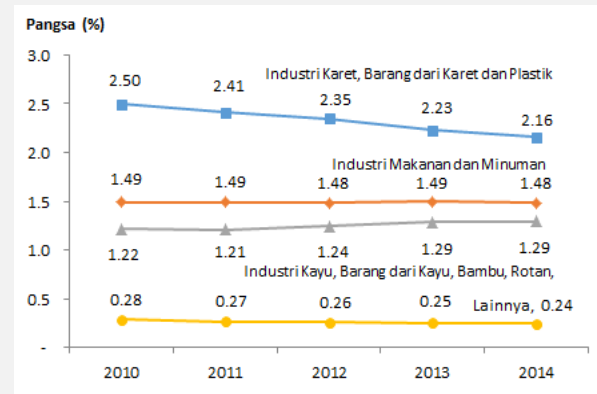
Sumber: BPS (diolah)

Grafik Boks 2.2 Perkembangan Pangsa PDRB Kategori Industri Pengolahan Maluku

Lebih rinci, terdapat tiga sub kategori terbesar di industri pengolahan Maluku yaitu (i) Industri karet, barang dari karet dan plastik, (ii) Industri makanan dan minuman, (iii) Industri dari kayu, barang dari kayu, bambu dan rotan. Di antara ketiganya, sub kategori industri karet, barang dari karet dan plastik mengalami penurunan pangsa ekonomi yang paling tajam. Hal ini tidak terlepas dari tren penurunan harga karet dunia. Hal lain yang perlu dicermati adalah rendahnya pangsa industri makanan dan minuman di Maluku (1,3%), sementara pangsa sub kategori perikanan cukup besar (13,8%). Hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan ikan seperti pembekuan, pengawetan dan pengolahan ikan, masih belum berkembang.

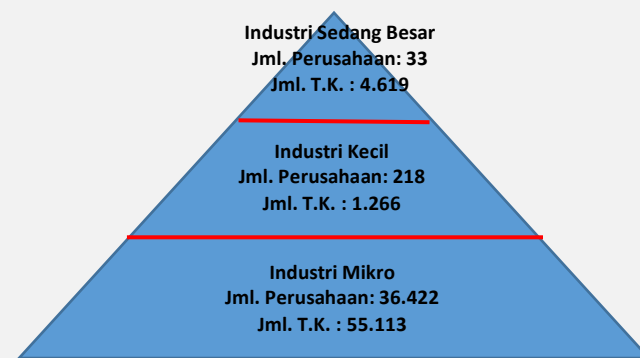


Sumber: BPS (diolah)
 Grafik Boks 2.3 Pangsa Sub Kategori Industri Pengolahan Maluku Tahun 2014



Sumber: BPS (diolah)
 Grafik Boks 2.4 Perkembangan Sub Kategori Industri Pengolahan Maluku

Relatif rendahnya sumbangan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Maluku antara lain dipengaruhi oleh dominannya industri skala mikro dalam struktur industri di Maluku, yang jauh lebih besar dibandingkan industri kecil, sedang dan besar, sehingga nilai tambah industri secara keseluruhan relatif rendah.



Sumber: BPS
 Grafik Boks 2.5. Struktur Industri Pengolahan Maluku Tahun 2014

2. Indeks Tata Kelola Daerah

Rendahnya daya saing industri di Maluku tidak terlepas dari kondisi iklim usaha di daerah yang belum kondusif. Iklim usaha tersebut merupakan salah satu faktor penting bagi investor dalam menanamkan modalnya di sektor industri, karena sektor ini umumnya bersifat padat modal, teknologi dan tenaga kerja, sehingga investasinya bersifat jangka panjang dibandingkan sektor lainnya. Permasalahan iklim usaha di Maluku antara lain tercermin dari rendahnya Indeks Tata Kelola Daerah yang dirilis oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) pada tahun 2011. Dari 245 dati II yang disurvei secara nasional, Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah menempati peringkat teratas di antara dati II lainnya di Maluku, yaitu 125 dan 132, sementara 8 kota/kab di Maluku lainnya menempati peringkat di bawah 200. Aspek Infrastruktur Daerah, Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah, Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha, dan Program Pengembangan Usaha Swasta menjadi permasalahan utama di Maluku. Salah satu aspek yang menjadi kendala adalah konflik kepemilikan lahan antara hukum positif agraria dan hak ulayat.

Tabel Boks 2.1. Indeks Tata Kelola Daerah Provinsi Maluku

Wilayah	Indeks Total	Akses Lahan	Infrastruktur Daerah	Perizinan Usaha	Biaya Transaksi	Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah	Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha	Program Pengembangan Usaha Swasta	Keamanan dan Penyelesaian Konflik	Peraturan di Daerah	Peringkat Nasional
Kota Ambon	63.20	47.40	68.90	58.40	66.20	53.90	54.60	63.70	55.40	93.40	125
Kab. Maluku Tengah	62.70	71.20	65.00	66.20	81.30	46.20	46.50	50.70	60.10	99.00	132
Kab. Maluku Tenggara	56.90	65.20	56.10	65.50	80.30	47.50	45.30	43.80	64.10	76.90	203
KotaTual	54.10	47.90	57.10	65.60	70.30	47.10	36.50	44.60	48.90	93.40	213
Kab. Kep. Aru	53.50	83.30	49.90	70.10	89.20	49.20	45.30	14.80	72.10	76.90	218
Kab. Buru	51.70	81.50	51.20	51.20	94.60	27.40	35.00	21.90	83.10	78.10	224
Kab. Maluku Tenggara Barat	47.60	58.00	42.30	56.20	79.10	37.70	38.80	27.70	73.10	94.20	236
Kab. Maluku Barat Daya	47.50	78.80	38.40	58.40	83.50	52.90	48.80	4.50	83.80	94.20	238
Kab. Seram Bagian Timur	40.70	72.40	30.50	52.10	84.30	28.30	40.50	6.90	73.10	77.30	243
Kab. Seram Bagian Barat	40.60	64.70	39.70	52.90	65.30	19.30	25.00	12.40	62.10	88.00	244
Rata2 Maluku	51.85	67.04	49.91	59.66	79.41	40.95	41.63	29.10	67.58	87.14	

Sumber: KPPOD (2011)

3. Kesimpulan

Daya saing industri di Maluku cenderung menurun, tercermin dari kontribusinya terhadap perekonomian yang semakin mengecil. Di sisi lain, industri sangat diperlukan untuk mengolah hasil bumi yang berlimpah di Maluku, seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan. Berkembangnya industri akan memberikan nilai tambah (*multiplier effect*) yang jauh lebih besar bagi perekonomian daerah, baik dari sisi lapangan kerja maupun pendapatan daerah. Untuk meningkatkan daya saing industri, Pemda dan pemangku kepentingan perlu memperbaiki tata kelola ekonomi di daerah, sehingga investor berminat untuk menanamkan modalnya di sektor industri. Berdasarkan hasil survey KPPOD, aspek yang perlu diperbaiki di Maluku terutama adalah Infrastruktur Daerah, Kapasitas dan Integritas Kepala Daerah, Interaksi Pemda dengan Pelaku Usaha, dan Program Pengembangan Usaha Swasta.

BAB II. PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

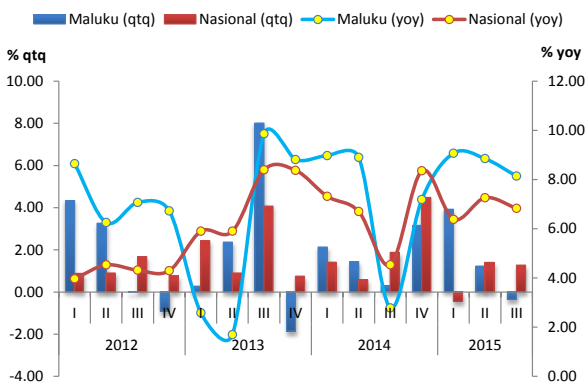
2.1 Perkembangan Inflasi Provinsi Maluku

Perkembangan inflasi Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Pencapaian inflasi Maluku tercatat sebesar 8,14% (yoy), sedikit lebih rendah dari perkiraan yaitu pada kisaran 8,20-9,20% (yoy), maupun realisasi triwulan sebelumnya sebesar 8,85% (yoy). Beberapa faktor yang mendorong penurunan laju inflasi Maluku adalah terkendalinya ekspektasi inflasi masyarakat serta permintaan domestik yang masih terbatas sehingga menyebabkan tekanan harga khususnya pada komponen inflasi inti mengalami penurunan. Selain itu, operasi pasar yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Kota dalam rangka pemenuhan stok pada saat Hari Raya Lebaran berhasil meredam lonjakan harga kebutuhan pokok.

Tabel 2-1 Series Inflasi Provinsi di Sulampua-Balinusra (dalam % yoy)

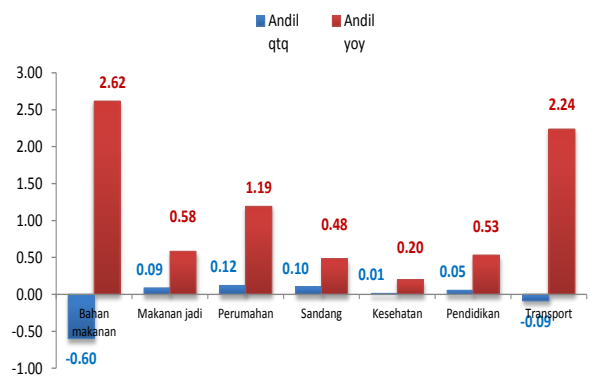
Provinsi	2012				2013				2014				2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Balinusra	5.75	5.82	5.19	4.59	6.16	5.43	8.06	8.28	6.62	6.78	4.57	7.99	6.13	6.55	6.27
Bali	4.52	4.32	4.37	4.71	6.47	5.47	7.91	7.35	6.09	6.41	4.53	8.43	6.42	6.97	6.56
NTB	8.84	8.51	6.36	4.00	5.18	5.47	8.13	9.51	7.03	6.76	4.91	7.22	5.98	6.04	5.41
NTT	3.60	5.02	5.21	5.33	7.11	5.26	8.29	8.41	7.78	8.10	4.13	7.76	5.39	6.01	6.74
Sulawesi Utara	0.95	3.73	5.23	6.04	6.83	4.95	7.73	8.12	5.67	6.26	4.00	9.67	7.99	8.73	9.35
Gorontalo	5.91	5.95	5.40	5.31	5.18	3.59	3.40	5.84	5.10	5.82	3.59	6.14	5.28	6.09	7.39
Sulawesi Tengah	2.50	4.99	6.78	5.87	5.97	3.89	7.29	7.57	8.42	10.37	5.46	8.84	5.28	6.00	5.36
Sulawesi Tenggara	5.10	4.65	2.03	5.25	3.02	3.76	7.30	5.92	5.60	4.84	1.83	8.45	7.80	7.35	7.25
Sulawesi Barat	3.81	3.24	3.71	3.28	4.19	4.30	5.86	5.91	6.24	6.65	4.46	7.89	6.68	7.59	6.48
Sulawesi Selatan	4.06	3.84	4.48	4.41	4.61	4.37	7.23	6.21	5.88	5.92	3.73	8.61	7.13	8.06	8.36
Maluku	8.65	6.25	7.07	6.73	2.58	1.70	9.86	8.81	8.94	8.86	2.79	7.19	9.07	8.85	8.14
Maluku Utara	4.54	4.30	3.87	3.29	3.97	2.93	9.66	9.78	8.80	9.75	5.40	9.35	7.92	8.22	6.60
Papua	1.94	1.80	2.94	4.52	5.89	6.07	8.58	8.27	9.57	7.40	4.51	9.11	6.84	8.20	7.06
Papua Barat	2.07	4.11	5.52	5.07	7.62	5.79	9.70	7.25	5.77	5.27	5.33	6.56	7.00	8.24	6.11
KTI	4.33	4.66	4.90	4.86	5.40	4.64	7.73	7.41	6.63	6.71	4.09	8.31	6.83	7.43	7.25
Nasional	3.97	4.53	4.31	4.30	5.90	5.90	8.40	8.38	7.32	6.7	4.53	8.36	6.38	7.26	6.83

Sumber: BPS; diolah



Sumber: BPS; diolah

Grafik 2-1 Perbandingan Inflasi Maluku dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah

Grafik 2-2 Andil Kelompok Komoditas Penyumbang Inflasi Maluku triwulan III-2015

Meskipun melambat, pencapaian inflasi Maluku masih relatif tinggi di antara provinsi lain di Kawasan Timur Indonesia (KTI) maupun inflasi nasional. Inflasi Maluku yang sebesar 8,14% (yoy), tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi KTI sebesar 7,25% (yoy), maupun inflasi nasional sebesar 6,83% (yoy). Beberapa

provinsi dengan pencapaian inflasi di bawah nasional diantaranya adalah Bali, NTB, NTT, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Papua Barat. Sementara itu, Sulawesi Utara tercatat merupakan provinsi dengan inflasi tahunan tertinggi di KTI dengan inflasi sebesar 9,35% (yoy), sedangkan Sulawesi Tengah merupakan yang terendah dengan inflasi sebesar 5,36% (yoy).

Penurunan laju inflasi tahunan terjadi pada seluruh kelompok komoditas, kecuali kelompok bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok & tembakau; dan pendidikan, rekreasi & olahraga. Inflasi tahunan pada kelompok perumahan tercatat sebesar 4,62% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 6,05% (yoy). Perlambatan pada inflasi kelompok perumahan didorong oleh perlambatan pada laju inflasi sub kelompok bahan bakar, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh menurunnya harga semen di Kota Ambon, yaitu dari harga Rp 66.000 per karung menjadi Rp 63.000 per karung. Selain itu, kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg untuk Kota Ambon dari Rp 213.000/tabung menjadi Rp 206.500/tabung sejak 16 September 2015 juga berdampak pada menurunnya harga pada sub kelompok perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga. Demikian halnya dengan kelompok transportasi, dimana inflasi tahunan pada periode triwulan laporan tercatat menurun dibandingkan periode triwulan sebelumnya sebagai dampak normalisasi tarif angkutan udara paska berakhirnya *peak-season* Lebaran pada periode akhir laporan.

Tabel 2-2 Perkembangan Inflasi Tahunan Provinsi Maluku per Kelompok Komoditas (dalam % yoy)

Kelompok Komoditas	2014				2015		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
Bahan makanan	18.42	14.72	(1.98)	2.23	11.84	10.42	11.32
Makanan jadi, minuman, rokok & tembakau	3.00	2.68	12.17	2.39	3.85	5.62	5.73
Perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar	4.45	5.83	16.69	7.06	7.34	6.05	4.62
Sandang	0.93	2.72	13.94	3.44	5.48	6.32	6.15
Kesehatan	3.54	2.69	14.22	6.87	6.81	7.29	4.91
Pendidikan, rekreasi & olahraga	6.60	8.52	18.50	3.85	10.35	8.93	9.10
Transport, komunikasi & jasa keuangan	14.09	14.74	18.64	18.23	11.76	12.86	10.69
TOTAL	8.94	8.86	2.78	7.19	9.07	8.85	8.14

Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah

Di sisi lain, kelompok bahan makanan, makanan jadi dan pendidikan tercatat mengalami peningkatan pada inflasi tahunannya. Pada awal periode laporan, pergerakan harga barang kebutuhan pokok masyarakat berhasil diredam setelah TPID Provinsi Maluku menggelar sidak kepada beberapa distributor untuk menjaga stok menjelang Hari Raya Lebaran. Selain itu, operasi pasar yang dilakukan Pemerintah Provinsi maupun Kota juga mampu mengendalikan beberapa harga daging, telur maupun susu sehingga tidak menimbulkan gejolak harga yang berlebihan. Namun, dampak el nino yang menyebabkan kekeringan di sejumlah sentra produksi di luar Maluku menyebabkan pasokan bahan makanan, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai dan bawang merah, mengalami penurunan, khususnya pada periode akhir laporan sehingga mendorong laju inflasi tahunan kelompok bahan makanan. Sementara itu, masuknya pergantian tahun ajaran baru yang bertepatan dengan Idul Fitri mendorong terjadinya peningkatan permintaan, terutama pada sub kelompok pendidikan, rekreasi & olahraga, yang menyebabkan terjadinya kenaikan inflasi pada sub kelompok pendidikan.

2.2 Perkembangan Inflasi Kota-Kota di Maluku

Tabel 2-3 Perkembangan Inflasi Kota Ambon, Kota Tual, Provinsi Maluku, dan Nasional

Kota	2014												2015								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ambon																					
Inflasi mtm (%)	0.81	0.85	0.64	0.92	0.40	0.18	0.14	0.12	(0.26)	0.15	0.82	1.85	2.37	1.03	0.44	0.33	1.06	(0.25)	1.03	(1.77)	0.38
Inflasi ytd (%)	0.81	1.66	2.31	3.25	3.66	3.84	3.99	4.12	3.85	4.01	4.86	6.81	2.37	3.42	3.88	4.22	5.33	5.07	6.15	4.27	4.67
Inflasi yoy (%)	6.14	8.84	9.12	9.86	8.54	9.14	5.86	2.15	2.27	5.67	6.27	6.81	8.47	8.66	8.44	7.81	8.53	8.06	9.02	6.95	7.64
Tual																					
Inflasi mtm (%)	1.10	1.46	(2.43)	0.15	0.52	0.06	2.84	1.76	(0.89)	2.18	2.86	1.43	0.99	3.20	0.15	1.31	1.59	(0.80)	0.31	1.16	(1.41)
Inflasi ytd (%)	1.10	2.58	0.09	0.24	0.76	0.83	3.69	5.51	4.57	6.85	9.91	11.48	0.99	4.22	4.38	5.74	7.43	6.57	6.90	8.15	6.62
Inflasi yoy (%)	9.53	12.05	7.00	8.40	7.61	5.68	4.63	7.19	8.85	10.16	13.61	11.48	11.36	13.27	16.26	17.60	18.85	17.83	14.93	14.26	13.67
Maluku																					
Inflasi mtm (%)	0.83	0.90	0.38	0.85	0.41	0.17	0.36	0.26	(0.31)	0.32	0.99	1.81	2.25	1.21	0.41	0.42	1.11	(0.30)	0.96	(1.52)	0.22
Inflasi ytd (%)	0.83	1.74	2.13	3.00	3.42	3.59	3.97	4.24	3.91	4.25	5.28	7.19	2.25	3.49	3.92	4.36	5.51	5.20	6.21	4.60	4.84
Inflasi yoy (%)	6.41	9.10	8.94	9.74	8.46	8.86	5.76	2.55	2.78	6.03	6.86	7.19	8.71	9.04	9.07	8.60	9.36	8.85	9.50	7.57	8.14
Nasional																					
Inflasi mtm (%)	1.07	0.26	0.08	(0.02)	0.16	0.43	0.93	0.47	0.27	0.47	1.50	2.46	(0.24)	(0.36)	0.17	0.36	0.50	0.54	0.93	0.39	(0.05)
Inflasi ytd (%)	1.07	1.33	1.41	1.39	1.56	1.99	2.94	3.42	3.71	4.83	6.23	8.36	(0.24)	(0.61)	(0.44)	(0.08)	0.43	0.96	2.15	2.92	2.24
Inflasi yoy (%)	8.22	7.75	7.32	7.25	7.32	6.70	4.53	3.99	4.53	4.19	5.65	8.36	6.96	6.29	6.38	6.79	7.16	7.26	7.26	7.18	6.83

Sumber: BPS; diolah

2.2.1 Inflasi Kota Ambon

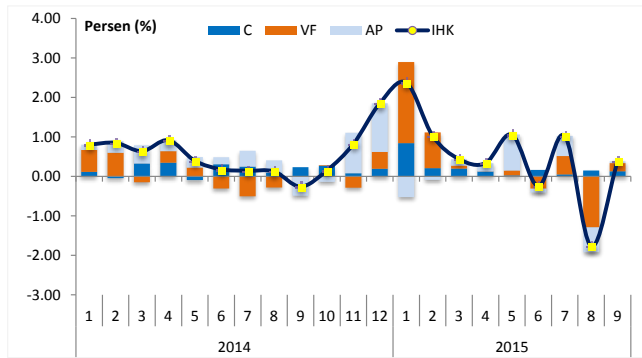
Perkembangan inflasi Kota Ambon menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Inflasi Kota Ambon pada triwulan laporan mencapai 7,64% (yoy), menurun dibanding triwulan sebelumnya sebesar 8,06% (yoy). Pencapaian inflasi bulanan tertinggi pada triwulan laporan terjadi pada bulan Juli yang mencapai 1.03% (mtm) seiring dengan masuknya periode Hari Raya Lebaran, sedangkan inflasi bulanan terendah terjadi pada bulan Agustus dimana terjadi deflasi sebesar 1.77% (mtm) seiring dengan normalisasi harga paska Lebaran. Secara umum, penurunan laju inflasi tahunan Kota Ambon pada triwulan laporan dipengaruhi oleh menurunnya inflasi pada kelompok inti dan kelompok *administered prices* (AP). Ekspektasi inflasi serta sentimen dari kondisi ekonomi nasional ditengarai ikut melemahkan ekspektasi konsumsi secara regional sehingga berimplikasi pada menurunnya harga pada kelompok inti. Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok *administered prices* (AP) juga mereda seiring dengan menurunnya harga pada kelompok transportasi paska berakhirnya *peak-season* Lebaran pada awal periode laporan.

Pada bulan Juli, laju inflasi bulanan tercatat sebesar 1.03% (mtm) atau 9.02% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat deflasi 0.25% (mtm) atau 8.06% (yoy). Meningkatnya laju inflasi Kota Ambon didorong oleh tingginya tarif angkutan udara dan kenaikan harga pada beberapa komoditas sayuran seperti kangkung, kacang panjang dan daun melinjo sebagai dampak dari meningkatnya permintaan dalam rangka kebutuhan Hari Raya Lebaran. Meski demikian, operasi pasar yang digelar oleh Pemkot Ambon serta pemenuhan stok yang dilakukan oleh distributor dalam rangka persiapan Lebaran, mampu menahan pergerakan harga beberapa kelompok bahan pangan ke level yang moderat. Berdasarkan disagregasinya, meningkatnya inflasi Juli didorong oleh komponen AP dengan andil inflasi bulanan sebesar 0.51% (mtm), diikuti oleh komponen VF dan komponen inti. Komoditas yang menjadi penarik inflasi ke atas Kota Ambon pada bulan Juli adalah angkutan udara, ikan layang, kangkung, kacang panjang dan daun melinjo.

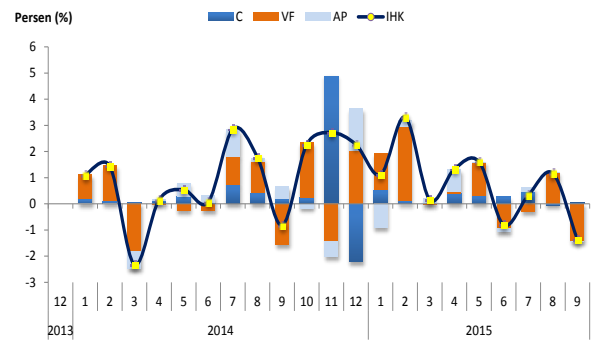
Sedangkan, komoditas penarik inflasi ke bawah Kota Ambon pada bulan Juli antara lain ikan selar, bawang merah, ikan kembung, ikan tongkol dan ikan cakalang.

Pada bulan Agustus, terjadi deflasi bulanan sebesar 1.77% (mtm) atau 6.95% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi 1.03% (mtm) atau 9.02% (yoy). Deflasi pada Kota Ambon didorong oleh deflasi pada komponen VF dan AP masing-masing sebesar 5.55% (mtm) dan 2.78% (mtm). Sedangkan, pada kelompok inti masih tercatat inflasi sebesar 0.28% (mtm), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat inflasi 0.10% (mtm). Deflasi pada kelompok VF berasal dari menurunnya harga kelompok ikan segar dan bumbu-bumbuan seiring meningkatnya pasokan akibat cuaca yang kondusif untuk melaut serta masuknya masa panen bawang merah dan cabai merah di beberapa sentra. Sementara itu, deflasi pada komponen AP didorong oleh menurunnya tarif angkutan udara seiring menurunnya permintaan. Di sisi lain, laju inflasi komponen inti tercatat meningkat didorong oleh kenaikan harga pada kelompok ikan diawetkan, perlengkapan rumah tangga, sandang dan pendidikan akibat meningkatnya permintaan dan tren penguatan nilai tukar dollar. Komoditas yang menjadi penarik inflasi ke atas Kota Ambon pada bulan Agustus adalah kacang panjang, ikan selar, daun singkong, ikan cakalang asap dan beras. Sedangkan, komoditas penarik inflasi ke bawah Kota Ambon pada bulan Agustus adalah ikan layang, angkutan udara, bawang merah, cabai merah dan ikan kembung.

Pada bulan September, Kota Ambon mengalami inflasi bulanan sebesar 0.38% (mtm) atau 7.64% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 1.77% (mtm) atau 6.95% (yoy). Meningkatnya inflasi pada Kota Ambon didorong oleh inflasi baik pada komponen VF, inti maupun AP, yang masing-masing mengalami inflasi sebesar 0.91% (mtm), 0.24% (mtm) dan 0.22% (mtm). Inflasi pada komponen VF terutama bersumber dari komoditas beras, daun singkong dan cabai rawit akibat kekeringan yang terjadi di beberapa sentra produksi. Selain itu, daging ayam ras juga tercatat masih menjadi penyumbang inflasi akibat adanya keterlambatan pengiriman yang disebabkan tingginya gelombang laut di perairan Maluku. Di sisi lain, meskipun komoditas ikan segar melimpah, namun harga ikan layang masih terpantau tinggi. Hal ini disebabkan para nelayan maupun produsen cenderung menangkap ikan jenis tuna dan cakalang karena mampu memberikan nilai ekonomis lebih tinggi sehingga ketersediaan ikan layang di pasar cenderung menurun. Sementara itu, inflasi pada komponen inti didorong oleh meningkatnya harga pada beberapa komoditas, seperti emas perhiasan, bahan bangunan dan barang perlengkapan rumah tangga sebagai dampak dari meningkatnya harga emas dunia dan transmisi dari pelemahan nilai rupiah. Sedangkan, inflasi pada komponen AP didorong oleh meningkatnya harga pada tarif angkutan udara akibat meningkatnya permintaan dalam rangka "pulang kampung" dan perayaan Hari Raya Idul Adha. Komoditas yang menjadi penarik inflasi ke atas Kota Ambon pada bulan September adalah ikan layang, beras, daun singkong, cabai rawit dan angkutan udara. Sedangkan, komoditas penarik inflasi ke bawah Kota Ambon pada bulan September adalah kangkung, ikan cakalang, kacang panjang, bawang merah dan sawi hijau.



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 2-3 Inflasi dan Andil Disagregasi Bulanan (mtm) Kota Ambon



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 2-4 Inflasi dan Andil Disagregasi Bulanan (mtm) Kota Tual

2.2.2 Inflasi Kota Tual

Sejalan dengan Kota Ambon, inflasi tahunan pada Kota Tual juga mengalami penurunan. Inflasi Kota Tual pada triwulan laporan sebesar 13,67% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 17,83% (yoy). Pencapaian inflasi bulanan tertinggi pada triwulan III-2015 terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 1,16% (mtm) akibat tingginya gelombang laut di perairan Maluku sehingga menghambat distribusi terutama bahan makanan ke Kota Tual. Hal ini berdampak pada tingginya inflasi *volatile foods* Kota Tual yang mencapai 1,18% (mtm) yang didorong oleh tingginya harga kelompok sayuran, buah-buahan dan ikan segar. Sementara itu, inflasi bulanan terendah terjadi pada bulan September yang mengalami deflasi 1,41% (mtm) didorong oleh deflasi pada komponen VF sebesar 3,79% (mtm) akibat melimpahnya pasokan ikan segar yang ditengarai sebagai dampak positif dari kebijakan moratorium oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta fenomena el nino. Berdasarkan disagregasinya, penurunan laju inflasi tahunan Kota Tual didorong oleh semua komponen, baik komponen *volatile foods*, komponen inti maupun komponen *administered prices*.

Inflasi Kota Tual pada Juli tercatat sebesar 0,31% (mtm) atau 14,93% (yoy), meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0,80% (mtm) atau 17,83% (yoy). Meningkatnya inflasi Juli didorong oleh meningkatnya inflasi pada komponen inti, terutama pada subkelompok rekreasi (biaya saluran TV), bahan bangunan (kayu balokan), sandang (baju anak) dan minuman seiring dengan meningkatnya ekspektasi inflasi serta konsumsi masyarakat memasuki Hari Raya Lebaran. Di sisi lain, inflasi pada komponen VF mengalami penurunan dan tercatat deflasi 2,45% (mtm) didorong oleh deflasi bahan makanan terutama ikan segar seiring dengan cuaca yang kondusif untuk melaut serta ditengarai sebagai dampak positif dari kebijakan moratorium oleh KKP sejak tahun 2014 lalu. Komoditas pemicu inflasi Kota Tual pada bulan Juli adalah bayam, ikan mumar, ikan kakap putih, ikan bubara dan rokok kretek filter. Sedangkan, komoditas pemicu deflasi antara lain Ikan teri, ikan kembung, ikan cakalang, cabai rawit dan bawang merah.

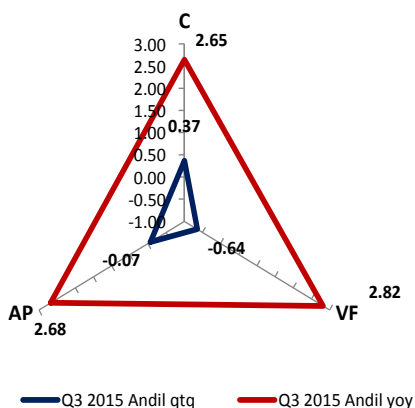
Pada bulan Agustus, Kota Tual mengalami laju inflasi bulanan sebesar 1.16% (mtm), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0.31% (mtm). Meningkatnya inflasi bulanan Tual didorong oleh meningkatnya inflasi pada kelompok VF yang tercatat sebesar 1.18% (mtm). Inflasi pada komponen VF didorong oleh meningkatnya harga pada kelompok sayuran, buah-buahan dan ikan segar yang mengalami

inflasi mencapai 9.84% (mtm), 19.09% (mtm) dan 5.76% (mtm) akibat terbatasnya pasokan ke Kota Tual. Sementara itu, inflasi AP tercatat sebesar 0.15% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0.94% (mtm) yang berasal dari menurunnya tarif angkutan udara. Di sisi lain, komponen inti tercatat mengalami deflasi 0.11% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1.05% (mtm) seiring dengan terjaganya ekspektasi inflasi. Komoditas penarik inflasi ke atas Tual pada bulan Agustus antara lain kacang panjang, ikan selar, daun singkong, ikan cakalang asap dan beras. Sedangkan, komoditas penarik inflasi ke bawah adalah ikan teri, mie kering instant, ikan kakap putih, ketela rambat dan talas keladi.

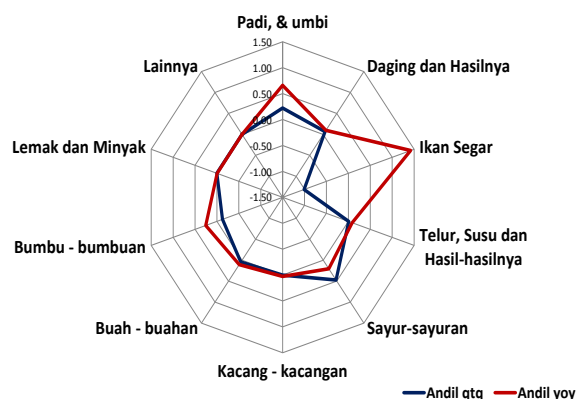
Kota Tual pada bulan September mengalami deflasi bulanan sebesar 1.41% (mtm), menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1.16% (mtm). Deflasi pada Kota Tual terutama berasal dari deflasi pada komponen VF yang tercatat sebesar 3.79% (mtm) akibat melimpahnya pasokan ikan segar yang ditengarai sebagai dampak positif dari fenomena el-nino. Selain itu, masuknya periode panen di beberapa sentra menyebabkan beberapa sayuran dan bumbu-bumbuan seperti ketela pohon, bawang merah dan kangkung mengalami koreksi harga. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar 0.03% (mtm), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami deflasi 0.05% (mtm) yang berasal dari meningkatnya harga pada kelompok sandang dan bahan bangunan. Sedangkan, inflasi AP relatif stabil (inflasi 0.00% mtm). Kenaikan harga pada komoditas rokok akibat kenaikan cukai dapat diimbangi oleh penurunan harga pada tarif angkutan udara. Komoditas penarik inflasi ke atas Tual pada bulan September antara lain ikan layang, beras, daun singkong, cabai rawit dan angkutan udara. Sedangkan, komoditas penarik inflasi ke bawah adalah ikan mumar, ikan teri, ikan baronang, ketela pohon dan bawang merah.

2.3 Analisis Disagregasi Inflasi Provinsi Maluku

Secara tahunan, perlambatan laju inflasi pada komponen inti dan *administered prices* menjadi faktor utama pendorong perlambatan laju inflasi Maluku pada triwulan laporan. Pada triwulan III-2015, laju inflasi komponen inti tercatat sebesar 4,93% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,54% (yoy). Menurunnya inflasi komponen inti di tengah periode Hari Raya Idul Fitri menunjukkan bahwa permintaan masyarakat masih relatif terbatas ditengarai akibat daya beli masyarakat yang masih belum menunjukkan pemulihan sebagai sentimen dari perekonomian nasional serta fluktuasi nilai rupiah yang berdampak pada ekonomi regional. Sementara itu, inflasi AP juga mengalami penurunan dengan inflasi tahunan sebesar 12,28% (yoy). Koreksi tarif angkutan udara pada akhir triwulan laporan seiring dengan dimulainya periode *low season* paska Idul Fitri cukup signifikan dalam menekan laju inflasi tahunan komponen *administered prices*. Meski mengalami penurunan, laju inflasi Maluku masih tergolong tinggi didorong oleh meningkatnya inflasi komponen *volatile foods*. Meningkatnya permintaan terhadap bahan makanan memasuki Hari Raya Lebaran serta cuaca buruk pada awal periode laporan mendorong kenaikan harga pada beberapa kelompok makanan, terutama sayuran dan daging, meskipun beberapa kelompok makanan telah mengalami penurunan harga pada bulan Agustus. Namun, memasuki bulan September, inflasi bahan makanan kembali meningkat signifikan, terutama pada kelompok beras, cabai dan bawang merah akibat dampak el nino yang menyebabkan beberapa daerah di Jawa mengalami kekeringan sehingga mengurangi pasokan ke Maluku.



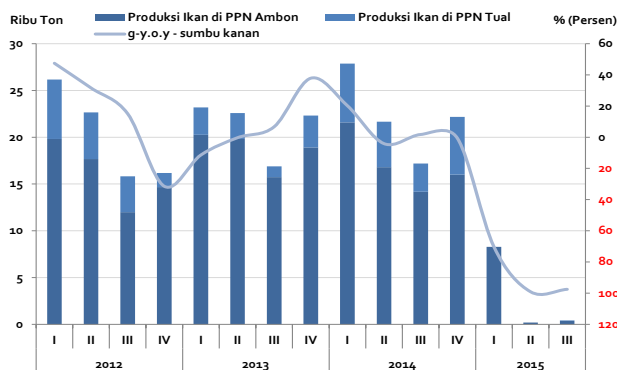
Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 2-5 Andil Disagregasi Inflasi Maluku Triwulan III-2015



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 2-6 Andil Komoditas *Volatile Food* Provinsi Maluku Tw III-2015

2.3.1 Komponen *Volatile Food*

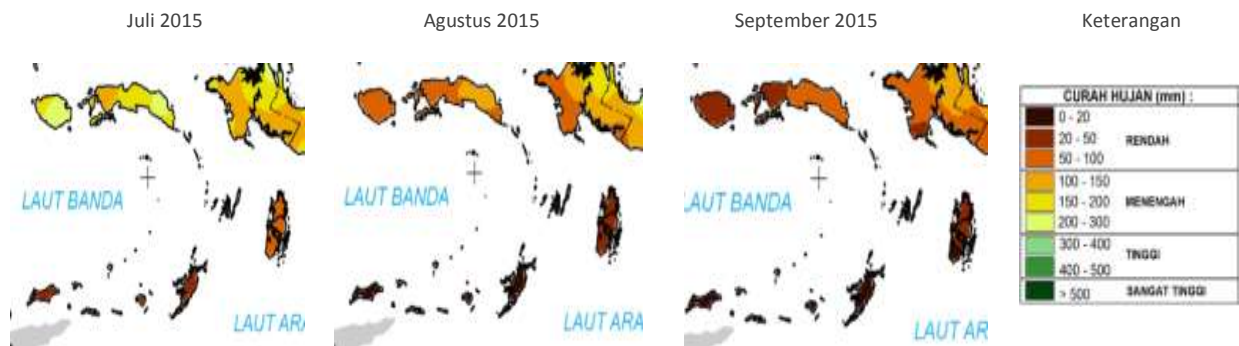
Secara tahunan, tingginya inflasi Maluku pada triwulan laporan didorong oleh meningkatnya laju inflasi komponen *volatile food* (VF). Laju inflasi VF Maluku pada triwulan laporan tercatat sebesar 12.29% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 11.04% (yoy). Meningkatnya inflasi tahunan VF didorong oleh hampir seluruh kelompok bahan makanan, terutama sub kelompok ikan segar. Kenaikan indeks harga kelompok ikan segar secara signifikan pada periode awal tahun 2015 terkait dengan kebijakan pengetatan perizinan penangkapan ikan oleh KKP pada sektor perikanan. Namun, kebijakan KKP ini mulai dirasakan dampak positifnya dari meningkatnya hasil tangkapan nelayan pada periode triwulan laporan, yang ditunjukkan dengan deflasi untuk kelompok ikan segar sebesar 17,12% (qtq) sekaligus menjadi faktor utama penurunan inflasi triwulanan Provinsi Maluku. Selain itu berdasarkan hasil FGD dengan BMKG serta Dinas Kelautan dan Perikanan, fenomena el nino di Maluku justru memberikan dampak yang positif terhadap kinerja sektor perikanan, yaitu mendorong terjadinya proses *upwelling* serta mengurangi intensitas angin dan curah hujan, yang pada gilirannya mempermudah nelayan tradisional dengan kapal-kapal kecil melaut. Hal ini terlihat dari mulai meningkatnya hasil pendaratan ikan di PPN Ambon maupun PPN Tual memasuki periode triwulan III-2015, meskipun masih jauh di bawah pencapaian sebelum adanya kebijakan moratorium.



Sumber: PPN Ambon dan PPN Tual; diolah
Grafik 2-7 Perkembangan Pendaratan Ikan PPN Ambon dan PPN Tual

Kelompok padi-padian juga menjadi salah satu penyumbang utama meningkatnya laju inflasi tahunan VF di Maluku. Kelompok padi-padian tercatat mengalami inflasi sebesar 10,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 7,11% (yoy). Kenaikan inflasi padi-padian, terutama didorong oleh meningkatnya harga beras pada periode akhir laporan yang disebabkan berkurangnya pasokan beras dari luar daerah yang ditengarai sebagai dampak dari el nino dan belum adanya kebijakan impor, meskipun di beberapa sentra dalam daerah seperti Buru dan Maluku Tengah telah memasuki masa panen. Alhasil, kebutuhan beras masyarakat Maluku harus dipenuhi dari dalam daerah, mengingat dampak el nino di Maluku relatif terbatas.

Sementara itu, sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, inflasi kelompok sayuran mengalami puncaknya seiring dengan masuknya musim hujan serta periode *seasonal* Idul Fitri. Inflasi sayur-sayuran di Maluku mencapai 6,75% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,28% (yoy). Peningkatan harga sayuran signifikan terjadi pada periode awal laporan, dimana harga rata-rata bulanan Juli melonjak tinggi seiring dengan tingginya permintaan dalam rangka Hari Raya Idul Fitri serta cuaca buruk yang terjadi pada awal bulan. Hal ini mengakibatkan inflasi bulanan sayuran pada Juli mencapai 13,60% (mtm), meningkat signifikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,31% (mtm). Tingginya inflasi sayuran berlanjut hingga bulan Agustus 2015 dimana pasokan sayuran cukup minim di tengah padatnya penyelenggaraan kegiatan berskala besar seperti HUT RI, HUT Provinsi Maluku dan HUT Kota Ambon yang mengakibatkan inflasi sayuran pada bulan Agustus tercatat sebesar 10,02% (mtm). Memasuki September, terjadi panen untuk komoditas sayuran seiring dengan cuaca yang mulai kondusif. Hal ini berdampak pada melimpahnya pasokan sayuran sehingga sayuran tercatat mengalami deflasi 7,54% (mtm) pada bulan September.



Sumber: BMKG

Grafik 2-8 Curah Hujan Maluku triwulan III-2015

Selain itu, Periode Idul Fitri maupun Idul Adha juga ikut mendorong kenaikan inflasi pada kelompok daging, telur, susu dan hasil-hasilnya. Meskipun pasokan ayam beku maupun telur ayam mencukupi, namun faktor *seasonal* menjelang perayaan hari besar keagamaan, terutama Idul Adha, digunakan oleh para pedagang untuk mencari keuntungan dengan menaikkan harga jual. Terlebih lagi, pada bulan September perairan wilayah Maluku mengalami kondisi gelombang tinggi sehingga menyebabkan pasokan daging ayam dari Makassar mengalami keterlambatan. Di samping itu, meningkatnya permintaan daging sapi dalam rangka Hari Raya Kurban, menyebabkan inflasi untuk kelompok daging mencapai 5,79% (mtm) pada bulan September. Secara tahunan, inflasi kelompok daging dan hasil-hasilnya mencapai 10,76% (yoy), meningkat dibandingkan

triwulan sebelumnya sebesar 5,86% (yoy). Sedangkan, inflasi pada kelompok telur, susu dan hasil-hasilnya mencapai 4,74% (yoy), meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,38% (yoy).

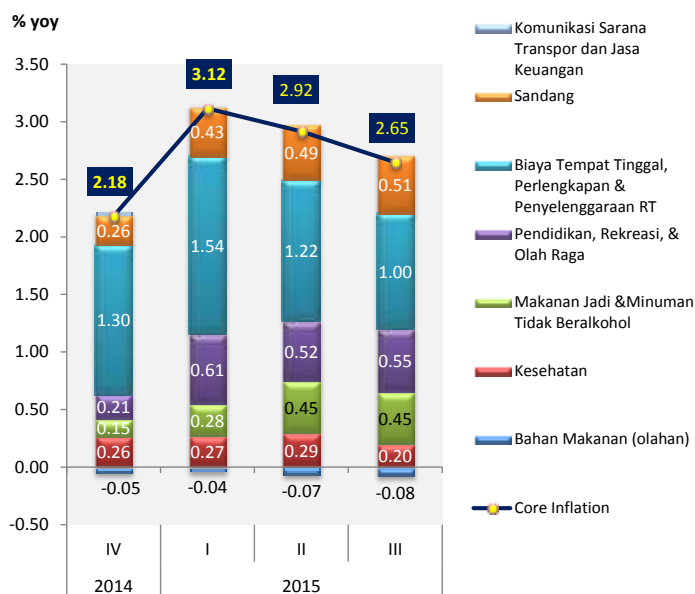
Masuknya periode panen bawang di beberapa wilayah di Jawa maupun Maluku dan peningkatan produksi mampu menurunkan laju inflasi kelompok bumbu-bumbuan pada triwulan laporan. Inflasi untuk kelompok bumbu-bumbuan tercatat sebesar 13,28% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 25,25% (yoy). Kestabilan pasokan dan kecukupan stok di level pedagang mampu menjaga harga bumbu-bumbuan. Ditambah lagi, masuknya periode panen bawang merah di sentra produksi Jawa maupun Bima (NTB) serta bawang merah lokal di Kota Ambon mampu memenuhi permintaan selama periode Idul Fitri. Bahkan, kelompok bumbu-bumbuan tercatat mengalami deflasi pada bulan Juli dan Agustus. Namun pada bulan September, kekeringan yang dialami oleh petani cabai di beberapa sentra produksi menyebabkan harga cabai rawit melonjak cukup tajam dan tercatat mengalami inflasi sebesar 17,67% (mtm) di Kota Ambon.

2.3.2 Komponen *Core Inflation*

Perlambatan laju inflasi Maluku pada triwulan laporan didorong oleh menurunnya laju inflasi komponen inti seiring dengan ekspektasi inflasi dan permintaan domestik yang relatif terbatas. Inflasi inti Maluku pada triwulan laporan tercatat sebesar 4,93% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,54% (yoy). Menurunnya inflasi inti didorong oleh hampir seluruh kelompok komoditas, diantaranya makanan jadi dan minuman tidak beralkohol; sandang; dan kesehatan. Di tengah periode perayaan Hari Raya Lebaran dan berbagai kegiatan berskala besar di Provinsi Maluku, inflasi pada kelompok inti justru mengalami penurunan. Hal ini ditengarai akibat ekspektasi inflasi dan permintaan yang masih terbatas seiring dengan daya beli masyarakat yang masih belum menunjukkan pemulihan. Sentimen dari kondisi perekonomian nasional maupun global serta fluktuasi nilai rupiah diperkirakan ikut mempengaruhi kondisi ekonomi regional sehingga berdampak pada pelemahan daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari menurunnya Indeks Keyakinan Konsumen berdasarkan hasil Survei Konsumen, yang bersumber dari menurunnya Indeks Kondisi Ekonomi maupun Indeks Ekspektasi Konsumen.

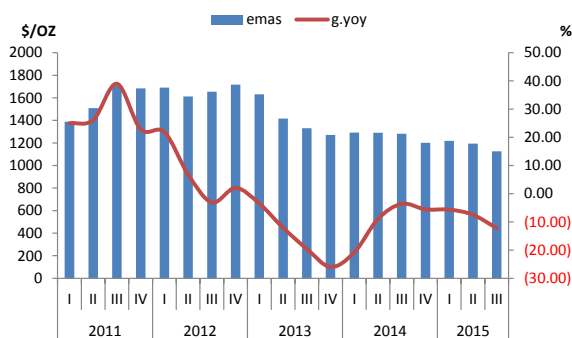
Sementara itu, penurunan inflasi juga terjadi pada kelompok perumahan. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya harga pada kelompok bahan bangunan, terutama semen, dimana harga semen di Kota Ambon mengalami penurunan dari harga Rp 66.000 per karung menjadi Rp 63.000 per karung, sehingga pada gilirannya berpengaruh terhadap pembentukan harga kelompok perumahan.

Penurunan pada laju inflasi inti juga disebabkan menurunnya harga pada emas perhiasan. Tingginya kebutuhan uang tunai dalam rangka hari besar keagamaan direspon dengan aksi jual emas perhiasan pada level yang stabil. Meningkatnya kebutuhan uang tunai di masyarakat menjelang Hari Raya Lebaran dan perkembangan harga emas dunia yang masih menunjukkan pelemahan mampu menjaga harga emas perhiasan pada level yang moderat. Hal ini ditunjukkan dengan menurunnya laju inflasi emas perhiasan di Kota Ambon pada triwulan laporan, yaitu tercatat 1,44% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,80% (yoy).

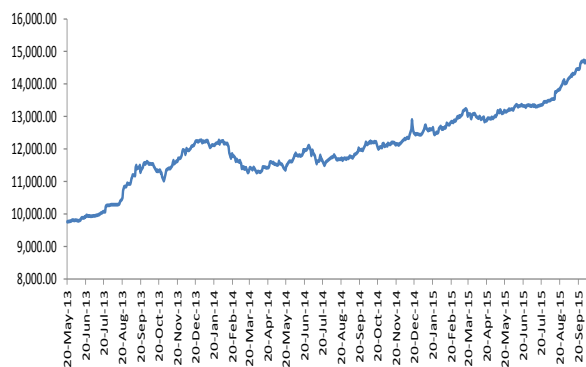


Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 2-9 Andil Inflasi Tahunan Komponen Inflasi Inti Provinsi Maluku

Di sisi lain, beberapa kelompok inflasi inti masih mengalami peningkatan harga disebabkan faktor *seasonal* dan laju *imported inflation*. Beberapa kelompok yang mengalami kenaikan diantaranya tembakau dan minuman beralkohol yang didorong oleh meningkatnya cukai rokok; perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, didorong oleh meningkatnya harga barang rumah tangga yang memiliki *content impor* cukup tinggi seperti barang elektronik (TV, AC, kulkas, mesin cuci) seiring dengan penguatan nilai dolar; serta kelompok pendidikan seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap perlengkapan/peralatan pendidikan dalam rangka tahun ajaran baru yang hampir bertepatan dengan Hari Raya Lebaran.



Sumber: Bloomberg
 Grafik 2-10 Harga Emas Internasional



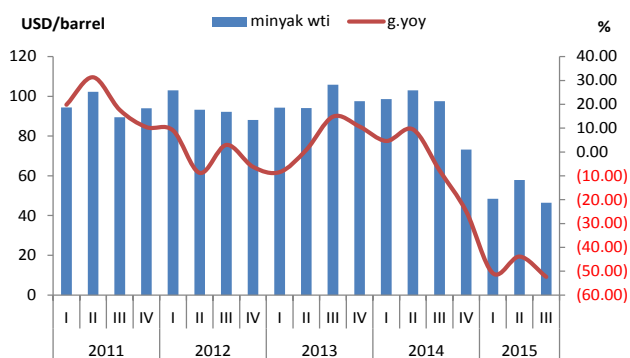
Sumber: Bank Indonesia
 Grafik 2-11 Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar (IJSOR)

2.3.3 Komponen Administered Prices

Menurunnya laju inflasi komponen *administered prices* (AP) juga menjadi salah satu pendorong meredanya inflasi tahunan Provinsi Maluku pada triwulan laporan. Laju inflasi AP pada triwulan laporan tercatat sebesar 12.28% (yoy), menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 15.25% (yoy). Kebijakan

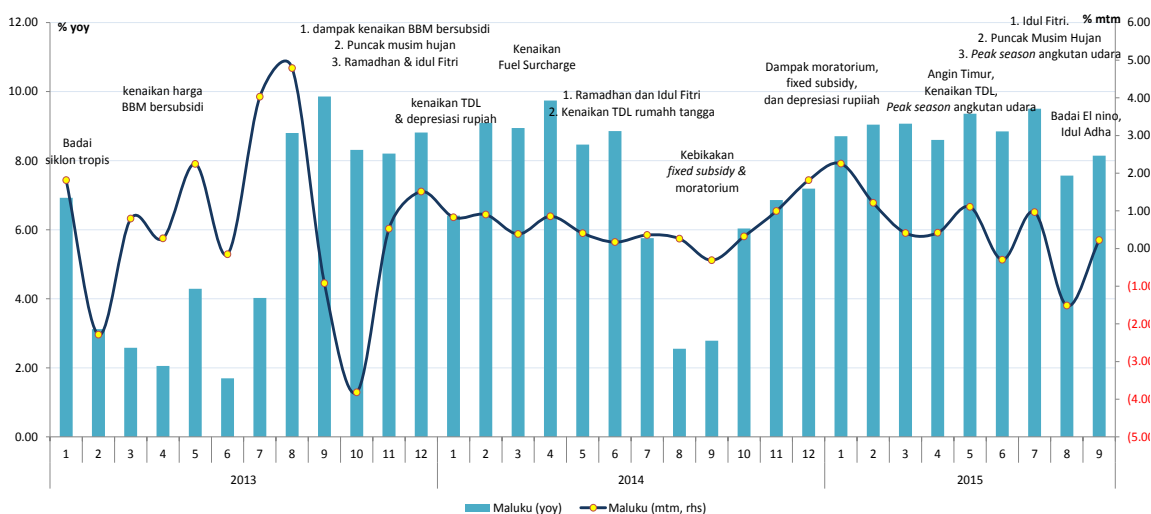
pemerintah untuk menurunkan harga jual gas elpiji 12 kg sejak tanggal 16 September 2015 untuk Kota Ambon dari Rp 213.000/tabung menjadi Rp 206.500/tabung menjadi salah satu faktor menurunnya laju inflasi komponen AP. Hal ini menyebabkan komoditas bahan bakar rumah tangga mengalami deflasi pada bulan September.

Selain itu, perlambatan pada laju inflasi AP juga didorong oleh koreksi tarif angkutan udara pada akhir triwulan laporan. Dimulainya periode *low season* angkutan udara paska puncak permintaan di awal triwulan laporan memberikan koreksi cukup signifikan dalam menekan laju inflasi tahunan komponen AP di akhir triwulan laporan, dimana pada bulan Juli inflasi angkutan udara mencapai 11,26% (mtm) yang kemudian mereda hingga bulan September. Menurunnya tarif angkutan udara juga sejalan dengan menurunnya harga avtur yang mengacu pada harga minyak dunia. Berdasarkan hasil FGD dengan Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, tarif angkutan udara dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jumlah permintaan, harga avtur (minyak) dunia dan nilai tukar rupiah terhadap US Dollar.



Sumber: Bloomberg
Grafik 2-12 Perkembangan Harga Minyak Dunia

2.4 Realisasi Inflasi Triwulan III 2015 dibanding Pola Historis

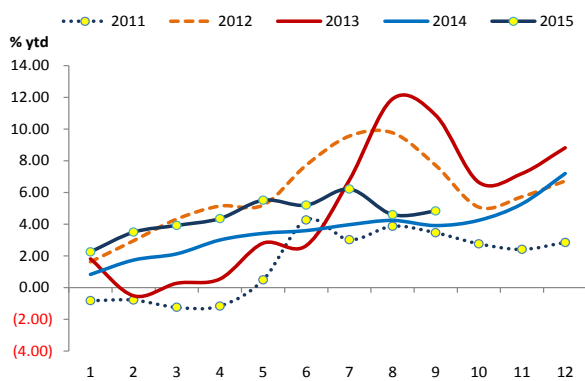


Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah

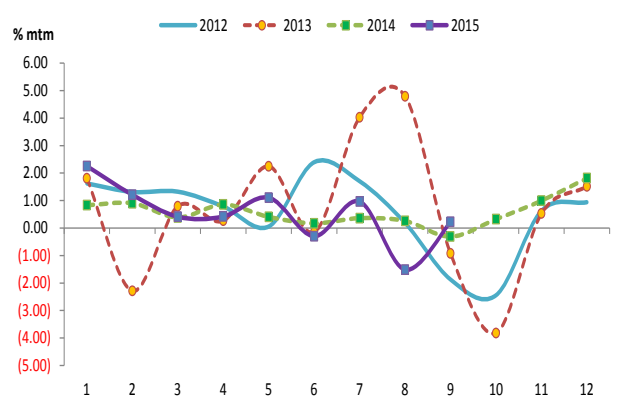
Grafik 2-13 Event Analysis Inflasi Provinsi Maluku

Secara historis, tingginya laju inflasi Provinsi Maluku disebabkan faktor cuaca, tingginya ketergantungan terhadap daerah lain dan adanya *shock* kebijakan dari pemerintah. Rendahnya kemandirian pangan menjadikan Provinsi Maluku rentan terhadap *shock*, baik dari sisi permintaan maupun penawaran. Sebagian besar komoditas Maluku, terutama komoditas penyumbang inflasi seperti beras, bumbu-bumbuan, telur dan daging ayam didatangkan dari daerah lain, seperti Pulau Jawa (melalui Surabaya) dan Sulawesi (melalui Makassar dan Manado). Terlebih lagi apabila terdapat *shock* yang bersumber dari sisi permintaan, seperti adanya perayaan kegiatan berskala besar maupun faktor musiman Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Tingginya ketergantungan Provinsi Maluku terhadap pasokan barang dari daerah lain juga tercermin dari perkembangan net ekspor antar daerah Maluku yang mencatatkan kondisi “net-impor” dan dalam tren yang meningkat.

Pencapaian inflasi Maluku pada triwulan laporan mulai menunjukkan perbaikan kinerja, setelah sebelumnya sempat melonjak tinggi pada awal tahun akibat pengetatan aturan penangkapan ikan. Kecenderungan inflasi Maluku yang menurun terlihat dari pencapaian inflasi tahun kalender Maluku pada triwulan laporan yaitu sebesar 4,84% (ytd), lebih rendah dari rata-rata inflasi tahun kalender Maluku pada triwulan III dalam 5 tahun terakhir sebesar 6,78% (ytd). Hingga akhir triwulan III, inflasi tahun kalender (ytd) Maluku tahun 2015 masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2011 dan 2014, namun lebih rendah dari tahun 2012-2013. Sementara apabila dilihat secara bulanan, laju inflasi tahun 2015 cenderung menurun sejak awal tahun. Selanjutnya, berbagai aturan kebijakan penangkapan ikan oleh KKP ditengarai mulai dirasakan manfaatnya oleh pelaku usaha perikanan, khususnya pada nelayan-nelayan tradisional. Meskipun pada awalnya dampak dari kebijakan ini memberikan pengaruh negatif pada jangka pendek yang menyebabkan inflasi kalender Maluku melonjak tinggi, khususnya pada triwulan I dan II 2015 mencapai 3,92% (ytd) dan 5,20% (ytd), lebih tinggi dari rata-rata historis 5 tahun terakhir sebesar 1,66% (ytd) dan 4,27% (ytd), namun kini hasil positifnya telah dirasakan. Stok dan pasokan ikan segar di Maluku mulai melimpah, khususnya pada 2 bulan terakhir. Hal ini terlihat dari pencapaian inflasi Maluku yang mencatatkan deflasi pada bulan Juni dan Agustus, dimana salah satu pendorong terjadinya deflasi berasal dari kelompok ikan segar yang tercatat deflasi 6,76% (mtm) dan 19,46% (mtm). Pada bulan Juli pun inflasi ikan segar Maluku tercatat cukup rendah di tengah maraknya penyelenggaraan Hari Raya Lebaran, yakni hanya sebesar 0,99% (mtm).



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah
Grafik 2-14 Tren Inflasi kalender (ytd) Provinsi Maluku



Sumber: BPS Provinsi Maluku, diolah
Grafik 2-15 Tren Inflasi Bulanan (mtm) Provinsi Maluku

2.5 Kegiatan Pengendalian Inflasi di Provinsi Maluku

Selama Triwulan III-2015, Tim Pengendali Inflasi Daerah di Provinsi Maluku telah melakukan berbagai kegiatan guna mendukung tercapainya target inflasi Provinsi Maluku. Beberapa hal dilakukan oleh TPID di Provinsi Maluku diantaranya adalah penyelenggaraan Pasar Murah dalam rangka menyambut Idul Fitri. Pasar Murah digelar oleh Disperindag Provinsi Maluku dengan menjual menyediakan berbagai bahan pokok yang dijual dengan harga lebih murah dari harga di pasar tradisional. Pasar murah ini dibuka langsung oleh Gubernur Maluku. Adapun kebutuhan pokok yang dijual yaitu telur ayam, gula pasir, beras, minyak goreng dan tepung terigu.

Selain Disperindag Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon juga menggelar pasar murah, yang diinisiasikan oleh Disperindag Kota Ambon. Pelaksanaan pasar murah ini melibatkan sejumlah distributor sembako di Kota Ambon dan pihak Bulog Divre Maluku. Jenis sembako yang dijual antara lain tepung terigu, beras, susu, mentega, minyak goreng, minuman dan kue kering. Selain melibatkan distributor, Pemkot Ambon juga melibatkan pasar swalayan untuk penjualan minuman dan kue lebaran. Pasar murah ini digelar pada tanggal 6 sampai 11 Juli 2015.

Selanjutnya, dalam rangka menjaga ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Lebaran, TPID Provinsi Maluku juga melakukan sidak ke beberapa distributor Kota Ambon. Sidak dipimpin langsung oleh Sekretaris TPID Prov. Maluku, diikuti sejumlah unsur TPID Prov. Maluku seperti Bank Indonesia serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Maluku. Lokasi sidak difokuskan pada distributor ayam potong terbesar dan distributor sembako terbesar di Kota Ambon. Hasil sidak menunjukkan bahwa stok kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) maupun telur dan daging ayam di Kota Ambon cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya, baik menjelang maupun sesudah Lebaran. Bahkan, harga daging ayam di Kota Ambon dan sekitarnya relatif lebih murah dari kota-kota lain di Pulau Jawa.

TPID Se-Maluku juga melaksanakan Rakor II 2015 di Kota Tual pada tanggal 11 Agustus 2015. Adapun agenda dalam rakor tersebut diantaranya adalah penyampaian program kerja TPID masing-masing Kab/kota dan peninjauan kerjasama antar wilayah TPID. Dalam rakor tersebut, diikuti oleh hampir seluruh perwakilan dari TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota, antara lain TPID Prov. Maluku, TPID Kota Ambon, TPID Kota Tual, TPID Kab. SBB, TPID Kab. Buru, TPID Kab. Buru Selatan dan TPID Kab. Maluku Tenggara. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada rakor ini dapat dilihat pada tabel di bawah pada no. 4.

Tabel 2-4 Kegiatan TPID triwulan III-2015

No.	Waktu	Kegiatan	Agenda/Rekomendasi
1.	2-4 Juli 2015	Pasar Murah oleh Disperindag Provinsi	1. Disperindag Provinsi Maluku mengadakan pasar murah dalam rangka menyambut Idul Fitri 1436 H. Pasar murah berlangsung selama 3 hari. Adapun kebutuhan pokok yang dijual yaitu telur ayam, gula pasir, beras, minyak goeng dan tepung terigu.

2.	6-11 Juli 2015	Pasar Murah oleh Pemkot Ambon	1. Pemkot Ambon juga menggelar pasar murah, yang diinisiasikan oleh Disperindag Kota Ambon. Pelaksanaan pasar murah melibatkan sejumlah distributor sembako di Kota Ambon dan pihak Bulog Divre Maluku. Jenis sembako yang dijual antara lain tepung terigu, beras, susu, mentega, minyak goreng, minuman dan kue kering. Selain melibatkan distributor, Pemkot Ambon juga melibatkan pasar swalayan untuk penjualan minuman dan kue lebaran. Pasa murah digelar di Kelurahan Silale dan Negeri Batumerah.
3.	10 Juli 2015	Sidak Distributor	1. TPID Provinsi Maluku melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa distributor di Kota Ambon. Sidak dilakukan untuk memantau secara langsung perkembangan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1436 H. Hasil sidak menunjukkan bahwa stok kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako) maupun telur dan daging ayam di Kota Ambon cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Ambon dan sekitarnya, baik menjelang maupun sesudah Lebaran. Bahkan, harga daging ayam di Kota Ambon dan sekitarnya relatif lebih murah dari kota-kota lain di Pulau Jawa.
4.	11 Agustus 2015	Rapat Koordinasi ke-2 TPID Se-Maluku 2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. TPID Se-Maluku berkomitmen untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pada masing-masing wilayah untuk mengatasi permasalahan secara multidimensional sehingga target inflasi Maluku dapat tercapai 2. Segera menindaklanjuti program-program yang telah direncanakan oleh masing-masing TPID Kota/Kabupaten, memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan upaya pengendalian inflasi, seperti mempercepat penyediaan infrastruktur, penyediaan sarana dan prasarana transportasi guna mobilisasi barang maupun jasa, membentuk tim yang difasilitasi oleh Pemprov untuk melakukan pengkajian lebih dalam terhadap penyebab inflasi di Kota Tual serta penyelesaian permasalahan infrastruktur jalan Namlea-Namrole 3. TPID Kabupaten non IHK segera melakukan koordinasi dengan BPS di wilayah masing-masing untuk melakukan persiapan perhitungan SBH pada tahun 2017 4. TPID Kabupaten/Kota yang belum memiliki APPS untuk segera membentuk APPS dimaksud 5. TPID diharapkan dapat melakukan peninjauan kerjasama perdagangan komoditas penyumbang inflasi

BAB III. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

3.1 Perkembangan Perbankan dan Stabilitas Sistem Keuangan

3.1.1 Perkembangan Perbankan Provinsi Maluku

Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Utama Perbankan (Bank Umum dan BPR) di Maluku

Indikator Perbankan Maluku	2013				2014				2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Aset	13.29	13.78	14.18	13.33	14.13	15.21	16.13	14.09	16.85	16.75	16.51
Grow th (% yoy)	5.63	4.34	5.72	5.06	6.31	10.34	13.74	5.65	19.27	10.15	2.36
2. DPK	8.50	8.56	8.99	9.59	9.50	10.19	10.73	10.74	11.10	11.80	12.05
Grow th (% yoy)	16.96	10.83	13.82	13.01	11.81	18.98	19.41	11.96	16.76	15.85	12.33
3. Kredit Lokasi Proyek (Rp Triliun)	7.09	7.63	8.06	8.33	8.39	8.62	8.85	9.04	9.16	9.58	9.82
Grow th (% yoy)	19.36	22.15	23.90	21.74	18.37	12.87	9.81	8.46	9.16	11.19	10.90
4. Kredit Lokasi Bank (Rp Triliun)	6.29	6.75	7.05	7.30	7.40	7.65	7.84	8.02	8.12	8.55	8.73
Grow th (% yoy)	19.19	16.59	20.30	19.40	17.59	13.28	11.10	9.78	9.70	11.81	11.45
5. NPL Lokasi Proyek (Rp Triliun)	0.18	0.18	0.19	0.17	0.26	0.27	0.24	0.20	0.23	0.19	0.17
% NPL	2.58	2.42	2.38	2.02	3.08	3.11	2.75	2.25	2.48	1.94	1.76
6. LDR (%)	74.05	78.88	78.49	76.15	77.87	75.10	73.02	74.67	73.16	72.48	72.45
7. NIM* (%)	8.90	9.28	9.48	10.06	10.05	10.37	10.33	10.65	8.38	8.84	8.97
8. BOPO* (%)	67.63	68.98	66.41	66.68	64.89	67.00	66.81	81.22	75.77	74.13	73.17

*hanya NIM dan BOPO Bank Umum

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU) dan Laporan Berkala Bank Perkreditan Rakyat (LBBPR)

Pada triwulan III-2015, perbankan Provinsi Maluku mengalami perlambatan kinerja intermediasi, namun mencatatkan kenaikan profitabilitas dan perbaikan kualitas kredit. Indikator kinerja intermediasi utama, yaitu aset, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), penyaluran kredit, dan *loan-to-deposit* ratio (LDR), mengalami perlambatan. Namun demikian, penurunan kinerja intermediasi tersebut diikuti dengan penurunan non-performing loan (NPL), yang mengindikasikan perbaikan kualitas kredit. Selain itu, dari sisi profitabilitas, perbankan Maluku juga menunjukkan tren yang positif, yaitu turunnya rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), serta meningkatnya rasio pendapatan bunga bersih terhadap aset produktif (*net interest margin*/NIM).

3.1.1.1 Perkembangan Bank Umum

Tabel 3.2 Perkembangan Aset Bank Umum di Maluku

Kelompok Bank	Nominal (Rp Miliar)							growth (% yoy)						
	2014				2015			2014				2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III
Aset Bank Pemerintah	10,177	11,017	11,697	9,420	12,333	12,039	12,968	7.61	10.28	12.98	2.49	21.19	9.28	10.86
Aset Bank Swasta	3,037	3,215	3,408	3,493	3,360	3,523	3,539	(2.63)	6.97	14.48	11.18	10.65	9.56	3.85
Total	13,213	14,232	15,105	12,913	15,693	15,561	16,507	5.07	9.51	13.32	4.70	18.77	9.34	9.28

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)

Total aset bank umum pada triwulan III-2015 tercatat sebesar Rp 16,5 triliun, atau tumbuh 9,28% (yoy), melambat dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya yang mencapai 9,34% (yoy). Perlambatan (deselerasi) pertumbuhan didorong oleh melambatnya aset bank swasta, yang hanya tercatat 3,85% (yoy) dibanding triwulan lalu yang mencapai 9,56% (yoy). Perlambatan pertumbuhan bank swasta tak

lepas dari perlambatan penghimpunan DPK, seiring dengan penurunan suku bunga deposito. Sementara itu, tren melambatnya pertumbuhan aset masih tertahan oleh bank pemerintah, yang mengalami pertumbuhan aset yang meningkat (akselerasi) dari 9,28% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi 10,86% (yoy) pada triwulan laporan.

Tabel 3.3 Perkembangan DPK Bank Umum di Maluku

Kabupaten/Kota	Nominal (Rp Triliun)								g-DPK (% yoy)							
	2014				2015				2014				2015			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Maluku Tengah	0.76	0.87	0.85	1.02	0.91	1.49	1.01	21.17	37.45	33.80	38.14	19.61	71.51	18.44		
Maluku Tenggara	1.52	1.67	1.16	1.11	1.28	1.39	0.82	128.30	153.53	162.20	-12.77	-16.09	-16.64	-29.22		
Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya	0.28	0.30	1.01	0.91	1.08	1.23	1.35	-52.28	-49.82	26.46	195.50	283.54	305.65	33.25		
Buru & Buru Selatan	0.47	0.52	0.53	0.24	0.54	0.23	0.46	-4.81	0.26	11.30	-40.06	15.55	-56.66	-13.38		
Seram Bagian Barat	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.43	-28.29	-37.52	-35.55	12.89	8.22	6.66	315.35		
Seram Bagian Timur	0.21	0.25	0.25	0.20	0.28	0.33	0.33	16.31	58.37	30.17	32.61	33.78	32.69	32.15		
Kepulauan Aru	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.52	-75.26	-74.20	-75.88	18.75	15.08	10.91	583.00		
Kota Ambon	5.84	6.14	6.51	6.70	6.52	6.64	6.73	9.91	15.29	19.06	7.84	11.74	8.14	3.27		
Kota Tual	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.33	37.55	52.06	-96.91	37.92	51.52	20.70	3901.37		
PROVINSI MALUKU	9.25	9.92	10.50	10.41	10.79	11.49	11.96	11.60	19.02	19.99	12.19	16.75	15.84	14.80		

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)

Dari sisi penghimpunan DPK, bank umum di Provinsi Maluku mencatatkan total Rp 11,96 triliun dana terhimpun, atau tumbuh 14,80% (yoy) pada triwulan III-2015. Pertumbuhan ini lebih lambat dibanding triwulan sebelumnya, yang tercatat tumbuh sebesar 15,84% (yoy). Pertumbuhan DPK ini terutama ditopang oleh Kabupaten Seram Bagian Barat, yang tumbuh 315,35% (yoy) seiring dengan peningkatan komponen giro Pemerintah Daerah. Sementara pertumbuhan DPK tertahan oleh melambatnya pertumbuhan di Kota Ambon, yaitu dari 8,14% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi 3,27% (yoy) pada triwulan laporan seiring dengan turunnya minat pada deposito.

Penghimpunan DPK pada triwulan III-2015 diwarnai perlambatan di komponen deposito dan meningkatnya pertumbuhan komponen giro. Komponen deposito mengalami deselerasi pada triwulan laporan, yaitu dengan pertumbuhan sebesar 22,25% (yoy), lebih rendah dibanding 26,91% (yoy) pada triwulan II-2015. Deselerasi ini mengikuti tren suku bunga deposito yang mengalami penurunan sebesar 0,13% dibanding triwulan lalu. Sementara itu, komponen giro tercatat tumbuh 32,2% (yoy) pada triwulan III-2015, meningkat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,76% (yoy). Pertumbuhan giro terutama didorong oleh tumbuhnya giro pemerintah daerah. Di sisi lain, laju pertumbuhan tabungan tercatat melambat, yaitu dari 4,96% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi 2,01% (yoy) pada triwulan laporan.

Tabel 3.4 Perkembangan Komponen DPK Bank Umum di Maluku

Komponen DPK	Nominal (Rp Triliun)								growth (% yoy)								Suku Bunga (%)					
	2014				2015				2014				2015				2014			2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	I	II	III	
Giro	2.07	2.38	2.26	1.90	2.44	2.93	2.99	16.84	37.54	16.23	10.81	17.88	22.76	32.20	1.91	1.92	1.97	1.89	1.92	1.93	1.94	
Tabungan	4.54	4.56	4.98	5.52	4.72	4.78	5.08	8.03	7.77	13.05	6.44	3.84	4.96	2.01	2.1	1.87	1.89	1.86	1.89	1.91	1.96	
Deposito	2.64	2.99	3.26	2.99	3.64	3.79	3.99	14.06	25.52	35.78	25.76	38.11	26.91	22.25	7.23	7.79	8.01	8.04	8.13	7.65	7.52	
Total DPK	9.25	9.92	10.50	10.41	10.79	11.49	12.05	11.60	19.02	19.99	12.19	16.75	15.84	14.80	3.58	3.73	3.88	3.7	4.07	3.88	3.86	

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)

Tabel 3.5 Perkembangan Penyaluran Kredit Bank Umum ke Maluku (Lokasi Proyek)

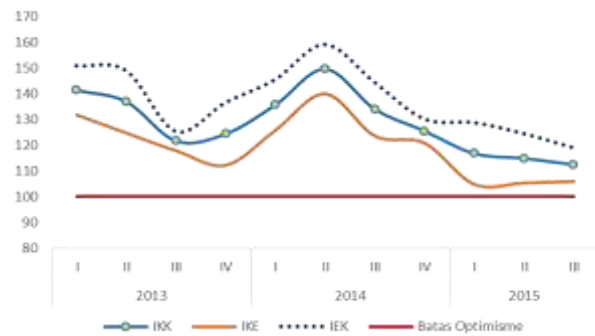
Kabupaten/Kota	Nominal (Rp Triliun)							g-Kredit Lokasi Proyek (%yoy)								
	2014				2015			2014				2015				
	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III	IV	I	II	III		
Maluku Tengah	1.03	1.07	1.07	1.10	1.10	1.14	1.17	19.69	15.37	12.58	8.54	7.07	6.90	9.52		
Maluku Tenggara	1.25	1.31	1.32	1.36	1.39	1.44	1.50	28.20	21.49	8.23	3.49	11.46	10.05	13.88		
Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya	0.43	0.47	0.49	0.51	0.53	0.58	0.62	20.44	22.46	21.77	18.71	22.04	25.20	25.23		
Buru & Buru Selatan	0.31	0.32	0.33	0.35	0.36	0.38	0.41	28.23	16.45	11.26	13.43	14.95	19.56	23.23		
Seram Bagian Barat	0.19	0.19	0.20	0.21	0.22	0.23	0.24	10.85	0.08	4.88	13.56	16.48	23.87	19.93		
Seram Bagian Timur	0.14	0.14	0.15	0.16	0.16	0.17	0.17	16.48	9.89	8.51	13.94	12.87	17.80	15.53		
Kepulauan Aru	0.22	0.22	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	20.79	19.16	27.87	30.03	36.16	29.86	3.98		
Kota Ambon	3.97	4.00	4.06	4.07	4.07	4.25	4.27	12.44	5.83	4.36	3.65	2.41	6.36	5.24		
Kota Tual	0.03	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	-7.34	35.13	47.25	19.11	17.63	-2.91	8.98		
PROVINSI MALUKU	7.58	7.76	7.95	8.09	8.17	8.53	8.73	16.96	11.27	8.30	6.83	7.76	9.99	9.78		

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)

Pertumbuhan penyaluran kredit juga tercatat mengalami perlambatan. Kredit yang disalurkan (berlokasi proyek) di Provinsi Maluku pada triwulan laporan mencapai Rp 8,73 triliun, atau tumbuh 9,78% (yoy), sedikit melambat dibanding triwulan II-2015 yang mencapai 9,99% (yoy). Deselerasi penyaluran kredit terutama terjadi di Kota Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, dan Kep. Aru. Sementara itu, pertumbuhan kredit di 7 kota/kabupaten lainnya masih tercatat mengalami akselerasi.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia
 Grafik 3.1 Perkembangan Kondisi Keuangan Dunia Usaha Kota Ambon dan sekitarnya



Sumber: Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia
 Grafik 3.2 Perkembangan Keyakinan Konsumen Kota Ambon

Turunnya kinerja penyaluran kredit terutama terjadi pada kredit produktif seiring dengan pelemahan kondisi keuangan usaha. Kredit modal kerja Provinsi Maluku tercatat mengalami perlambatan pada triwulan III-2015, yaitu dari 28,0% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi 27,66%(yoy) pada triwulan laporan. Kredit investasi bahkan mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif), yaitu sebesar 29,79% (yoy) pada triwulan III-2015, lebih dalam dibanding triwulan lalu yang hanya berkontraksi 25,94% (yoy). Penurunan kinerja kredit produktif ini terjadi seiring dengan melemahnya kondisi keuangan dunia usaha, sebagaimana tercermin dari tingkat likuiditas dan rentabilitas yang terus berada dalam tren menurun pada Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia di Kota Ambon dan sekitarnya. Pelemahan kondisi keuangan dunia usaha juga tercermin dari bergantinya komitmen kredit investor perikanan yang beralih skema dari kredit investasi menjadi kredit modal kerja dan berkontribusi pada terjadinya kontraksi pada kredit investasi Provinsi Maluku.

Di sisi lain, kinerja kredit konsumtif tercatat menguat. Pertumbuhan kredit konsumsi tercatat sebesar 11,01% (yoy) pada triwulan III-2015, meningkat dibanding triwulan lalu yang tumbuh 10,15% (yoy). Pelemahan keyakinan konsumen akibat penurunan ketersediaan lapangan kerja ternyata tidak memengaruhi minat pembelian barang tahan lama pada momen pasca idul fitri, yang kemudian mendorong peningkatan kredit konsumsi, baik pada kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB), dan kredit multiguna.

Tabel 3.6 Perkembangan Komponen Kredit Bank Umum di Maluku

Komponen Kredit	Nominal (Rp Triliun)								growth (% yoy)								Suku Bunga (%)					
	2014				2015				2014				2015				2014			2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	I	II	III				
Kredit Modal Kerja	2.13	2.28	2.34	2.34	2.39	2.91	2.99		19.66	14.03	10.32	6.24	12.01	28.00	27.66	13.30	13.37	13.36	13.31	13.40	12.52	12.37
Kredit Investasi	1.25	1.16	1.20	1.19	1.15	0.86	0.84		19.52	0.26	-4.29	-6.08	-7.99	-25.94	-29.79	13.19	13.44	13.11	13.23	13.05	15.40	15.21
Kredit Konsumsi	4.20	4.32	4.42	4.56	4.63	4.76	4.91		14.91	13.17	11.17	11.12	10.31	10.15	11.01	14.38	14.39	14.34	14.38	14.43	14.43	14.70
Total Kredit	7.58	7.76	7.95	8.09	8.17	8.53	8.73		16.96	11.27	8.30	6.83	7.76	9.99	9.78	13.88	13.95	13.87	13.90	13.87	13.88	13.95

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)

Dengan pertumbuhan kredit yang lebih lambat dibanding penghimpunan dana, tingkat intermediasi bank umum di Provinsi Maluku tercatat mengalami penurunan. *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 tercatat sebesar 63,45%, menurun dibanding triwulan lalu yang mencapai 65,31%. Tingkat intermediasi ini masih berada di bawah tingkat intermediasi optimal Bank Indonesia, yaitu 78-92%, dan terus berada dalam tren yang menurun sejak triwulan III-2015. Penurunan tingkat intermediasi ini sejalan dengan pelemahan permintaan kredit akibat penurunan harga komoditas global yang berdampak pada lesunya ekonomi. Selain itu, pelemahan keyakinan konsumen sejak awal tahun 2015 turut mendorong pelemahan *demand* kredit pada Provinsi Maluku.

Dari segi kualitas, penyaluran kredit di Provinsi Maluku mengalami perbaikan. Rasio *non-performing loan* (NPL) atau kredit bermasalah di Provinsi Maluku pada triwulan laporan mencapai 1,91%, lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 2,1%. Dengan demikian, tingkat risiko kredit yang ditanggung bank umum relatif cukup rendah, karena masih berada jauh di bawah batas aman Bank Indonesia, yaitu 5%.

Perbaikan kualitas terlihat pada semua jenis penggunaan kredit, baik untuk modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Kredit investasi mengalami penurunan NPL dari 4,45% pada triwulan II-2015 menjadi 3,74% pada triwulan laporan, sementara NPL kredit modal kerja turun dari 3,17% menjadi 3,12%. Risiko terendah masih tercatat pada kredit konsumsi, yaitu menurun dari 1,02% pada triwulan II-2015 menjadi 0,86% pada triwulan laporan.



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
Grafik 3.3 Loan to Deposit Ratio (LDR) Bank Umum



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
Grafik 3.4 Non Performing Loan (NPL) Bank Umum

Dari sisi profitabilitas, bank umum di Provinsi Maluku menunjukkan tren perbaikan selama dua triwulan terakhir. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) tercatat menurun, yaitu dari 74,13% pada triwulan II-2015 menjadi 73,17% pada triwulan laporan. Penghasilan bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) juga tercatat mengalami perbaikan, yaitu dari 8,84% pada triwulan II-2015 menjadi 8,97% pada triwulan laporan. Hal ini tidak lepas dari meningkatnya andil giro pemda yang berbiaya murah dalam mendorong pertumbuhan penghimpunan dana pada triwulan laporan. Penurunan biaya bunga terlihat dari meningkatnya *spread* suku bunga (selisih antara bunga simpanan dan bunga kredit) yang kembali meningkat

selama dua triwulan terakhir, yang bertepatan dengan penurunan kontribusi deposito dan meningkatnya kontribusi giro pada penghimpunan DPK di Provinsi Maluku.



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
 Grafik 3.5 Perkembangan *Spread* Suku Bunga Bank Umum di Maluku



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
 Grafik 3.6 Perkembangan BOPO dan NIM Bank Umum di Maluku

3.1.1.2 Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Tabel 3.7 Perkembangan Indikator Utama Bank Perkreditan Rakyat di Maluku

Indikator	2013				2014				2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
1. Aset (Rp Miliar)	715.63	787.93	848.50	1,000.90	916.56	976.97	1,021.30	1,174.43	1,159.59	1,190.46	1,222.75
Grow th (% yoy)	9.42	6.20	39.37	34.07	28.08	23.99	20.37	17.34	26.52	21.85	19.72
2. DPK (Rp Miliar)	215.27	223.35	235.24	312.84	258.55	263.06	230.27	328.64	302.75	306.27	282.47
Grow th (% yoy)	(18.43)	(1.55)	15.38	15.48	20.11	17.78	(2.11)	5.05	17.09	16.43	22.67
3. Kredit (Rp Miliar)	608.27	660.96	716.30	757.37	811.22	857.44	897.82	945.05	991.41	1,046.86	1,085.38
Grow th (% yoy)	60.41	49.52	46.35	39.94	33.37	29.73	25.34	24.78	22.21	22.09	20.89
4. NPL (Rp Miliar)	5.03	4.96	5.97	4.32	5.07	5.80	4.09	4.11	5.38	6.39	6.45
% NPL	0.83	0.75	0.83	0.57	0.62	0.68	0.46	0.43	0.54	0.61	0.59
5. LDR	282.57	295.93	304.50	242.10	313.75	325.95	389.89	287.56	327.47	341.81	384.25

Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)

Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menunjukkan perlambatan kinerja. Pada triwulan III-2015, BPR memiliki aset senilai Rp 1,22 triliun atau 7,41% dari seluruh aset perbankan di Provinsi Maluku. Pertumbuhan aset BPR tercatat mengalami perlambatan pada triwulan laporan, yaitu tumbuh 19,72% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat tumbuh 21,85% (yoy). Hal ini seiring dengan menurunnya pertumbuhan kredit dari 22,09% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi 20,89% pada triwulan laporan. Berbeda dengan bank umum yang mengalami tren peningkatan kredit konsumsi di tengah penurunan keyakinan konsumen, penyaluran kredit oleh BPR yang juga mengandalkan kredit konsumsi justru terindikasi melemah. Di sisi lain, pertumbuhan DPK tercatat meningkat dari 16,43% (yoy) pada triwulan II-2015 menjadi 22,67% (yoy) pada triwulan laporan seiring dengan *low-base effect* akibat rendahnya tingkat DPK pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Risiko kredit BPR tercatat mengalami penurunan, namun risiko likuiditas berada pada tingkat yang cukup tinggi. Tingkat NPL BPR di Provinsi Maluku pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,59%, jauh di bawah batas aman Bank Indonesia, dan turun dibanding triwulan II-2015 yang tercatat sebesar 0,61%. Di sisi lain, LDR BPR di Provinsi Maluku tercatat sebesar 384,25%, lebih tinggi dibanding rasio optimal intermediasi Bank Indonesia yang sebesar 78-92%, serta meningkat dibanding triwulan lalu yang berada di tingkat 341,81%.

Tingginya LDR ini menunjukkan ketergantungan BPR yang tinggi pada dana pinjaman dari bank umum, yang tercatat sebesar 74,04% dari seluruh dana yang dihimpun pada triwulan laporan.

3.1.2 Perkembangan Stabilitas Sistem Keuangan⁵⁾

Secara umum, kredit bank umum di Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 didominasi oleh penyaluran pada keperluan rumah tangga, yaitu sebesar Rp 4,9 triliun atau 56,19%. Sementara itu, kredit untuk keperluan produktif hanya sebesar Rp 3,8 triliun atau 43,81%, yang terdiri dari kredit korporasi sebesar Rp 1,41 triliun atau 16,11% dan kredit pada UMKM sebesar Rp 2,4 triliun atau 27,7%.

3.1.2.1 Perkembangan Sektor Rumah Tangga

Tabel 3.8 Perkembangan Kredit Rumah Tangga di Maluku

Komponen Kredit	Nominal (Rp Triliun)								growth (% yoy)								NPL (%)						
	2014				2015				2014				2015				2014				2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				
KPR/Apartemen/Ruko/Rukan	0.48	0.50	0.49	0.49	0.48	0.49	0.53		126.99	28.15	12.58	13.21	-0.28	-2.03	9.09		0.76	1.10	1.12	0.72	1.20	1.31	1.05
KKB	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14		19.30	14.36	8.82	4.47	5.22	-0.39	4.20		0.33	0.40	0.26	0.44	0.30	0.50	0.66
Kredit Multiguna	1.48	1.47	1.45	2.39	2.44	2.52	2.62		-22.56	-7.63	-6.21	57.94	64.49	71.19	80.25		1.80	1.66	1.43	0.84	1.00	0.95	0.78
Kredit Peralatan RT	0.20	0.23	0.23	0.18	0.17	0.16	0.15		15.44	21.20	15.63	-10.64	-13.89	-29.83	-34.08		1.26	0.95	0.46	0.94	4.84	9.27	9.03
Kredit Lainnya	1.90	1.97	2.11	1.37	1.39	1.44	1.46		53.07	30.09	26.58	-25.18	-26.43	-26.92	-30.75		1.41	1.35	1.25	1.01	1.05	1.06	0.92
Total Kredit	4.20	4.32	4.42	4.56	4.76	4.91			14.91	13.17	11.17	11.12	10.31	10.15	11.01		1.42	1.39	1.26	0.86	1.02	1.02	0.86

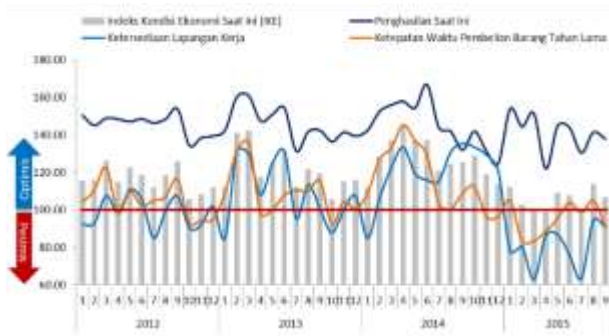
Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)

Kredit pada sektor rumah tangga mencatatkan akselerasi di tengah penurunan keyakinan konsumen. Setelah mengalami perlambatan selama empat triwulan terakhir, kredit rumah tangga di Provinsi Maluku kembali tercatat mengalami akselerasi, yaitu dengan pertumbuhan sebesar 11,01% (yoy), lebih tinggi dibanding triwulan lalu yang hanya 10,15% (yoy). Di tengah penurunan keyakinan konsumen akibat rendahnya ketersediaan lapangan kerja, bank umum mendorong pertumbuhan kredit melalui skema multiguna, yang tumbuh 80,25% (yoy). Sementara itu, kredit pemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) juga tercatat kembali tumbuh positif, yaitu masing-masing sebesar 9,09% (yoy) dan 4,20% (yoy), terdorong oleh meningkatnya belanja barang tahan lama pada momen pasca lebaran.

Kualitas kredit sektor rumah tangga terpantau aman dan mengalami perbaikan. NPL kredit rumah tangga pada triwulan laporan tercatat sebesar 0,86%, di bawah batas aman 5% dan lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai 1,02%. Penurunan NPL terutama didorong oleh kredit multiguna dan KPR, sementara NPL KKB terpantau mengalami kenaikan. Di sisi lain, kredit peralatan rumah tangga masih memiliki tingkat NPL yang cukup tinggi, yaitu sebesar 9,03%, walaupun sudah mengalami penurunan dibanding triwulan lalu yang mencapai 9,27%.

Kondisi keuangan konsumen Kota Ambon menunjukkan peningkatan porsi tabungan dan cicilan pinjaman. *Average-prospensity-to-consume ratio*, atau rasio konsumsi terhadap total pendapatan bulanan, terlihat menurun pada akhir triwulan II-2015 menjadi 60,55% dibanding triwulan lalu 62,04% seiring dengan meningkatnya belanja barang tahan lama. Meningkatnya belanja tahan lama ini tercermin dari kenaikan indeks ketepatan waktu belanja barang tahan lama selama bulan Agustus 2015 (grafik 3.5), kenaikan *debt-to-income ratio* (cicilan pinjaman terhadap total pendapatan), dan kenaikan pertumbuhan KPR dan KKB. Di sisi lain, pelemahan keyakinan konsumen akibat penurunan ketersediaan lapangan kerja direspon dengan penurunan tingkat konsumsi. Hal ini tercermin dari peningkatan *saving-to-income ratio* dari 30,59% menjadi 31,26.

5) Komponen stabilitas keuangan mulai Kajian Ekonomi dan Keuangan Triwulan III-2015 dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Korporasi, Rumah Tangga dan UMKM. Berbeda dengan kajian pada triwulan sebelumnya, definisi korporasi mulai pada triwulan ini adalah usaha produktif non-UMKM, sedangkan definisi triwulan sebelumnya masih menggabungkan kedua komponen tersebut

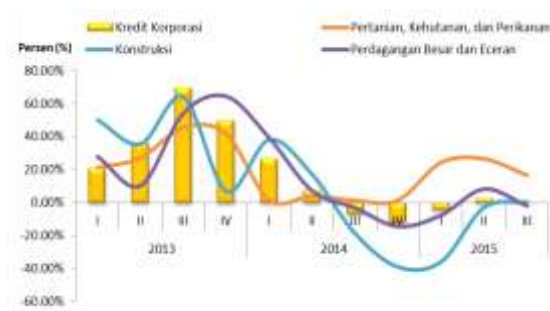


Sumber: Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia
 Grafik 3.7 Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Komponennya



Sumber: Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia
 Grafik 3.8 Kondisi Keuangan Konsumen Kota Ambon

3.1.2.2 Perkembangan Sektor Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
 Grafik 3.9 Perkembangan Kredit Korporasi



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
 Grafik 3.10 Non Performing Loan (NPL) Korporasi

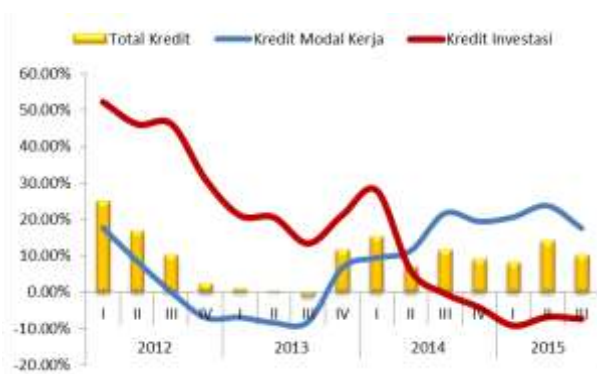
Kredit sektor korporasi menunjukkan tren perlambatan. Pada triwulan III-2015, kredit sektor korporasi mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,65% (yoy), melambat dibanding triwulan II-2015 yang mencapai 2,96% (yoy). Perlambatan terjadi seiring dengan perlambatan pada dua komponen utama kredit korporasi, yaitu kredit pada kategori ekonomi pertanian, kehutanan dan perikanan, serta kontraksi pada kredit kategori ekonomi perdagangan besar dan eceran, masing-masing tumbuh sebesar 16,49% (yoy) dan -1,96% (yoy), dibanding triwulan lalu yang masing-masing tumbuh 26,48% (yoy) dan 8,16% (yoy). Hasil liaison Bank Indonesia para pengusaha eksportir menunjukkan bahwa penurunan harga komoditas primer dunia akibat lesunya perekonomian global menurunkan profitabilitas perusahaan eksportir di Maluku. Walaupun terjadi pelemahan nilai tukar yang berpotensi mendongkrak profitabilitas, penurunan harga komoditas dinilai lebih signifikan dibanding dampak pelemahan nilai tukar tersebut. Selain itu, dampak dari moratorium izin ikan tangkap juga turut mengurangi *demand* kredit dunia usaha pada perbankan, mengingat usaha kategori perikanan memiliki porsi terbesar dalam kredit sektor korporasi Maluku, yaitu sebesar 36,26%. Walaupun investasi Provinsi Maluku secara agregat mengalami peningkatan pertumbuhan, namun dukungan investasi bukan berasal dari perbankan, melainkan pemerintah dan investasi asing.

Dilihat dari sisi kualitas, kredit sektor korporasi tercatat masih berada dalam level aman dan mengalami perbaikan. NPL sektor korporasi tercatat sebesar 1,28% pada triwulan laporan, lebih rendah

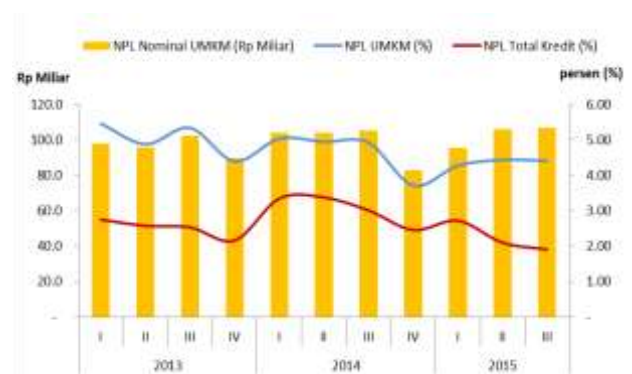
dibanding triwulan lalu yang mencapai 1,77%, jauh di bawah batas aman 5%. Perbaikan kualitas didorong oleh kredit pada kategori ekonomi pertanian, kategori konstruksi, serta kategori perdagangan besar dan eceran, masing-masing turun dari 0,06%, 4,37%, dan 4,02% pada triwulan II-2015 menjadi 0,04%, 4,32% dan 2,21% pada triwulan laporan. Perbaikan kualitas merupakan dampak dari usaha perbankan dalam pengurangan dan penanganan kredit bermasalah, terutama kredit dengan kolektabilitas lima (macet).

Namun demikian, perlu diwaspadai terjadinya potensi lonjakan NPL pada usaha perikanan pada triwulan selanjutnya. Hal ini seiring dengan masih dirasakannya dampak pengetatan aturan penangkapan ikan, terutama pada Kab. Maluku Tenggara yang memiliki porsi kredit korporasi perikanan terbesar. Saat ini, Kab. Maluku Tenggara memiliki porsi 90,99% dari kredit pada korporasi perikanan, dan menyumbang 33% dari seluruh total kredit korporasi. Hal yang perlu dicermati adalah adanya kredit pada usaha perikanan di Kabupaten Maluku Tenggara senilai sekitar Rp492 miliar yang memiliki status Dalam Perhatian Khusus (kolektibilitas 2), yang apabila kualitasnya memburuk berpotensi memberikan tambahan NPL sebesar 5,32% bagi total kredit bank umum di Maluku.

3.1.2.3 Perkembangan Sektor UMKM



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
Grafik 3.11 Perkembangan Kredit UMKM Maluku



Sumber: Laporan Bank Umum (LBU)
Grafik 3.12 Non Performing Loan (NPL) UMKM Maluku

Kredit pada sektor UMKM tercatat mengalami perlambatan. Kredit sektor UMKM pada triwulan laporan tumbuh sebesar 13,19% (yoy), lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang mencapai 14,12% (yoy). Terjadi perlambatan pada kredit modal kerja yang hanyatumbuh sebesar 19,95% (yoy) pada triwulan laporan, lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai 23,72% (yoy). Sementara itu, kredit investasi juga masih tercatat mengalami kontraksi, yaitu sebesar 3,35% (yoy), walaupun tidak sedalam triwulan lalu yang terkontraksi sebesar 6,84% (yoy). Penurunan kinerja kredit UMKM tidak lepas dari perlambatan pertumbuhan kredit UMKM perdagangan besar dan eceran, yang hanya tumbuh 14,01% (yoy), dibanding triwulan lalu yang tumbuh sebesar 17,13% (yoy). Berdasarkan liaison yang dilakukan Bank Indonesia, perlambatan kinerja UMKM perdagangan tak lepas dari lesunya pasar domestik untuk barang non-tahan lama, terutama untuk bahan pokok kualitas menengah ke bawah, seiring dengan hilangnya daya beli masyarakat akibat lemahnya ketersediaan lapangan kerja.

Kualitas kredit sektor UMKM tercatat mengalami perbaikan. NPL sektor UMKM tercatat sebesar 4,41%, lebih rendah dibanding triwulan lalu yang mencapai 4,43%. Mengikuti tren penurunan NPL total kredit, hal ini tak lepas dari usaha perbankan untuk melakukan penyelesaian pada kredit bermasalah, baik melalui restrukturisasi, penyelesaian kredit melalui pengambilalihan agunan, maupun penghapusbukuan.

3.2. Perkembangan Sistem Pembayaran di Provinsi Maluku

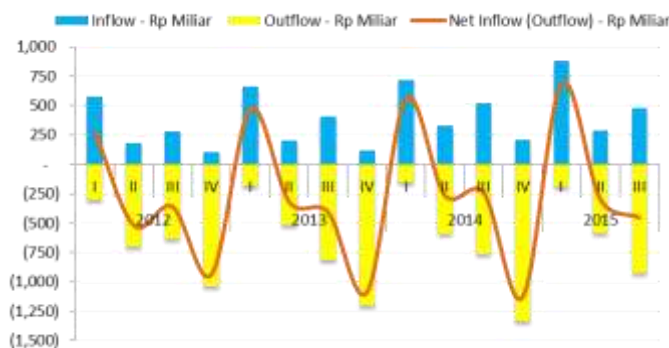
3.2.1. Perkembangan Sistem Pembayaran Tunai dan Kegiatan Perkasan di Bank Indonesia

Tabel 3-9 Rekapitulasi Kegiatan Perkasan KPw BI Prov. Maluku

Kegiatan (Rp Miliar)	2013				2014				2015		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Inflow	661.62	201.03	408.99	117.36	721.01	329.36	521.72	208.90	884.14	285.93	478.18
Outflow	(188.94)	(521.46)	(818.11)	(1,204.89)	(161.06)	(595.06)	(764.67)	(1,340.19)	(195.84)	(586.59)	(930.69)
Net Inflow (Outflow)	472.68	(320.43)	(409.11)	(1,087.53)	559.95	(265.70)	(242.95)	(1,131.29)	688.30	(300.66)	(452.51)
Penukaran Melalui Kas Keliling	4.36	5.82	3.51	7.79	6.78	5.73	9.48	12.85	10.02	10.48	11.36
Remise (Pengiriman Uang)	219	186	407	1167	0	524	107	877	66	172	527
Inflow /Hari	10.69	3.05	6.97	1.95	12.02	4.99	8.90	3.48	14.74	4.33	7.25
Outflow /Hari	3.28	7.90	13.27	20.48	2.68	9.02	12.11	22.91	3.26	8.89	14.10
Setoran/Hari	10.48	2.82	6.68	1.61	11.76	5.30	8.06	3.00	14.37	4.84	8.15
Penarikan/Hari	3.08	7.67	12.98	20.14	2.43	9.82	13.07	22.43	2.90	9.77	14.56
Penukaran/Hari	0.17	0.17	0.29	0.26	0.18	0.23	0.39	0.33	0.25	0.02	0.04

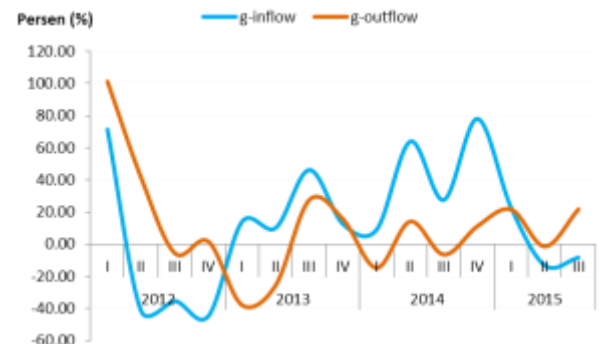
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Sesuai dengan pola siklikal tahunannya, perputaran kas di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 membukukan *net outflow*, yaitu sebesar Rp 452.51 miliar, atau mencatatkan jumlah uang tunai yang keluar yang lebih besar dibanding jumlah uang tunai yang masuk dari KPw BI Provinsi Maluku. Hal ini sesuai dengan pola tahunannya, yaitu akibat meningkatnya realisasi belanja pemerintah.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3-13 Perputaran Uang Kartal KPw BI Prov. Maluku



Sumber: Bank Indonesia, diolah

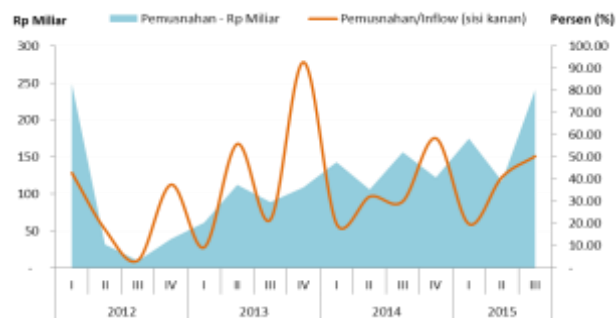
Grafik 3-14 Pertumbuhan Uang Kartal KPw BI Prov. Maluku

Secata tahunan, perkembangan uang kartal di Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 diwarnai oleh melambatnya penghimpunan dana di tengah meningkatnya kebutuhan uang masyarakat. Arus uang kartal masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku (*inflow*) pada triwulan III-2015 tercatat masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,35% (yoy), walaupun tidak sedalam triwulan lalu yang mencapai 13,19% (yoy). Kontraksi tersebut seiring dengan perlambatan penghimpunan dana oleh perbankan, di tengah menurunnya kinerja korporasi dan turunnya minat deposito. Di sisi lain, arus uang kartal keluar dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku tercatat mulai kembali tumbuh positif, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, yang terutama didorong oleh event Maluku Expo 2015.

3.2.1.1. Perkembangan Pemusnahan Uang

Salah satu kegiatan pengelolaan uang Rupiah yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku adalah menjaga kualitas uang kartal yang beredar dalam kondisi layak edar, melalui kegiatan pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE). Sesuai dengan kebijakan *clean money policy*, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku memprioritaskan penerimaan UTLE dari perbankan.

Pada triwulan III-2015, pemusnahan UTLE yang dilakukan selama triwulan laporan mencapai Rp 241 miliar atau sebanyak 50,32% dari jumlah uang masuk ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku. Porsi UTLE ini lebih tinggi dibanding triwulan II-2015, yang hanya sebesar 40,95%, maupun dibanding triwulan III-2014 yang hanya sebesar 29,98%. Peningkatan penerimaan UTLE di Provinsi Maluku menunjukkan masih tingginya kebutuhan untuk mendorong optimalisasi jalur distribusi uang layak edar, sekaligus masih rendahnya kesadaran masyarakat di Provinsi Maluku untuk menjaga kondisi uang kartal yang dimiliki.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 3-15 Pemusnahan Uang Tidak Layak Edar (UTLE)

3.2.1.2. Kegiatan Kas Keliling Bank Indonesia dan Kegiatan Lainnya

Kegiatan kas keliling pada triwulan III-2015 tercatat sebanyak 29 kali. Kegiatan kas keliling ini merupakan upaya Bank Indonesia untuk senantiasa menyediakan uang layak edar di masyarakat khususnya di pulau-pulau di luar Ambon, mengingat kondisi geografis Provinsi Maluku yang terdiri dari kepulauan dan didominasi oleh wilayah perairan menjadi tantangan tersendiri bagi Bank Indonesia. Selain menerapkan *clean money policy* (kebijakan untuk menyediakan uang layak edar), kegiatan kas keliling juga bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pecahan kecil tanpa harus datang ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Pada triwulan III-2015 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku melakukan kas keliling di dalam Kota Ambon sebanyak 15 kali, dan di luar kota sebanyak 14 kali. Kas keliling diprioritaskan untuk dilakukan pada pusat keramaian dan pusat ekonomi masyarakat.

Tabel 3-10 Kegiatan Kas Keliling Triwulan III-2015

Tujuan	Frekuensi
Ambon	15 kali
Tulehu	4 kali
Liang	2 kali
Waisarisa	1 kali
Saumlaki	1 kali
Piru	2 kali
Tual	1 kali
Saparua	1 kali
Namlea	1 kali
Namrole	1 kali
total	29 kali

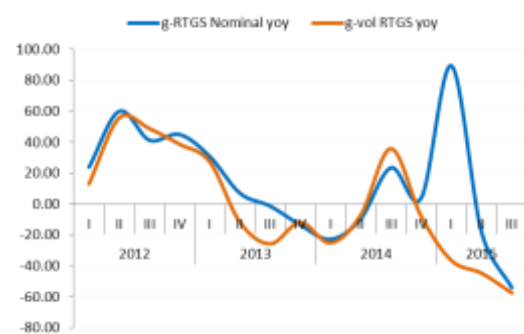
3.2.2. Perkembangan Sistem Pembayaran Non-Tunai

3.2.2.1. Perkembangan Transaksi BI-RTGS

Perkembangan nominal transaksi melalui *Real Time Gross Settlement* (RTGS) pada triwulan III-2015 mencatatkan kondisi *net outgoing* sebesar Rp 1,43 triliun. Dengan kata lain, pada triwulan laporan jumlah dana yang keluar dari Maluku melalui RTGS lebih besar dibanding jumlah dana yang masuk ke Maluku. Posisi *net outgoing* Provinsi Maluku pada triwulan III-2015 keluar dari pola siklikalnya, dengan posisi outgoing yang lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya (Rp 1,26 triliun). Pada tahun-tahun sebelumnya, posisi *outgoing* cenderung semakin besar ketika mendekati akhir tahun. Pada triwulan III-2015, volume dan nominal transaksi RTGS di Provinsi Maluku mengalami kontraksi akibat berkurangnya aktivitas keuangan skala besar.



Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Grafik 3-16 Perkembangan Nominal BI-RTGS Maluku

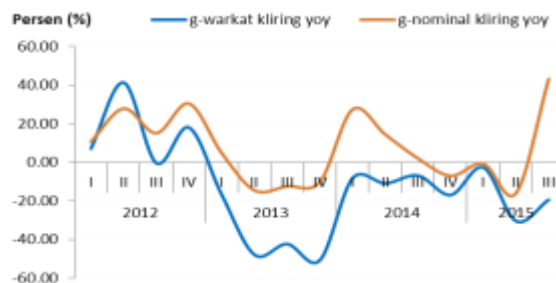


Sumber: Bank Indonesia (diolah)
Grafik 3-17 Perkembangan Volume BI-RTGS Maluku

Secara tahunan, total transaksi RTGS menunjukkan kontraksi, baik dari nominal maupun dari volume transaksi. Total transaksi nominal RTGS pada triwulan laporan mencapai Rp 4,72 triliun, atau terkontraksi 54,01% (yoy), lebih dalam dibanding triwulan II-2015 yang terkontraksi hanya sebesar 18,19% (yoy). Dari sisi volume, transaksi RTGS juga mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar 57,43% (yoy), lebih dalam dibanding kontraksi triwulan lalu yang hanya sebesar 44,68% (yoy). Penurunan aktivitas non-tunai skala besar ini terjadi seiring dengan memburuknya iklim usaha, seiring dengan penurunan profitabilitas dunia usaha, turunnya harga komoditas internasional, terus meningkatnya biaya tenaga kerja, dan pengetatan izin tangkap perikanan laut yang berdampak pada exit policy dari beberapa korporasi besar di Maluku .

3.2.2.2 Perkembangan Transaksi Kliring

Pada triwulan III-2015, perputaran kliring di Provinsi Maluku tercatat kembali tumbuh positif. Transaksi kliring di Provinsi Maluku pada triwulan laporan mencapai Rp1,62 triliun, yang berasal dari 29,84 ribu lembar warkat kliring. Secara nominal perputaran kliring di Provinsi Maluku tumbuh cukup tinggi, yaitu 43,16% (yoy), dibanding triwulan lalu yang terkontraksi 15,91% (yoy). Sementara itu, secara volume, perputaran kliring secara triwulanan masih mengalami kontraksi 19,36% (yoy), namun tidak sedalam triwulan sebelumnya yang juga tumbuh negatif 30,4% (yoy). Kenaikan transaksi kliring merupakan dampak dari penyelenggaraan event Maluku Expo 2015, yang mendorong peningkatan usaha perdagangan besar dan eceran. Hal ini juga tercermin dari rata-rata nominal harian perputaran kliring yang sangat tinggi, yaitu mencapai Rp25,66 miliar per hari, meningkat dibanding triwulan sebelumnya yang sebesar Rp 16,49 miliar maupun dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 18,51 miliar. Sementara itu, penurunan jumlah volume transaksi menunjukkan aktivitas ekonomi yang masih relatif lesu dibanding tahun sebelumnya.



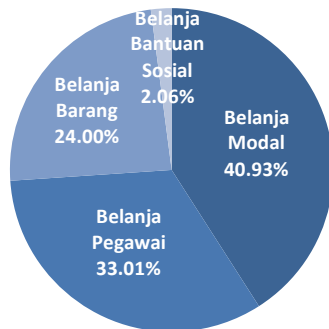
Sumber: Bank Indonesia, (diolah)

Grafik 3-18 Perputaran Kliring di Provinsi Maluku

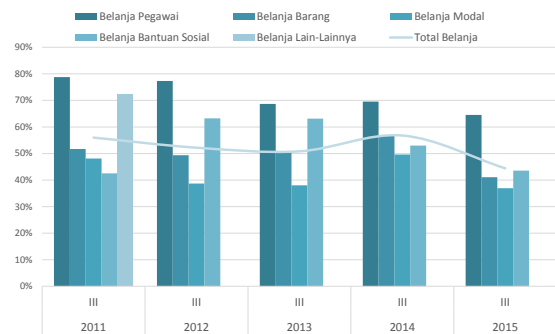
BAB IV. PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

4.1 Realisasi APBN Provinsi Maluku

Perkembangan kinerja realisasi pos belanja secara total hingga triwulan III-2015 mencapai Rp4,47 triliun atau 44,4% dari pagu anggaran tahun 2015 sebesar Rp10,07 triliun. Realisasi belanja total tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 56,8%, maupun rata-rata realisasi belanja total triwulan III dalam 4 tahun terakhir sebesar 53,95%. Realisasi pos belanja total yang belum optimal hingga triwulan III-2015 menyebabkan masyarakat belum merasakan manfaat atau dampak yang signifikan dari realisasi anggaran belanja tersebut. Beberapa faktor yang mendorong perlambatan kinerja realisasi belanja APBN Provinsi Maluku adalah adanya perubahan nomenklatur dari sisi organisasi dan pengesahan APBN Perubahan (APBN-P) 2015 pada Februari 2015 dengan nominal plafon anggaran belanja yang lebih besar sehingga persentase realisasinya menjadi lebih rendah.



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku; diolah Grafik 4.1 Proporsi Realisasi Belanja APBN 2015 Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan III-2015



Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Maluku; diolah Grafik 4.2 Realisasi Belanja APBN 2015 Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan III-2015, dalam persen (%)

Berdasarkan pos komponen belanja, kinerja realisasi belanja modal APBN Provinsi Maluku juga masih cenderung rendah. Realisasi belanja modal hingga triwulan III-2015 mencapai Rp1.830,84 miliar, atau 36,94% dari pagu yang telah ditetapkan. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 49,61%, maupun rata-rata realisasi belanja modal triwulan III selama 4 tahun terakhir sebesar 43,61%. Secara keseluruhan, proporsi belanja modal dalam struktur belanja APBN Provinsi Maluku mencapai 49,2%, merupakan yang terbesar dibandingkan pangsa pos belanja lainnya, seperti belanja barang (26,0%) dan belanja pegawai (22,7%).

Sementara itu, realisasi Belanja Barang hingga Triwulan III-2015 mencapai Rp1.073,8 miliar, atau 41,05% dari pagu anggaran. Sedangkan realisasi Belanja Pegawai pada periode yang sama sebesar Rp1.476,5 miliar atau 64,56% dari pagu anggaran. Meningkatnya kinerja belanja total maupun belanja modal seiring dengan adanya peningkatan penyerapan untuk pembiayaan-pembiayaan program, seperti infrastruktur, bantuan sosial, dan lain-lain yang belum direalisasikan pada semester pertama.

Tabel 4.1 Realisasi Belanja dari APBN Provinsi Maluku Triwulan III-2015 (dalam Rp juta)

No	Jenis Belanja	DIPA	DIPA Revisi	% Perubahan	Realisasi s/d Tw III-2015	% Realisasi s/d Tw III-2015	Sisa Anggaran
1	Belanja Pegawai	2,269,330	2,287,160	0.79	1,476,515	64.56	810,645
2	Belanja Barang	2,550,835	2,615,601	2.54	1,073,801	41.05	1,541,800
3	Belanja Modal	3,320,079	4,956,091	49.28	1,830,835	36.94	3,125,255
4	Belanja Bantuan Sosial	261,224	211,906	-18.88	92,283	43.55	119,622
5	Belanja Lain-Lain			0.00		0.00	0
6	Jumlah	8,401,467	10,070,757	19.87	4,473,434	44.42	5,597,323

Sumber : Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, diolah

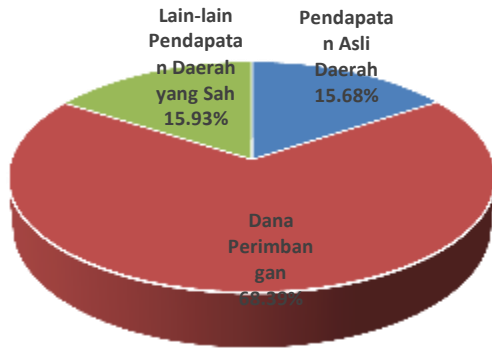
4.2 Realisasi APBD Provinsi Maluku

Selama empat tahun terakhir (2011-2014), penyerapan APBD Provinsi Maluku triwulan III rata-rata berada pada tingkat yang cukup rendah, yaitu 55,74. Rendahnya penyerapan anggaran di setiap tahunnya disebabkan oleh permasalahan administrasi yang dibutuhkan untuk pencairan anggaran, terutama dalam legalisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Setelah proses persetujuan anggaran secara agregat oleh DPRD Provinsi pada tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, dibutuhkan waktu sekitar 2-4 bulan untuk menyusun dan melegalisasi DPA masing-masing satuan kerja di Pemerintah Provinsi. Khusus untuk belanja modal, realisasi juga terhambat oleh lamanya penerbitan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat, terutama untuk proyek yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

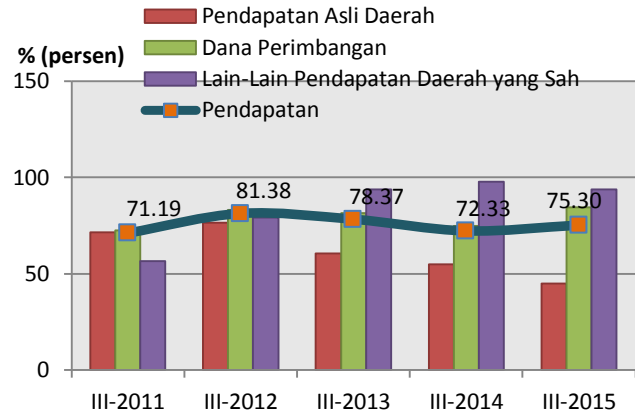
Hingga triwulan III-2015, penyerapan anggaran belanja Provinsi Maluku mencapai Rp1.478,3 miliar, atau 63,51% dari pagu belanja. Secara persentase, realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode tahun 2011-2014 yang sebesar 55,74% atau tahun 2014 sebesar 56,69%. Secara nominal, realisasi APBD tahun 2015 secara kumulatif hingga triwulan III tumbuh cukup tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu mencapai 33,68%. Hal ini turut mendorong pertumbuhan PDRB Maluku dari sisi konsumsi pemerintah.

4.2.1. Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku

Realisasi pendapatan daerah menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Pada triwulan III-2015, realisasi pendapatan daerah Provinsi Maluku tercatat sebesar Rp1.729,73 miliar atau sebesar 75,30% terhadap pagu APBD sebesar Rp2.297,2 miliar. Realisasi pendapatan daerah triwulan III-2015 tersebut sedikit lebih tinggi dibanding realisasi periode yang sama tahun sebelumnya yang memiliki realisasi sebesar 72,33%. Tingkat realisasi pendapatan yang cukup baik tersebut terutama bersumber dari realisasi Dana Perimbangan dari pusat, yang memiliki pangsa 60,97% terhadap total APBD, jauh lebih besar dibanding pangsa pos Pendapatan Asli Daerah (26,27%) ataupun Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (12,77%).

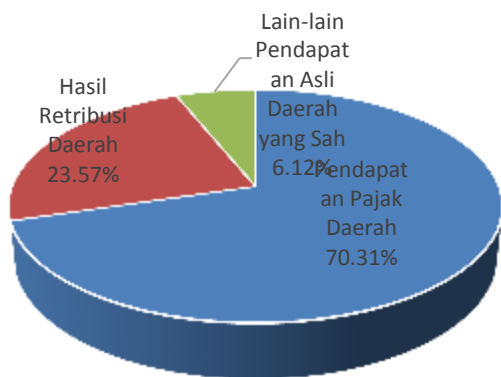


Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 4.3 Proporsi Realisasi Pendapatan APBD 2015 Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan III

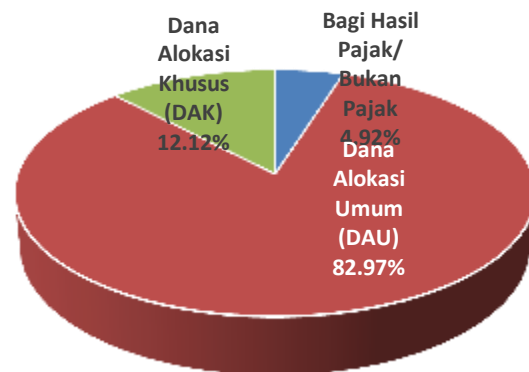


Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 4.4 Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku s/d Triwulan III Tahun 2011-2015

Pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencatat realisasi yang menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. PAD sampai dengan triwulan laporan terealisasi sebesar Rp271,27 miliar atau 44,95% dari target APBD, menurun dibandingkan realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 54,98%. Menurut komponen penyusunnya, realisasi PAD diperoleh dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp190,74 miliar atau terealisasi 46,84% dari target, menurun dibandingkan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 52,48%; hasil retribusi daerah Rp63,93 miliar dengan realisasi 96,26%, jauh melampaui realisasi tahun sebelumnya sebesar 59,69%; pos lain-lain PAD yang sah sebesar Rp16,60 miliar (27,28%), jauh lebih rendah daripada realisasi pada triwulan III-2014 sebesar 67%; sementara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum ada realisasi.



Sumber: BPPKAD Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 4.5 Proporsi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) APBD 2015 Provinsi Maluku s/d Triwulan III



Sumber: BPPKAD Provinsi Maluku; diolah
 Grafik 4.6 Proporsi Realisasi Dana Perimbangan APBD 2015 Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan III

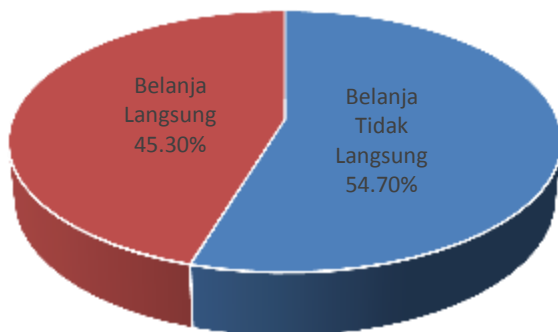
Dana Perimbangan mencatat angka realisasi hingga triwulan III-2015 yang jauh lebih tinggi dibanding realisasi hingga triwulan yang sama tahun sebelumnya. Realisasi Dana Perimbangan mencapai nilai Rp1.182,98 miliar atau telah terealisasi sebesar 84,47% dari pagu sebesar Rp1.400,5 miliar, lebih tinggi daripada realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 74,74%. Menurut komponen penyusun Dana Perimbangan, subpos Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan realisasi pendapatan sebesar Rp981,48 miliar atau 83,33%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 75,0%. Selanjutnya, subpos Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak mencatatkan realisasi sebesar Rp58,17 miliar atau 42,74%. Sementara itu, subpos Dana Alokasi Khusus (DAK) terealisasi sebesar Rp143,33 miliar atau terealisasi sebesar 165,46%.

Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatat realisasi yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Nilai realisasinya mencapai Rp275,48 miliar atau 93,94% dari pagu yang ditetapkan, sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 97,75%. Menurut komponen penyusunnya, realisasi subpos pendapatan dari hibah mencapai Rp168 juta atau 78,15%, jauh meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,42%. Sementara itu, subpos dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp275,31 miliar atau 93,95%, sedikit lebih rendah daripada realisasi triwulan III-2014 sebesar 97,88%.

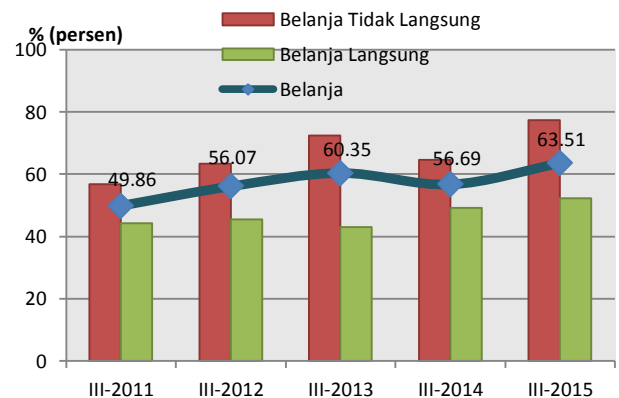
4.2.2. Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku

Hingga triwulan III-2015, penyerapan anggaran belanja Provinsi Maluku mencapai 63,51%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode tahun 2011-2014, yaitu 55,74%. Sebagaimana pola periode sebelumnya, pos Belanja Tidak Langsung membukukan persentase realisasi yang lebih besar daripada pos Belanja Langsung. Hingga triwulan berjalan, pos belanja tidak langsung mencapai penyerapan sebesar Rp808,56 miliar atau 77,26%, meningkat dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 64,61%. Sementara itu, pos belanja langsung mencetak angka penyerapan sebesar Rp669,72 miliar atau 52,3%, lebih tinggi daripada realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 49,2%.



Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; diolah

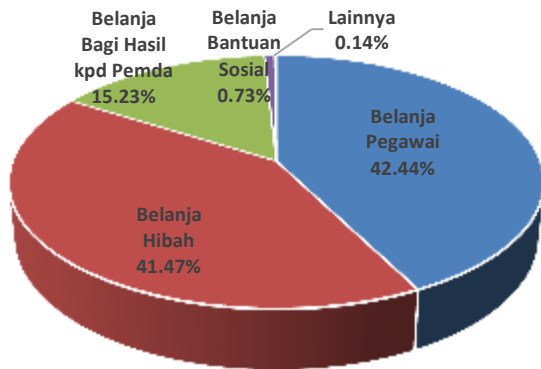
Grafik 4.7 Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku s/d Triwulan III Tahun 2011-2015



Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; diolah

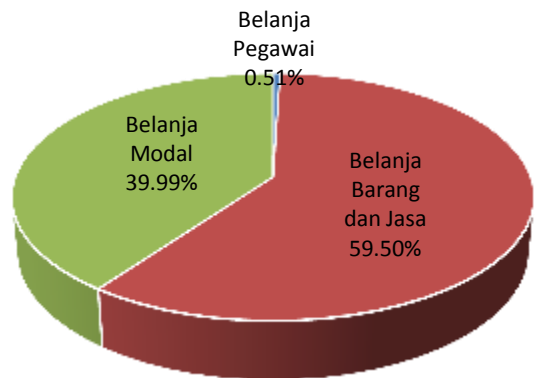
Grafik 4.8 Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi Maluku s/d Triwulan III Tahun 2011-2015

Subpos Belanja Tidak Langsung yang mencatat realisasi tertinggi adalah Belanja Bantuan Sosial. Nominal realisasinya mencapai Rp5,86 miliar atau 97,75% dari pagu yang ditetapkan. Posisi kedua ditempati Belanja Hibah yang terealisasi sebesar Rp335,3 miliar atau 92,41%. Ketiga, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp123,1 miliar (80,37%). Keempat adalah Belanja Pegawai sebesar Rp343,1 miliar (69,32%), diikuti oleh Belanja Bunga sebesar Rp473 juta (54,14%). Adapun realisasi subpos Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota, Pemdes & Parpol serta subpos Belanja Tidak Terduga masih sangat rendah, atau di bawah 5%. Anggaran Belanja Tidak Langsung terserap lebih cepat karena pos ini sebagian besar mencakup belanja rutin Pemda, seperti gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan yang termasuk dalam subpos belanja pegawai.



Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; diolah

Grafik 4.9 Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung APBD 2015 Maluku sampai dengan Triwulan III-2015



Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; diolah

Grafik 4.10 Proporsi Realisasi Belanja Langsung APBD 2015 Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan III-2015

Dalam pos Belanja Langsung, sub pos yang memiliki realisasi anggaran tertinggi adalah Belanja Modal sebesar Rp303,61 miliar atau 55,7% dari pagu ditetapkan. Lalu diikuti oleh Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp363,07 miliar atau 49,82% dan Belanja Pegawai sebesar Rp3,04 miliar atau 41,31%. Hingga akhir Triwulan III-2015, realisasi belanja langsung pada triwulan laporan dinilai masih tergolong lamban, meskipun sudah meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Secara umum, APBD Provinsi Maluku hingga triwulan III-2015 dilaporkan mengalami surplus. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.729,73 miliar yang lebih besar daripada penyerapan anggaran belanja sebesar Rp1.478,28 miliar, sehingga surplus anggaran tercatat sebesar Rp251,45 miliar.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan dan Belanja dari APBD Provinsi Maluku Triwulan III-2015 (Rp juta)

Uraian	PAGU APBD 2015	Realisasi Tw III-2015	% Realisasi Tw III-2015
PENDAPATAN	2,297,206	1,729,730	75.30
1 Pendapatan Asli Daerah	603,458	271,272	44.95
1 Pendapatan Pajak Daerah	407,189	190,744	46.84
2 Hasil Retribusi Daerah	66,407	63,926	96.26
3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	69,002	-	0.00
4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60,860	16,601	27.28
2 DanaPerimbangan	1,400,505	1,182,976	84.47
1 Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	136,108	58,170	42.74
2 Dana Alokasi Umum (DAU)	1,177,775	981,479	83.33
3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	86,622	143,327	165.46
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	293,243	275,481	93.94
1 Pendapatan Hibah	215	168	78.15
2 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	293,028	275,313	93.95
BELANJA	2,327,742	1,478,282	63.51
1 Belanja Tidak Langsung	1,046,547	808,559	77.26
1 Belanja Pegawai	494,977	343,113	69.32
2 Belanja Bunga	874	473	54.14
3 Belanja Subsidi	-	-	-
4 Belanja Hibah	362,840	335,317	92.41
5 Belanja Bantuan Sosial	6,000	5,865	97.75
6 Belanja Bagi Hasil kpd Prov/ Kab/ Kota, Pemdes	153,175	123,106	80.37
7 Belanja Bantuan Keuangan kpd Prov/ Kab/ Kota, Pemdes & parpol	21,411	685	3.20
8 Belanja Tidak Terduga	7,270	-	0.00
2 Belanja Langsung	1,281,194	669,723	52.27
1 Belanja Pegawai	7,358	3,040	41.31
2 Belanja BarangdanJasa	728,785	363,074	49.82
3 Belanja Modal	545,051	303,609	55.70
SURPLUS/(DEFISIT)	-30,536	251,448	(823.46)
PEMBIAYAAN			
1 Penerimaan Pembiayaan Daerah	66,240	-10,330	(15.59)
1 SILPA Tahun Sebelumnya	66,240	-10,330	(15.59)
2 PengeluaranPembiayaanDaerah	7,736	1,368	17.68
1 Pembentukan Dana Cadangan	5,000	-	0.00
2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-	-
3 Pembayaran Pokok Utang	2,736	1,368	50.00
4 Pembentukan Dana Bergulir Pemda	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	58,504	-11,698	(20.00)
SISA LEBIH/ KURANG PEMBIAYAAN	27,968	239,750	857.22

Sumber: Badan Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku; diolah

BAB V. PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN DAERAH

5.1. Perkembangan Ketenagakerjaan dan Pengangguran

Pada bulan Agustus 2015, data ketenagakerjaan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Maluku mencapai 9,93%, atau mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 10,51%. Jumlah penduduk usia produktif tercatat meningkat sebesar 2,22% dari tahun sebelumnya menjadi 1,12 juta jiwa. Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 60,92% pada bulan Agustus 2014 menjadi 64,47% pada Agustus 2015. Membaiknya penyerapan tenaga kerja tersebut disinyalir dipengaruhi oleh penyelenggaraan berbagai event nasional dan meningkatnya pembangunan infrastruktur.

Tabel 5-1 Perkembangan Kondisi Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja di Provinsi Maluku

Ketenagakerjaan	2013		2014		2015	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Penduduk Usia 15+ (Orang)	1.070.153	1.079.849	1.089.204	1.103.643	1.116.072	1.128.137
Angkatan Kerja (Orang)	723.107	668.721	728.078	672.304	711.056	727.259
Bekerja (Org)	673.138	602.429	680.075	601.651	663.261	655.063
Pengangguran (Org)	49.969	66.292	48.003	70.653	47.795	72.196
Bukan Angkatan Kerja (Org)	347.046	411.128	361.126	431.339	405.016	400.878
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	67,57%	61,92%	66,84%	60,92%	63,71%	64,47%
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,91%	9,91%	6,59%	10,51%	6,72%	9,93%

Sumber: BPS Maluku

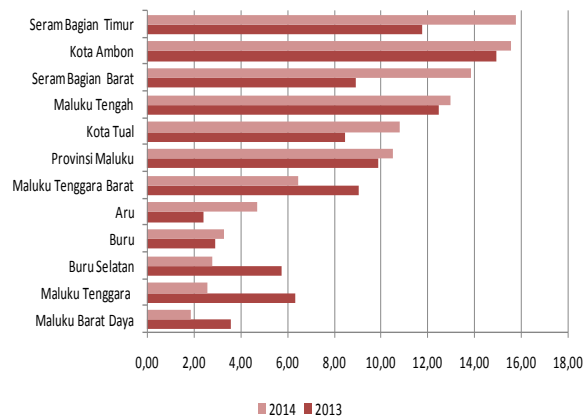
Pangsa tenaga kerja di Provinsi Maluku mayoritas masih didominasi pada tiga sektor ekonomi unggulan Maluku, antara lain sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan, sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan dan sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi, dengan proporsi masing-masing sebesar 46,79%, 18,22% dan 16,53%.

Tabel 5-2 Sebaran Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sektor	2013		2014		2015	
	Feb	Ags	Feb	Ags	Feb	Ags
Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan & Perikanan	49,14%	48,26%	50,55%	48,09%	40,86%	46,79%
Industri	5,72%	3,35%	5,34%	3,37%	3,76%	3,56%
Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi	16,19%	14,03%	13,09%	13,36%	18,74%	16,53%
Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan	18,04%	20,07%	19,27%	20,43%	19,60%	18,22%
Lainnya*	10,92%	14,30%	11,75%	14,75%	17,05%	14,90%

Sumber: BPS Maluku

Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, peningkatan pangsa jumlah tenaga kerja terutama terjadi pada sektor Perdagangan, Rumah Makan & Jasa Akomodasi dan sektor Industri. Sementara itu, pangsa tenaga kerja pada sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan dan sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan & Perikanan relatif menurun.



Sumber: BPS Maluku
Grafik 5-1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku pada Tahun 2013-2014

Jika mencermati perbandingan tingkat pengangguran terbuka di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku, Kota Ambon sebagai ibukota provinsi menduduki urutan kedua dengan persentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 15,58% pada tahun 2014. Sementara itu, TPT di Provinsi Maluku secara keseluruhan sebesar 10,51%.



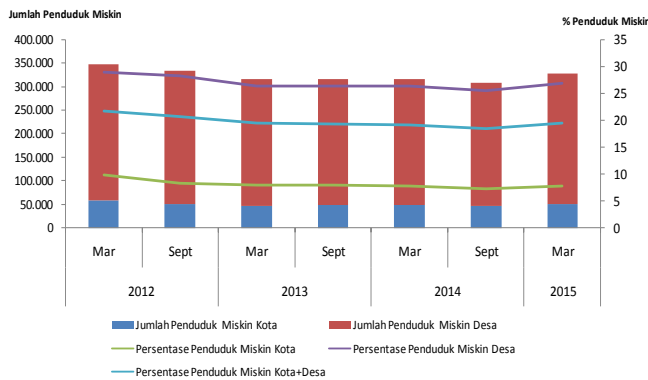
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, BI Maluku
Grafik 5-2 Perkembangan Usaha dan Penggunaan Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan oleh Bank Indonesia, penggunaan tenaga kerja pada periode triwulan III-2015 masih mengalami penurunan sejak triwulan sebelumnya. Penurunan ini merupakan dampak langsung maupun tidak langsung dari kebijakan moratorium di sektor perikanan. Menurut hasil kunjungan wawancara dengan sejumlah pengusaha di kota Ambon, pengurangan tenaga kerja di sektor perikanan diperkirakan cukup signifikan berpengaruh pada penurunan daya beli masyarakat serta penurunan pendapatan pada beberapa sektor terkait seperti perdagangan ritel. Perlambatan ekonomi ini juga diperparah dengan masih rendahnya serapan belanja pemerintah pusat maupun daerah, serta melemahnya permintaan ekspor dan menurunnya harga jual komoditas ekspor.

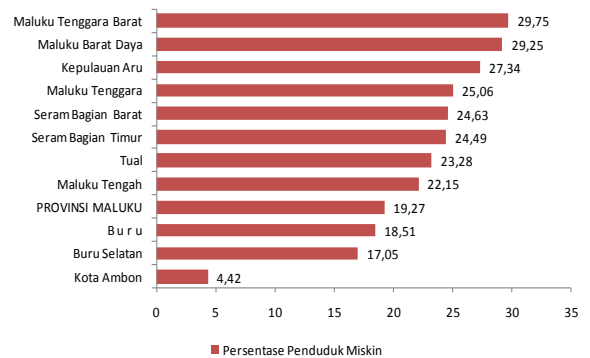
Namun, penggunaan tenaga kerja di triwulan depan diperkirakan akan membaik seiring dengan realisasi anggaran pemerintah yang lebih tinggi, kondisi makroekonomi yang cenderung stabil, serta inflasi yang cenderung melambat.

5.2. Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data BPS Pusat per Maret 2015, jumlah penduduk miskin Provinsi Maluku mencapai 328.410 jiwa, atau meningkat 3,89% dari periode Maret 2014. Seiring dengan peningkatan tersebut, persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk, pada Maret 2015 meningkat menjadi 19,51% dari periode sebelumnya yaitu Maret 2014 yang mencapai 19,13%. Meningkatnya jumlah penduduk miskin antara lain merupakan imbas dari perlambatan ekonomi Maluku pada tahun 2015. Jumlah penduduk miskin di kota per Maret 2015 meningkat 1.940 orang atau 3,89% menjadi 51.770 orang dibandingkan dengan periode Maret 2014. Sedangkan jumlah penduduk miskin di desa per Maret 2015 menurun 10.360 orang atau 3,89% menjadi 276.640 orang dibandingkan dengan periode Maret 2014.



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah
Grafik 5-3 Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku



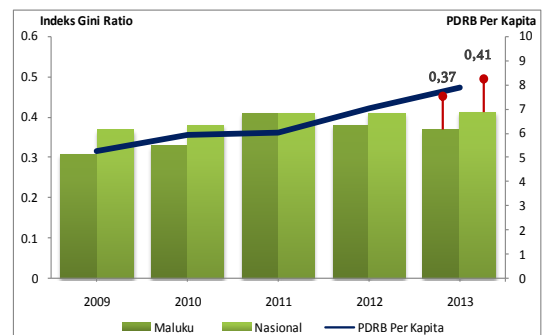
Sumber: BPS Pusat; diolah
Grafik 5-4 Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Maluku (2013)

Meskipun Provinsi Maluku merupakan Provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi ketiga di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), namun perlu diperhatikan bahwa sebaran jumlah penduduk miskin Maluku ternyata didominasi di daerah luar Kota Ambon. Sementara itu jumlah penduduk kota Ambon sendiri mencapai 23,86% dari jumlah penduduk di Provinsi Maluku. Faktor tingkat kemiskinan yang relatif tinggi di luar Kota Ambon dipengaruhi oleh kesenjangan (*gap*) infrastruktur seperti akses transportasi, fasilitas kesehatan, akses keuangan dan perbankan, serta pendidikan.

Tabel 5-3 Kedalaman & Keparahan Kemiskinan Provinsi Maluku

Indikator	2012		2013		2014		2015
	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar	Sept	Mar
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)							
Kota	1,74	1,61	1,49	1,13	1,53	1,14	1,36
Desa	6,24	6,03	5,30	5,00	5,22	5,99	4,89
Kota+Desa	4,56	4,38	3,88	3,52	3,80	4,11	3,52
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)							
Kota	0,42	0,46	0,41	0,24	0,52	0,26	0,33
Desa	1,91	1,81	1,61	1,36	1,49	2,08	1,3
Kota+Desa	1,36	1,31	1,16	0,93	1,11	1,37	0,92

Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah



Sumber: BPS Pusat; diolah
Grafik 5-5 Indeks Gini Ratio

Memperhatikan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) yang mengalami penurunan 3,80 pada Maret 2014 menjadi 3,52 pada September 2014, mengindikasikan adanya sedikit perbaikan daya beli penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan ini terjadi baik di kota maupun di desa. Tren ini mengindikasikan bahwa masih ada harapan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin ke depannya.

Begitu halnya dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga mengalami penurunan. Indeks tersebut merupakan ukuran ketimpangan/disparitas pengeluaran penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan tercatat menurun dari 1,11 pada Maret 2014 menjadi 0,92 pada Maret 2015. Penurunan indeks tersebut terjadi pada kota dan desa.

5.3. Perkembangan Nilai Tukar Petani

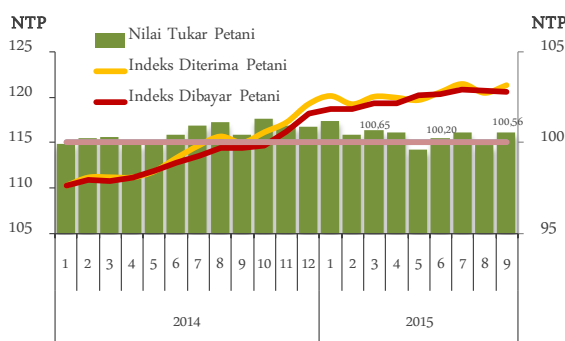
Tingkat kesejahteraan petani pada triwulan III-2015 mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Pergerakan NTP dari triwulan II-2015 ke triwulan III-2015 mengalami peningkatan dari level 100,20 ke level 100,56. Peningkatan NTP pada triwulan laporan ini disebabkan oleh perubahan indeks harga yang diterima petani (It) yang meningkat sebesar 0,63% menjadi 121,29, sementara untuk indeks harga yang dibayar petani (Ib) tercatat hanya mengalami peningkatan sebesar 0,27% dibandingkan posisi triwulan sebelumnya menjadi 121,26.

Tabel 5-4 Perkembangan Nilai Tukar Petani di Provinsi Maluku

SEKTOR	2013				2014				2015		
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III
NTP Tanaman Pangan	88,93	88,73	85,71	95,28	93,86	93,90	93,52	95,39	98,28	97,81	96,42
NTP Hortikultura	114,88	114,81	116,74	108,29	108,33	108,12	109,75	111,26	110,19	110,34	112,82
NTP Tanaman Perkebunan Rakyat	103,47	104,51	102,59	96,55	96,93	96,85	95,81	95,39	92,64	91,80	92,27
NTP Peternakan	84,88	85,10	84,19	103,85	103,36	103,53	104,19	102,74	106,00	103,72	104,99
NTP Perikanan	126,13	125,36	128,83	105,52	105,63	106,90	107,28	105,97	107,36	105,90	104,83
NTP	105,64	105,64	105,44	100,57	100,29	100,39	100,43	100,88	100,65	100,20	100,56

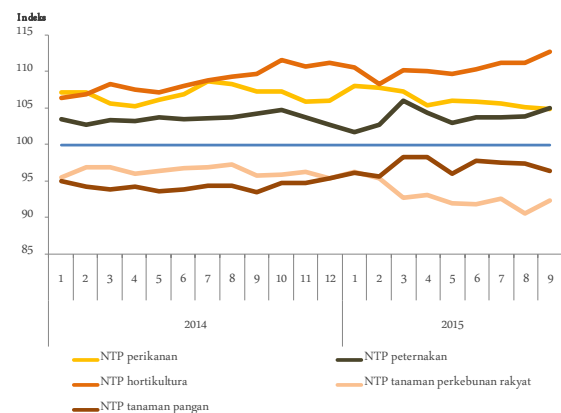
SBH 2012 = 100

Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah

Grafik 5-6 Nilai Tukar Petani (%)



Sumber: BPS Provinsi Maluku; diolah

Grafik 5-7 Nilai Tukar Petani per Sub Sektor (%)

Peningkatan NTP yang terjadi pada sub sektor hortikultura, peternakan dan tanaman perkebunan rakyat mendorong peningkatan NTP secara keseluruhan. Pada triwulan laporan, sub sektor hortikultura mengalami peningkatan NTP terbesar yaitu 2,25% dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan NTP tersebut bersumber dari kenaikan Indeks Diterima Petani sebesar 2,45% lebih besar dari kenaikan Indeks yang Diterima Petani hanya sebesar 0,22% dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi serupa terjadi pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat dengan NTP yang meningkat sebesar 0,51% dibanding triwulan sebelumnya, disebabkan oleh kenaikan Indeks Diterima Petani yang hanya sebesar 0,75%, lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi yang tercermin dari peningkatan Indeks Dibayar Petani sebesar 0,23%. Demikian pula halnya yang terjadi pada sub sektor peternakan, di mana NTP-nya juga mengalami kenaikan sebesar 1,22% secara triwulanan, bersumber dari peningkatan Indeks Diterima Petani sebesar 1,54% yang lebih tinggi dibandingkan kenaikan Indeks Dibayar Petani sebesar 0,31%. Lain halnya dengan sub sektor perikanan yang masih mengalami penurunan NTP, yaitu sebesar 1,01%, lebih dipengaruhi oleh menurunnya Indeks Diterima Nelayan sebesar 0,31%, sementara di sisi lain Indeks Dibayar Nelayan justru meningkat sebesar 0,71%.

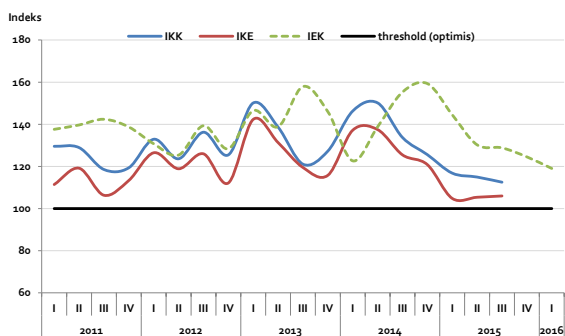
Sub sektor hortikultura tercatat mengalami pertumbuhan NTP karena didorong oleh adanya kenaikan harga jual untuk tiga jenis komoditasnya yaitu cabai dan sayuran sebagai dampak dari *el nino* yang memanjang. Sementara itu, penurunan NTP sub sektor tanaman perkebunan rakyat juga dipengaruhi menurunnya hasil pertanian khususnya padi-padian akibat kekeringan di Seram Bagian Timur. Kendati demikian, dampak *el nino* justru menguntungkan di sub sektor perikanan, hal ini disebabkan berkurangnya curah hujan dan menurunnya intensitas angin mendorong nelayan tradisional untuk melaut. Selain itu, *el nino* juga mengakibatkan melimpahnya ikan di perairan Maluku, ditambah kebijakan moratorium yang berdampak positif meningkatkan persediaan ikan di laut.



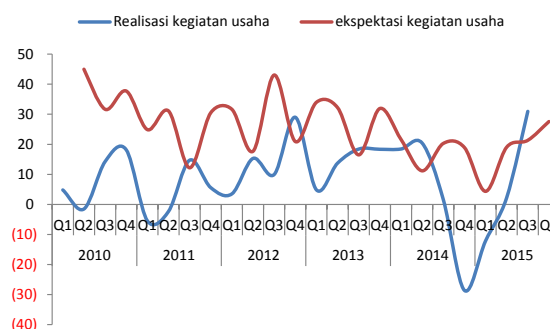
BAB VI. PROSPEK PEREKONOMIAN PROVINSI MALUKU

6.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV-2015 diperkirakan tumbuh positif dan dalam tren yang meningkat. Perekonomian Maluku pada triwulan mendatang diperkirakan tumbuh dalam rentang 5.20-6.20% (yoy). Dari sisi dunia usaha, akselerasi pada triwulan mendatang antara lain disebabkan masuknya masa panen tabama dan beberapa hortikultura sesuai dengan pola produksinya, maraknya penyelenggaraan MICE (*Meeting, Invention, Convention dan Exhibition*) menjelang akhir tahun, serta meningkatnya aktivitas konstruksi didorong oleh optimalnya kinerja belanja pemerintah dan kelanjutan pengerjaan pembangunan proyek *multi-years*. Peningkatan dari sisi dunia usaha terlihat dari hasil SKDU Bank Indonesia, dimana ekspektasi kegiatan usaha di triwulan IV-2015 tercatat sebesar 27.58%, meningkat dibandingkan triwulan III-2015 sebesar 21.34%.



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia
Grafik 6-1 Indeks Ekspektasi Konsumen



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha – Bank Indonesia
Grafik 6-2 Indeks Kegiatan Dunia Usaha

Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi Maluku triwulan mendatang diperkirakan masih didorong oleh konsumsi rumah tangga namun dalam tingkat terbatas. Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap triwulan IV-2015 menunjukkan perkembangan yang moderat. IEK pada triwulan IV-2015 tercatat sebesar 124.56, menurun dibandingkan triwulan III-2015 sebesar 128.83, namun masih dalam kondisi yang optimis (IEK di atas 100). Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih tumbuh cukup kuat didorong oleh meningkatnya permintaan dan aktivitas perdagangan seiring dengan perayaan Pesparawi Nasional, Maluku Fair 2015, Hari Raya Natal dan persiapan Tahun Baru 2016, serta musim liburan sekolah. Risiko yang dapat menahan kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan mendatang adalah kenaikan TDL tahap selanjutnya, kenaikan harga barang dan/atau jasa sebagai dampak dari penyesuaian harga BBM, tarif angkutan udara yang diperkirakan meningkat seiring dengan masuknya periode *peak-season* untuk aktivitas penerbangan, serta tekanan pada mata uang rupiah yang bertransmisi pada kenaikan *imported inflation*.

Konsumsi dan investasi pemerintah diperkirakan meningkat dan ikut memacu pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan mendatang seiring dengan penyelenggaraan pilkada serentak dan penyerapan anggaran yang mengalami akselerasi memasuki akhir tahun. Belanja pemerintah, baik belanja modal maupun belanja rutin (belanja pegawai dan bantuan sosial) diperkirakan meningkat seiring dengan adanya penyelenggaraan pilkada serentak, serta meningkatnya realisasi anggaran mengikuti pola musiman yang

biasanya penyerapannya dioptimalkan menjelang akhir tahun. Belanja yang berdampak jangka panjang, seperti belanja modal dan belanja barang, diperkirakan meningkat seiring dengan kelanjutan pengerjaan pembangunan proyek *multi-years*, setelah pada periode sebelumnya sempat menemui kendala.

Kinerja PMTDB (investasi) diperkirakan meningkat seiring dengan membaiknya ekspektasi dunia usaha terhadap realisasi kegiatan usahanya, setelah pada periode triwulan III-2015 impor barang modal, pembelian bahan baku dan persediaan (stok) tercatat meningkat. Hasil SKDU menunjukkan bahwa beberapa sektor mengalami peningkatan ekspektasi investasi, antara lain: pertanian, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, transportasi dan komunikasi dan jasa keuangan. Meski demikian, terdapat risiko yang dapat menahan kinerja investasi, diantaranya meningkatnya harga bahan bangunan akibat faktor nilai tukar rupiah dan kenaikan harga bahan baku sehingga berdampak pada keputusan dunia usaha untuk menahan pengadaan barang modal/stok, serta faktor cuaca yang mengambat aktivitas konstruksi.

Kinerja ekspor dan impor diperkirakan cenderung tertahan seiring dengan perlambatan ekonomi global serta permintaan domestik yang masih moderat. Hal ini antara lain disebabkan kondisi ekonomi global yang masih tumbuh terbatas sehingga mengurangi permintaan terhadap barang ekspor Maluku serta pergerakan harga ekspor komoditas yang masih rendah. Di sisi lain, kinerja impor diperkirakan juga masih dalam tren yang moderat seiring dengan kondisi ekonomi yang masih lesu sehingga permintaan domestik cenderung rendah. Selain itu, tekanan pada nilai tukar turut memengaruhi kinerja impor yang menyebabkan harga barang impor cenderung mahal. Neraca perdagangan eksternal Maluku diperkirakan masih dalam kondisi defisit namun dalam tren yang meningkat atau lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan IV-2015 akan didorong oleh kategori ekonomi dengan pertumbuhan tinggi, yakni perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, transportasi dan administrasi pemerintahan. Kinerja sektor perdagangan diperkirakan tumbuh tinggi seiring dengan meningkatnya aktivitas jual beli dalam rangka Pesparawi Nasional, Hari Raya Natal dan persiapan Tahun Baru 2015, serta penyelenggaraan pilkada serentak. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum berkinerja meningkat seiring dengan meningkatnya tingkat okupansi hotel dan maraknya kegiatan MICE yang diselenggarakan di Maluku. Sektor transportasi diperkirakan meningkat seiring dengan ramainya arus kunjungan dari dan menuju Maluku dalam rangka MICE maupun hari besar keagamaan, seperti Hari Raya Natal, persiapan Tahun Baru 2015 dan masuknya musim liburan. Meningkatnya kinerja sektor administrasi pemerintahan dipengaruhi oleh belanja rutin Pemerintah yang cenderung meningkat mengikuti pola musiman dari penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha, sektor yang mengalami peningkatan ekspektasi kegiatan usaha, antara lain: pertanian, angkutan dan komunikasi serta jasa keuangan.

Perekonomian Maluku pada tahun 2016 diperkirakan membaik dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dari sisi internal, membaiknya kinerja perekonomian Maluku didorong oleh optimisme terhadap investasi, baik bangunan maupun non bangunan terkait dengan implementasi program Tol Laut, peningkatan kapasitas Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon, dan beroperasinya Jembatan Merah Putih, yang kemudian memberikan *multiplier-effect* terhadap kinerja perdagangan maupun transportasi. Selain itu, kinerja pertanian diperkirakan meningkat dan menjadi salah satu sektor dengan sumbangan tertinggi seiring

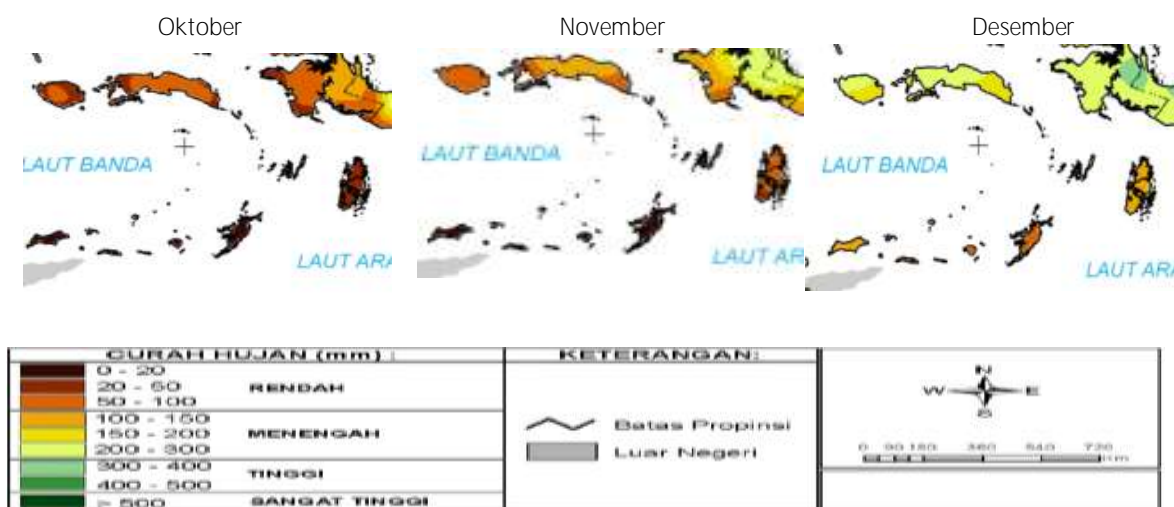
membaihnya kinerja sektor perikanan sebagai dampak positif dari pemberlakuan berbagai kebijakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait proses dan izin penangkapan ikan. Dari sisi eksternal, perbaikan kinerja ekspor turut berdampak positif bagi perekonomian Maluku seiring membaiknya perekonomian dari negara mitra tujuan ekspor seperti US dan Cina. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi Maluku pada tahun 2016 diperkirakan berada pada kisaran 5,4 – 5,8% (yoy).

6.2. Inflasi

Laju inflasi pada Triwulan IV-2015 diperkirakan berada pada rentang 6,00%-7,00% (yoy). Secara umum, tekanan inflasi Maluku memasuki triwulan mendatang diperkirakan mereda, antara lain disebabkan faktor *high-base effect* akibat kenaikan harga BBM bersubsidi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya. Hal yang menjadi faktor *dowside-risk* inflasi di triwulan mendatang adalah masuknya periode panen beras dan bumbu-bumbuan di beberapa sentra produksi Maluku, serta kondisi cuaca yang cukup kondusif untuk aktivitas sayuran maupun perkebunan, khususnya pada bulan Oktober dan November.

Meski demikian, terdapat beberapa risiko yang perlu mendapat perhatian. Dari sisi internal, meski sentra produksi beras di Maluku telah memasuki masa panen, namun pasokan beras dari luar Maluku cenderung menurun sebagai dampak el nino. Selain itu, memasuki triwulan IV-2015, banyaknya penyelenggaraan *event* khusus seperti Pesarawi Nasional dan Maluku Expo 2015 berpotensi menambah tekanan dari sisi permintaan, di samping *event* tahunan seperti perayaan Hari Natal dan persiapan Tahun Baru 2016. Sementara itu, wacana kenaikan UMP Maluku tahun 2016 dan rencana migrasi pelanggan 900 VA ke tarif non subsidi diperkirakan menambah tekanan dari sisi ekspektasi inflasi dan pengeluaran masyarakat.

Sedangkan dari sisi eksternal, tekanan terhadap nilai tukar rupiah diperkirakan mereda sehingga mengurangi potensi kenaikan *tariff adjustment* TTL non subsidi dan harga BBM serta dampak lanjutannya. Tekanan lain yang perlu diwaspadai adalah dampak dari implementasi PMK No. 132 tahun 2015 tentang bea impor barang konsumsi.

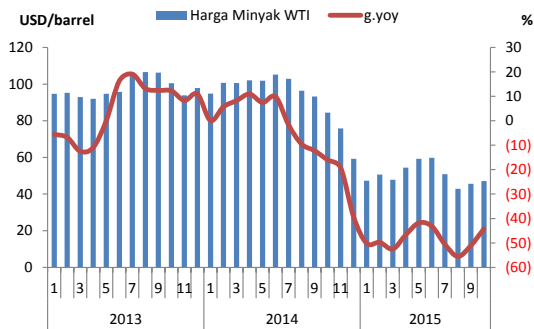


Grafik 6-3Perkiraan Curah Hujan pada Triwulan IV 2015

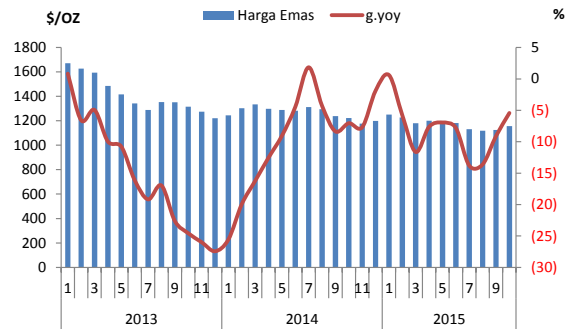
Mencermati kondisi curah hujan di Provinsi Maluku pada triwulan IV-2015, diperkirakan berada pada kondisi rendah pada bulan Oktober dan November, sehingga diperkirakan tidak mengganggu pasokan sayuran maupun

ikan di Maluku. Namun seperti pada waktu-waktu sebelumnya, pada bulan Desember curah hujan mulai meningkat disertai gelombang tinggi sehingga berpotensi mengganggu kegiatan penangkapan ikan serta pengiriman barang melalui kapal laut. Hal ini berdampak pada peningkatan inflasi untuk komoditas bumbu-bumbuan, daging, telur dan hasil-hasilnya.

Selanjutnya, potensi tekanan inflasi pada tarif angkutan udara diperkirakan juga cukup kuat seiring menguatnya harga minyak dunia, dan periode *high-season* dalam rangka perayaan Natal serta persiapan liburan Tahun Baru. Sementara itu, harga emas global yang juga mengalami pemulihan berpotensi menambah tekanan pada inflasi inti melalui kenaikan harga emas perhiasan.

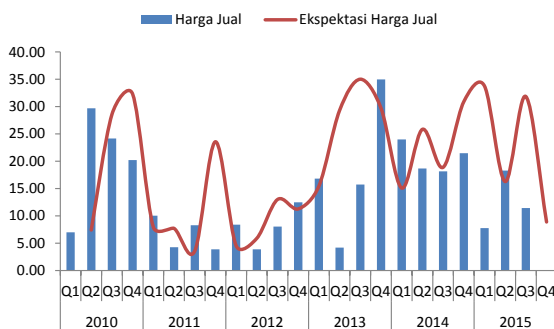


Sumber: Bloomberg
Grafik 6-4 Pergerakan harga minyak dunia

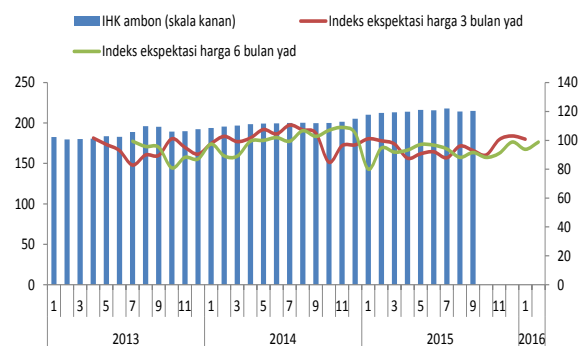


Sumber: Bloomberg
Grafik 6-5 Pergerakan harga emas dunia

Berdasarkan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia, ekspektasi inflasi masyarakat Kota Ambon baik dalam 3 maupun 6 bulan yang akan datang mengalami peningkatan hingga triwulan I-2016. Peningkatan ekspektasi berasal dari meningkatnya perkiraan harga pada kelompok bahan makanan, sandang dan kesehatan sejalan dengan meningkatnya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha Bank Indonesia, ekspektasi harga jual dari sisi pengusaha cenderung menurun pada triwulan IV-2015. Penurunan ekspektasi harga jual berasal dari dunia usaha sektor pertanian, PHR (perdagangan, hotel dan restoran), dan jasa sebagai respon untuk mempertahankan daya beli konsumen di tengah kondisi ketidak pastian ekonomi global maupun nasional.



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha-Bank Indonesia
Grafik 6-6 Ekspektasi Harga Jual



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia
Grafik 6-7 Indeks ekspektasi harga konsumen

Ke depan, perkembangan inflasi pada tahun 2016 diperkirakan menurun dan relatif terkendali sejalan dengan penetapan target inflasi nasional sebesar $4 \pm 1\%$. Dari sisi eksternal, inflasi yang rendah dan terkendali ditunjang oleh masih terbatasnya tekanan kenaikan harga komoditas seiring dengan laju pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung secara gradual. Sementara dari sisi

internal, permintaan domestik diperkirakan masih tumbuh secara moderat disertai ekspektasi inflasi yang terjaga, meningkatnya produksi bahan makanan dalam rangka mencapai kemandirian dan ketahanan pangan, serta langkah koordinasi pengendalian inflasi yang lebih intensif antara Bank Indonesia dengan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi permasalahan struktural dengan mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi daerah. Secara keseluruhan, inflasi Maluku pada 2016 diperkirakan berada pada kisaran $5 \pm 1\%$.

Meski demikian, terdapat beberapa risiko di 2016 terutama terkait dengan kemungkinan implementasi kebijakan energi oleh pemerintah. Beberapa rencana pemerintah terkait kebijakan energi antara lain pengalihan pelanggan listrik dengan daya 900 VA ke 1300 VA, penyesuaian tarif listrik rumah tangga kelompok 1300 VA dan 2200 VA sesuai dengan harga keekonomiannya, penyesuaian harga BBM dan LPG. Selain itu, penyesuaian harga jual komoditas sebagai dampak dari perubahan nilai tukar rupiah diperkirakan turut menjadi risiko bagi inflasi.

6.3. Stabilitas Sistem Keuangan

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 17 November 2015 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 7,50%, dengan suku bunga *Deposit Facility* 5,50% dan *Lending Facility* pada 8,00%. Selain itu, Bank Indonesia juga menilai bahwa stabilitas makroekonomi semakin baik sehingga terdapat ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter. Oleh karena itu, RDG memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah, dari sebelumnya 8,00% menjadi 7,50%, berlaku efektif sejak 1 Desember 2015.

Mencermati potensi ke depan, masih terdapat ruang yang cukup luas untuk peningkatan kinerja intermediasi perbankan untuk Provinsi Maluku. Dengan tingkat LDR yang masih cukup rendah, yaitu 72,45% pada seluruh perbankan dan 63,45% pada bank umum, masih terdapat ruang intermediasi yang cukup tinggi di Provinsi Maluku. Ruang intermediasi juga semakin longgar dengan keputusan RDG Bank Indonesia untuk menurunkan tingkat GWM Primer dari 8,00% menjadi 7,50%. Dengan kembali meningkatnya keyakinan konsumen yang ditopang oleh naiknya permintaan atas pembelian barang tahan lama, diperkirakan penyaluran kredit perbankan pada sektor rumah tangga terus menguat. Namun demikian, penyaluran kredit pada sektor korporasi diperkirakan masih akan melesu, seiring dengan meningkatnya risiko usaha dan penurunan profitabilitas, terutama pada kategori pertanian, khususnya pada sub kategori perikanan dan perkebunan.

Dari sisi risiko kredit, terdapat potensi peningkatan NPL pada triwulan IV-2015, yang didorong oleh sektor korporasi. Dampak dari pengetatan peraturan di usaha perikanan sejak akhir 2014 lalu berdampak pada menurunnya profitabilitas korporasi perikanan di Maluku, terutama pada korporasi yang melakukan operasi penangkapan sendiri, dengan menggunakan kapal besar yang kebanyakan merupakan kapal eks asing. Mencermati bahwa 33% dari seluruh kredit korporasi di Maluku berasal dari usaha perikanan, penurunan profitabilitas usaha perikanan ini berpotensi menurunkan kualitas kredit korporasi Provinsi Maluku secara umum. Sementara itu, tingginya tingkat NPL kredit UMKM juga perlu diwaspadai, karena masih berada pada tingkat 4,41% pada triwulan III-2015, walaupun sudah dalam tren yang menurun. Di sisi lain, kredit rumah tangga masih terpantau aman.

